

**PARTISIPASI MASYARAKAT NAHDLATUL ULAMA
CIAMIS DALAM PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA
DAERAH DI KABUPATEN CIAMIS PERSPEKTIF TEORI
'AŞABIYAH IBNU KHALDUN**

(Studi Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2018)



SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
Purwokerto untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H)**

Oleh:

**MUHAMAD PAUZAN
NIM. 2017303091**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K.H SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO
2024**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya:

Nama : Muhamad Pauzan

NIM : 2017303091

Jenjang : S-1

Jurusan : Hukum Ekonomi dan Tata Negara

Program Studi : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul “PARTISIPASI MASYARAKAT NAHDLATUL ULAMA CIAMIS DALAM PELAKSANAAN PILKADA DI KABUPATEN CIAMIS PERSPEKTIF TEORI AŞABIYAH IBNU KHALDUN (STUDI PILKADA TAHUN 2018)” ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan saduran, juga bukan terjemah. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 2 Juli 2024

Saya yang menyatakan,



Muhamad Pauzan
NIM. 2017303091

PENGESAHAN

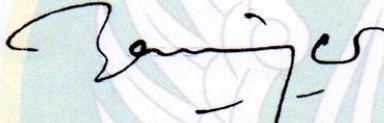
Skripsi berjudul

**Partisipasi Masyarakat Nahdlatul Ulama Ciamis Dalam Pelaksanaan
Pilkada Di Kabupaten Ciamis Perspektif Teori *Aṣabiyah* Ibnu Khaldun
(Studi Pilkada Tahun 2018)**

Yang disusun oleh **Muhamad Pauzan (NIM 2017303091)** Program Studi **Hukum Tata Negara**, Jurusan Hukum Ekonomi dan Tata Negara, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto telah diajukan pada tanggal **Juli 2024** dan dinyatakan memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

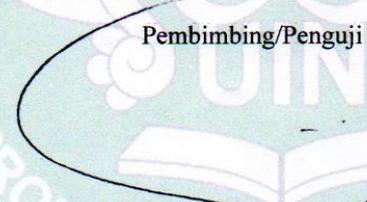
Ketua Sidang/Penguji I

Sekretaris Sidang/Penguji II


Dr. Bani Sarif Maula, LL.M, M.Ag.
NIP. 19750620 200112 1 003


Mokhamad Sukron, Lc., M. Hum.
NIP. 19860118 202012 1 005

Pembimbing/Penguji III


Luqman Rico Khashogi., S.H.I., M.S.I.
NIP. 19861104 20903 1008

Purwokerto, Juli 2024

Diketahui oleh:


Dekan Fakultas Syari'ah

12/7/2024
Dr. Supani, S.Ag., M.A
NIP. 19700705 200312 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 2 Juli 2024
Hal : Pengajuan Munaqasyah Skripsi Sdr. Muhamad Pauzan
Lampiran : 4 Eksemplar

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah UIN
Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
Purwokerto
di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa:

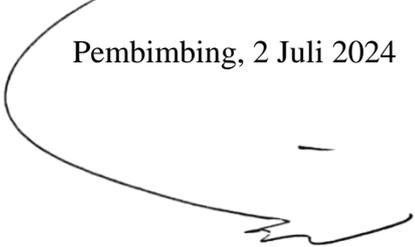
Nama : Muhamad Pauzan
NIM : 2017303091
Jurusan : Hukum Ekonomi dan Tata Negara
Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah
Judul : **Partisipasi Masyarakat Nahdlatul Ulama Ciamis
Dalam Pelaksanaan Pilkada Di Kabupaten Ciamis
Perspektif Teori Aşabiyah Ibnu Khaldun (Studi
Pilkada Tahun 2018)**

Sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk dimunaqosyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Demikian atas perhatiannya, saya mengucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing, 2 Juli 2024


Luqman Rico Khashogi, S.H.I., M.S.I
NIP. 19861104 20903 1008

**PARTISIPASI MASYARAKAT NAHDLATUL ULAMA CIAMIS DALAM
PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH DI KABUPATEN
CIAMIS PERSPEKTIF TEORI ‘AŞABIYAH/IBNU KHALDUN (Studi
Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2018)**

**Muhamad Pauzan
NIM. 2017303091**

**Program Studi Hukum Tata Negara
Universitas Islam Negeri Profesor Kyai Haji saifuddin Zuhri Purwokerto**

ABSTRAK

Seperti yang terlihat dalam partisipasi masyarakat NU Ciamis, mayoritas dari mereka lebih memilih pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati yang tidak mendapatkan dukungan dari Partai Kebangkitan Bangsa. Hal ini menarik karena Partai Kebangkitan Bangsa sendiri muncul dari inisiatif masyarakat NU untuk terlibat dalam arena politik. Meski demikian, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati yang didukung oleh partai yang sejalan dengan kepentingan masyarakat NU mengalami kekalahan.

Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis tingkat ‘aşabiyah masyarakat NU Ciamis. Dimana konsep ‘aşabiyah Ibnu Khaldun adalah konsep untuk memperkuat dan menyatukan suatu kelompok untuk tujuan Bersama. Apabila ‘aşabiyah suatu kelompok memudar maka akan membuat cita-cita masyarakat NU tidak akan terwujud. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan yang kemudian menggunakan pendekatan yuridis sosiologis untuk menilai realitas partisipasi politik masyarakat NU Ciamis. yang dimana peneliti menggunakan sumber data primer yaitu terjemah buku muqoddimah Ibnu Khaldun dan wawancara.

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwasannya Solidaritas masyarakat NU di Ciamis Utara sangat kuat karena salah satu calon bupati berasal dari daerah tersebut, yang meningkatkan ‘aşabiyah atau ikatan kelompok berdasarkan asal usul daerah calon bupati. Masyarakat NU Ciamis Kota juga menggunakan pertimbangan rasional dalam memilih calon bupati berdasarkan janji-janji kampanye yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Namun, ketidakpuasan terhadap pemimpin sebelumnya juga mendorong pemilih untuk mencari perubahan dan memilih calon baru yang dianggap lebih kompeten.

Kata Kunci : ‘aşabiyah, Partisipasi Politik, Pilkada

MOTTO

“Kebiasaan adalah kualitas jiwa.”

-Ibnu Khaldun

“Ini hanya tidak mudah bukan tidak mungkin”

-UwaAmin



PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk ibu dan bapak saya yang selalu memberikan dukungan, doa, dan semangat tiada henti. Terima kasih atas segala pengorbanan dan kasih sayang yang telah kalian berikan. Skripsi ini saya persembahkan sebagai bentuk rasa hormat dan terima kasih yang mendalam. Bapak Iim Ibrahim dan Ibu Enih Yuhaenih.



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Nama |
|------------|------|--------------------|----------------------------|
| أ | Alif | Tidak dilambangkan | Tidak dilambangkan |
| ب | Ba | B | Be |
| ت | Ta | T | Te |
| ث | Ṣa | ṣ | es (dengan titik di atas) |
| ج | Jim | J | Je |
| ح | Ḥa | ḥ | ha (dengan titik di bawah) |
| خ | Kha | Kh | ka dan ha |
| د | Dal | d | De |

| | | | |
|---|--------|----|-----------------------------|
| ذ | Žal | z | Zet (dengan titik di atas) |
| ر | Ra | r | er |
| ز | Zai | z | zet |
| س | Sin | s | es |
| ش | Syin | sy | es dan ye |
| ص | Şad | ş | es (dengan titik di bawah) |
| ض | Đad | đ | de (dengan titik di bawah) |
| ط | Ṭa | ṭ | te (dengan titik di bawah) |
| ظ | Za | z | zet (dengan titik di bawah) |
| ع | `ain | ` | koma terbalik (di atas) |
| غ | Gain | g | ge |
| ف | Fa | f | ef |
| ق | Qaf | q | ki |
| ك | Kaf | k | ka |
| ل | Lam | l | el |
| م | Mim | m | em |
| ن | Nun | n | en |
| و | Wau | w | we |
| ه | Ha | h | ha |
| ء | Hamzah | ‘ | apostrof |
| ي | Ya | y | ye |

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Nama |
|------------|--------|-------------|------|
| َ | Fathah | a | a |
| ِ | Kasrah | i | i |
| ُ | Dammah | u | u |

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Nama |
|------------|----------------|-------------|---------|
| َ..ي | Fathah dan ya | ai | a dan u |
| َ..و | Fathah dan wau | au | a dan u |

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سُوِّلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi Maddah

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Nama |
|------------|-------------------------|-------------|---------------------|
| َ..ا | Fathah dan alif atau ya | ā | a dan garis di atas |
| ِ..ي | Kasrah dan ya | ī | i dan garis di atas |

| | | | |
|------|----------------|---|---------------------|
| وُ.. | Dammah dan wau | ū | u dan garis di atas |
|------|----------------|---|---------------------|

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةَ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu

- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuзу
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya: huruf kapital digunakan untuk

menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan

Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru
jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah rabbil ‘alamin, puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberi taufik, hidayah, dan inayah kepada kita semua selaku insan ciptaan-Nya hingga saat ini dan semoga sampai di kehidupan akhirat nanti. Shalawat serta salam tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW juga keluarganya, sahabat-sahabatnya serta semua orang yang meniti jalannya.

Dengan penuh rasa syukur, berkat rahmat dan karunia-Nya, peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Partisipasi Masyarakat Nahdlatul Ulama Ciamis Dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Di Kabupaten Ciamis Perspektif Teori ‘As{abiyah Ibnu Khaldun (Studi Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2018)” Peneliti menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin terselesaikan tanpa adanya dukungan, bantuan, bimbingan, dan nasihat dari berbagai pihak selama penyusunan skripsi ini. Pada kesempatan ini peneliti menyampaikan terima kasih setulus-tulusnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Ridwan, M. Ag., Rektor Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
2. Dr. Supani, S. Ag., M.A., Dekan Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
3. Dr. H. M. Iqbal Juliansyah Zen., M.H. Wakil Dekan I Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
4. Dr. Marwadi, M.Ag. Wakil Dekan II Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

5. Dr. Hariyanto, S.H.I., M.Hum., M.Pd. Wakil Dekan III Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
6. M. Wildan Humaidi, S.H.I., M.H. Ketua Jurusan Studi Hukum Tata Negara;
7. Fatni Erlina, S.H., M.H. Koordinator Program Studi Hukum Tata Negara
8. Luqman Rico Khashogi, S.H.I., M.S.I. pembimbing, terimakasih untuk semua ilmu, waktu, doa, motivasi dan semangatnya yang selalu memberikan bimbingan serta saran dengan penuh kesabaran, sehingga skripsi ini dapat selesai dengan baik;
9. Segenap Dosen dan Staf Administrasi Fakultas Syari'ah;
10. Segenap Staf Administrasi Perpustakaan Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri purwokerto;
11. Kepada orang tua penulis yang tercinta Ibu Enih Yuhaenih dan Bapak Im Ibrahim, yang selalu memberikan yang terbaiknya untuk saya, doa yang tiada henti-hentinya, serta dukungan baik secara moral maupun materiil sehingga penulis dapat menempuh Pendidikan sampai mendapat gelar Sarjana;
12. Kepada Syifa Azizah Zakaria yang telah menemani proses saya dari awal perkuliahan sampai sekarang. Terimakasih atas semangat, dukungan dan bantuan yang diberikan selama proses perkuliahan hingga menyelesaikan tugas akhir skripsi.
13. Kepada sahabat saya Naufal farhan Gufron, Ervin Haris Sanjaya, Falhan Muntaha, Arul, Yubi yang telah menemani dan mewarnai selama proses perkuliahan saya, terutama kepada Gus Irham Husni Mubarak yang telah membantu dan memotivasi saya dalam proses menyelesaikan skripsi.

14. Teman-teman Hukum Tata Negara angkatan 20 khususnya kelas HTN-B, teman-teman PPL PN Wonosobo dan KKN Desa Petanjungan yang telah membantu dan memberikan dukungan kepada saya.
15. Teman-teman dalam berorganisasi di HMJ HTN 2021-2022, SEMA F Syariah 2023, dan Ikatan Mahasiswa Jawa Barat yang telah memberikan banyak pengalaman kepada saya.
16. Seluruh pihak yang terlibat dalam penyusunan skripsi ini yang tidak bisa disebutkan satu-persatu.

Peneliti mengucapkan banyak terima kasih atas kebaikan-kebaikan yang telah diberikan, mudah-mudahan kebaikan tersebut dibalas oleh Allah SWT. Serta harapan bagi peneliti, semoga penelitian ini dapat menimbulkan manfaat terkhusus bagi peneliti dan para pembaca pada umumnya.

Purwokerto, 2 Juni 2024

Peneliti



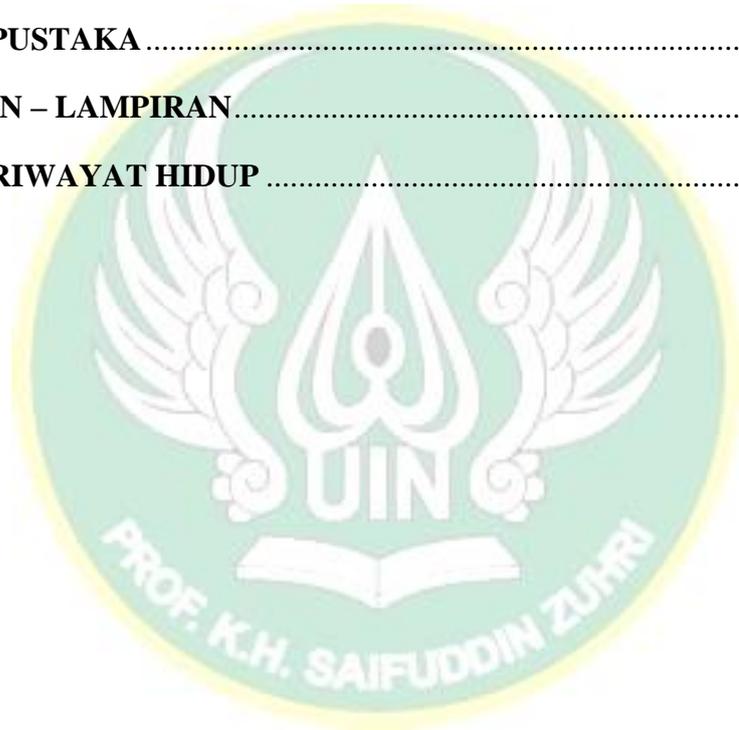
Muhamad Pauzan
NIM. 2017303091

DAFTAR ISI

| | |
|--|-------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| PERNYATAAN KEASLIAN | ii |
| PENGESAHAN | iii |
| NOTA DINAS PEMBIMBING | iv |
| ABSTRAK | v |
| MOTTO | vi |
| PERSEMBAHAN | vii |
| PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN | viii |
| KATA PENGANTAR | xv |
| DAFTAR ISI | xviii |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Definisi Operasional | 11 |
| C. Rumusan Masalah | 12 |
| D. Tujuan Penelitian | 12 |
| E. Manfaat Penelitian | 12 |
| F. Kajian Pustaka | 13 |
| G. Kerangka Teori | 18 |
| H. Sistematika Pembahasan | 19 |
| BAB II TINJAUAN UMUM PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT NU CIAMIS DALAM PELAKSANAAN PILKADA | 21 |
| A. Pemilihan Kepala Daerah | 21 |
| 1. Pemilihan Kepala Daerah Tidak Langsung/Perwakilan | 26 |

| | |
|--|-----------|
| 2. Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung | 29 |
| B. Partisipasi Politik | 31 |
| 1. Pengertian Partisipasi Politik | 31 |
| 2. Bentuk-Bentuk Partisipasi Politik | 34 |
| 3. Faktor Yang Mempengaruhi Partisipasi Politik | 36 |
| C. Nahdlatul Ulama | 40 |
| 1. Realitas masyarakat Nahdlatul Ulama Ciamis | 40 |
| 2. Partisipasi Politik Nahdlatul Ulama | 49 |
| 3. Hubungan NU Dan Politik | 51 |
| D. Teori ' <i>Asabiyyah</i> Ibnu Khaldun | 54 |
| 1. Biografi Ibnu Khaldun | 54 |
| 2. Pengertian ' <i>Asabiyyah</i> | 61 |
| 3. Peran ' <i>Asabiyyah</i> | 64 |
| BAB III METODE PENELITIAN | 66 |
| A. Jenis Penelitian | 66 |
| B. Pendekatan Penelitian | 66 |
| C. Sumber Data Penelitian | 67 |
| D. Subjek dan Objek Penelitian | 67 |
| E. Lokasi Penelitian | 68 |
| F. Metode Pengumpulan Data | 68 |
| G. Metode Analisis Data | 69 |
| BAB IV PARTISIPASI MASYARAKAT NAHDLATUL ULAMA CIAMIS DALAM PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH DI KABUPATEN CIAMIS PERSPEKTIF TEORI '<i>AŞABIYAH</i> IBNU KHALDUN | 70 |

| | |
|---|-----|
| A. Analisis Partisipasi Politik Masyarakat Nahdlatul Ulama Ciamis Dalam Pelaksanaan Pilkada Di Kabupaten Ciamis Tahun 2018..... | 70 |
| B. Tinjauan Perspektif Teori ‘ <i>Aṣabiyah</i> Ibnu Khaldun Terhadap Partisipasi Masyarakat NU Kabupaten Ciamis Dalam Pilkada Kabupaten Ciamis Tahun 2018 | 77 |
| BAB V PENUTUP | 88 |
| A. Kesimpulan | 88 |
| B. Saran..... | 89 |
| DAFTAR PUSTAKA | 91 |
| LAMPIRAN – LAMPIRAN | 96 |
| DAFTAR RIWAYAT HIDUP | 153 |



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Partisipasi politik masyarakat menjadi syarat mutlak yang harus terpenuhi dalam pembangunan negara yang menerapkan sistem demokrasi. Dengan kata lain, keterlibatan aktif dalam urusan politik menjadi elemen krusial dalam kehidupan bernegara.¹ Bagi negara yang mengklaim sebagai negara demokrasi, tingkat partisipasi politik menjadi indikator yang menentukan sejauh mana demokrasi berkembang di dalamnya.

Tingkat kesadaran masyarakat untuk ikut serta dalam aktivitas politik menjadi indikator keberhasilan pelaksanaan demokrasi, baik di tingkat lokal maupun nasional. Kesadaran ini memotivasi partisipasi aktif dalam segala aspek kehidupan politik, yang pada dasarnya mencerminkan perubahan kepentingan publik dalam struktur politik. Khususnya pada saat pemilihan kepala daerah, peran dan posisi rakyat menjadi sangat signifikan dalam proses politik di wilayahnya, dengan memberikan suara secara langsung sebagai ekspresi konkret dari kedaulatan rakyat.

Tahun 2018, secara resmi diakui oleh masyarakat sebagai tahun politik dengan fokus pada Pemilihan Kepala Daerah serentak yang mencakup 171 daerah di seluruh wilayah nusantara. Hal ini memperkuat identitas

¹ Primandha Sukma Nur Wardhani, "Partisipasi politik pemilih pemula dalam pemilihan umum", *Jupiis: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, vol. 10 no. 1, 2018, hlm 58. Diakses dari <https://jurnal.unimed.ac.id/2012/index.php/jupiis/article/view/8407>., pada 2 Oktober 2023.

demokrasi di negara ini.² Tidak dapat dipungkiri bahwa dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) pada tahun politik, setiap sektor dan kelompok masyarakat yang bergerak di bawah naluri politik sangat aktif berdialog dan berdebat mengenai Partai Politik dan figur-figur yang diusung oleh masing-masing partai politik. Keadaan ini bukanlah suatu kejutan, karena berbagai ruang diskusi politik mulai terbentuk, baik di media sosial maupun dalam ruang publik terbuka.

Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten menurut Undang-Undang merupakan proses demokratis yang melibatkan masyarakat dalam memilih kepala daerah seperti Bupati dan Wakil Bupati. Pemilihan Kepala Daerah diatur dalam Undang-Undang, yang mencakup UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan bupati dan walikota menjadi Undang-Undang.

Pemilihan kepala daerah memiliki pengaruh yang sangat besar dalam sistem demokrasi Indonesia. Pemilihan ini merupakan bagian dari proses pemerintahan daerah yang dilaksanakan secara langsung berdasarkan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Pemilihan kepala daerah secara langsung memiliki korelasi yang sangat erat dengan pelaksanaan kedaulatan rakyat, sehingga rakyat dapat menentukan sendiri pemimpin di daerahnya. Seharusnya rakyat adalah subjek yang menentukan, bukan objek yang ditentukan, baik dalam lingkup perpolitikan nasional maupun lokal (daerah).

² Andi Muh Dzul Fadli, dkk, "Kemenangan petahana dalam kontestasi PILKADA serentak 2018: Ditinjau dari perspektif powercube", *Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam*, vol. 14 no. 2, 2018, hlm. 117. Diakses dari <https://jurnal.unimed.ac.id/2012/index.php/jupiiis/article/view/8407>., pada 2 Oktober 2023.

Pemilihan kepala daerah yang benar dan transparan dapat membantu membangun kedaulatan rakyat dan memperkuat demokrasi di Indonesia.

Penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (Pilkada) melibatkan beberapa tahapan, seperti penyerahan dan penelitian syarat dukungan pasangan calon, pendaftaran pasangan calon, penyelesaian sengketa, kampanye, pelaporan dan audit dana kampanye, pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan perhitungan suara, pemungutan dan penghitungan suara, dan rekapitulasi hasil penghitungan suara.

Demikian pula, masyarakat Kabupaten Ciamis, yang merupakan salah satu wilayah yang menyelenggarakan Pemilihan Kepala Daerah serentak pada tahun 2018. Berdasarkan informasi dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Ciamis, sebanyak 721.951 penduduk Ciamis turut serta dalam proses Pilkada pada tahun 2018.³ Terlibat dalam kegiatan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dengan memberikan suara untuk menentukan pemimpin daerah secara demokratis merupakan langkah awal dalam membangun sistem politik di suatu wilayah.

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Ciamis tahun 2018 menjadi objek yang menarik untuk dianalisis sejauh mana partisipasi masyarakat dalam peristiwa politik tersebut. Dalam situasi di mana pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Ciamis hanya diikuti oleh dua pasang calon yang memiliki popularitas seimbang dan tinggi di kalangan masyarakat,

³ SK KPU Tentang hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2018.

keputusan pemilih menjadi pertimbangan yang sangat logis dan kritis. Pasangan calon terdiri dari satu pasangan petahanan, yaitu Bupati dan Wakil Bupati dari periode sebelumnya dan juga pernah menjadi mustasyar NU PC Ciamis, sedangkan satu pasangan lain yang terdiri dari mantan Sekretaris Daerah Kabupaten Ciamis bersama anggota DPRD Kabupaten Ciamis. Dalam situasi seperti ini, diperkirakan akan memberikan dampak pada perilaku pemilih yang cenderung rasional. Apalagi, mengingat kedua calon tersebut didukung oleh partai besar dengan latar belakang Islam, dan mayoritas penduduk Ciamis memiliki keyakinan agama Islam. Hal ini dapat meningkatkan kepekaan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pilkada yang bersifat partisipatif, melibatkan unsur-unsur kepentingan sebagai bagian dari upaya memastikan terpenuhinya harapan dan aspirasi.

Faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pemilihan dapat dipengaruhi oleh faktor keagamaan atau tata kepercayaan yang dianut oleh masyarakat. Di Kabupaten Ciamis, terdapat berbagai kepercayaan yang dianut oleh masyarakat, termasuk Islam, Kristen, Konghucu, dan aliran kepercayaan lainnya. Meskipun variasi kepercayaan ini ada, kepercayaan yang paling mendominasi dan memberikan pengaruh besar terhadap nilai-nilai yang membentuk perilaku masyarakat secara keseluruhan adalah Islam. Hal ini dikarenakan mayoritas masyarakat di Kabupaten Ciamis menganut agama Islam, sehingga berbagai ajaran Islam memiliki keterkaitan dengan

budaya lokal dan mempengaruhi pola perilaku masyarakat.⁴ Seringkali, sistem keagamaan atau kepercayaan yang dianut oleh masyarakat dimanfaatkan untuk menyertakan muatan kepentingan politik, bahkan dijadikan alat untuk meningkatkan partisipasi politik masyarakat.

Disamping itu, sistem agama atau kepercayaan sering kali menciptakan nilai-nilai primordialisme, yang terkadang masih dijadikan sebagai pedoman perilaku di masyarakat Kabupaten Ciamis. Bahkan, dampaknya juga terasa dalam pelaksanaan pemerintahan sebagai suatu keterikatan yang menekankan atau menonjolkan kepentingan berdasarkan latar belakang agama atau kepercayaan, sehingga membentuk loyalitas di kalangan aparatur pemerintahan. Hal serupa terjadi dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2018 di Kabupaten Ciamis, dimana muncul pandangan di masyarakat bahwa calon Bupati dan Wakil Bupati sering kali dikaitkan dengan politik identitas.

Kedua pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati mendapatkan dukungan dari beberapa partai politik. Pasangan calon pertama memperoleh dukungan dari PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Persatuan Pembangunan, dan Partai Hati Nurani Rakyat. Sementara itu, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati kedua didukung oleh Partai

⁴ BPS Jawa Barat, "jumlah penduduk dan agama yang dianut". Diakses dari <https://jabar.bps.go.id/indicator/108/335/1/jumlah-penduduk-dan-agama-yang-dianut.html>, pada 28 September 2023.

Nasional Demokrasi, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Gerakan Indonesia Raya, Partai Demokrat, Partai Amanat Nasional, dan Partai Bulan Bintang.⁵

Terlihat bahwa kedua calon Bupati dan Wakil Bupati mendapat dukungan dari partai berbasis Islam dalam pencalonan mereka. Pasangan calon pertama diperkuat oleh Partai Kebangkitan Bangsa, yang merupakan partai dari kalangan Nahdhiyin, yang mana sebagian besar penduduk Ciamis mempraktikkan ajaran Nahdlatul Ulama (NU). Pernyataan tersebut ditegaskan oleh Ketua PCNU Ciamis yang mengungkapkan bahwa sekitar 960.000 masyarakat Ciamis merupakan anggota NU dari total 1.229.069 penduduk Kabupaten Ciamis.⁶ Calon kedua didukung oleh Partai Amanat Nasional, yang sering diidentifikasi sebagai perwakilan politik dari Muhammadiyah, sebuah organisasi keagamaan yang memiliki pengaruh besar di Indonesia. Namun, hasil perhitungan suara pilkada menunjukkan keadaan sebaliknya, dimana pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati kedua, yang mengalahkan calon petahana dari pasangan pertama yang didukung oleh Partai PKB, yang merupakan partai dari kalangan Nahdhiyin, mayoritas penduduk Ciamis.⁷

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) resmi didirikan pada tanggal 23 Juli 1998 di Jakarta. Secara luas diketahui bahwa PKB berasal dari keberadaan Nahdlatul Ulama (NU), dengan peran utama yang dimainkan oleh

⁵ Keputusan KPU Kabupaten Ciamis. Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Ciamis Tahun 2018.

⁶ Hasil wawancara bersama Bapak Arief Ismail Chowas selaku Ketua PCNU Kab. Ciamis, pada 3 juni 2023.

⁷ Keputusan KPU Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Ciamis Tahun 2018.

Dr. K.H. Abdurrahman Wahid, Lc. (Gus Dur). Kehadiran PKB menciptakan semangat baru di kalangan masyarakat NU untuk melihat masa depan yang lebih optimis, setelah 32 tahun mengalami ketidaksetaraan. PKB menjadi platform partisipatif bagi masyarakat NU untuk mewujudkan cita-cita politik mereka.⁸

Ibnu Khaldun merupakan seorang cendekiawan Islam yang memperluas gagasannya mengenai konsep politik dan negara. Awalnya, pemikirannya berkembang melalui pengamatan langsung terhadap berbagai kondisi dan perubahan politik yang ia temui di berbagai tempat. Dengan menganalisis sejarah sebelumnya serta memadukan pendekatan sosiologis dalam pengamatannya, Ibnu Khaldun memberikan kontribusi signifikan untuk perkembangan ilmu pengetahuan pada masanya. Pemikirannya membuka pandangan baru terhadap pemikiran politik yang tetap relevan hingga saat ini.

Teori *'aşabiyah* adalah contoh nyata dari kecerdasan dan kecermatan Ibnu Khaldun dalam menganalisis isu politik dan negara. *'Aşabiyah* dianggap sebagai kunci lahirnya dan pembentukan kekuatan yang bersifat primitif. Jika elemen *'aşabiyah* pada suatu kelompok atau golongan mengalami penurunan, maka kelompok atau golongan tersebut berpotensi mengalami risiko keruntuhan.

⁸ Yeby Ma'asan Mayrudin dan M. Chairil Akbar, "Pergulatan Politik Identitas Partaipartai Politik Islam: Studi tentang PAN, PKB dan PKS", *Madani Jurnal Politik Dan Sosial Kemasyarakatan*, vol. 11 no. 2, 2019, hlm. 174. Diakses dari <http://e-jurnal.unisda.ac.id/index.php/MADANI/article/view/4812>., pada 2 Oktober 2023.

Ibnu Khaldun menyatakan bahwa manusia, dalam keadaan lemah saat diciptakan, membutuhkan keterikatan dengan sesama. Kekuatan dan kelangsungan hidup manusia terjadi ketika mereka menyatu dalam masyarakat dan membentuk interaksi sosial di dalamnya. Kesadaran akan kelemahan tersebut mendorong manusia untuk berkolaborasi dengan orang lain dalam sistem gotong-royong, dengan tujuan memenuhi kebutuhan hidup mereka.

'Aṣabiyah merupakan perasaan satu kelompok, yang menimbulkan kekuatan kelompok atau solidaritas sosial. Secara etimologi *'aṣabiyah* berasal dari kata *'aṣaba* yang berarti mengikat.⁹ Secara fungsional, *'aṣabiyah* merujuk pada ikatan sosial-budaya yang dapat digunakan untuk mengatur kekuatan kelompok sosial. Ibnu Khaldun menjelaskan bahwa sikap ini muncul secara alami dalam kehidupan manusia karena adanya ikatan darah atau perkauman. *'Aṣabiyah* mencerminkan kasih sayang dan cinta antar manusia terhadap keluarga dan kerabat. Rasa cinta ini menciptakan solidaritas, harga diri, kesetiaan, kerjasama, dan saling bantuan di antara individu terkait keturunan dan kelompok mereka yang Allah ciptakan di dalam hati mereka. Hal ini muncul ketika mereka dihadapkan pada cobaan, menghadapi ancaman musuh, dan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu.

Dalam sejarah peradaban Islam, konsep ini membentuk solidaritas sosial dalam masyarakat Islam, di mana orang saling bekerja sama, mengutamakan kepentingan bersama, dan memenuhi kewajiban terhadap

⁹ Muh Ilham, "Konsep Ashabiyah Dalam Pemikiran Politik Ibnu Khaldun", *Jurnal Politik Profetik*, vol. 04 no. 1, 2016, hlm. 3. Diakses dari <https://journal3.uin-alauddin.ac.id/index.php/jpp/article/view/2733>., pada 2 Oktober 2023.

sesama. Semangat ini menghasilkan harmoni sosial dan memberikan kontribusi besar terhadap kemajuan peradaban manusia. Namun, *'aşabiyah* juga bisa memiliki konotasi negatif, seperti loyalitas dan fanatisme yang tanpa dasar kebenaran. Makna ini tidak diinginkan dalam sistem pemerintahan Islam karena dapat menyebabkan kekacauan dalam nilai-nilai kebenaran yang dijunjung tinggi dalam prinsip-prinsip agama.

Ketangguhan solidaritas dalam kelompok *'aşabiyah* menjadi persyaratan utama bagi pembentukan kelompok atau negara yang besar. Ibnu Khaldun menyatakan bahwa keberadaan *'aşabiyah* ini memiliki peran krusial dalam menentukan ketahanan dan kelangsungan hidup suatu kelompok, golongan, atau bahkan negara.¹⁰ Menurut Ibnu Khaldun, peran *'aşabiyah* dalam sebuah kelompok harus memanfaatkan ciri khasnya, yakni memberikan gambaran yang akurat mengenai keadaan sebenarnya.

Penurunan *'aşabiyah* dalam komunitas sosial sulit dihindari karena fokus pada kepentingan dan kekuasaan, mengabaikan norma-norma etika sosial akibat pergeseran ke arah gaya hidup hedonis di kalangan masyarakat modern. Dampaknya, individualisme menjadi semacam simbol baru dalam komunitas sosial, mengarah pada kehidupan yang lebih individual dan pada akhirnya menyebabkan disintegrasi sosial.

Kelompok dapat tetap utuh apabila setiap anggotanya memiliki tingkat *'aşabiyah* yang tinggi dan kuat terhadap kelompoknya. Namun, jika *'aşabiyah* yang dimiliki oleh anggota kelompok tergolong lemah, kelompok tersebut

¹⁰ Ibnu Khaldun, *Mukaddimah*, terj. Ahmadi Thaha (Jakarta: Wali Pustaka, 2021), hlm 1.

berisiko mengalami keruntuhan atau bahkan diambil alih oleh kelompok lain. Dukungan *'aşabiyah* memainkan peran penting dalam menjaga keberlanjutan kekuatan kelompok, karena kekuatan kelompok bukan semata-mata berasal dari penguasaan, melainkan lebih dipengaruhi oleh tingkat *'aşabiyah* yang dimiliki oleh anggota kelompok tersebut.

Seperti yang terlihat dalam partisipasi masyarakat NU Ciamis, mayoritas dari mereka lebih memilih pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati yang tidak mendapatkan dukungan dari Partai Kebangkitan Bangsa. Hal ini menarik karena Partai Kebangkitan Bangsa sendiri muncul dari inisiatif masyarakat NU untuk terlibat dalam arena politik. Meski demikian, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati yang didukung oleh partai yang sejalan dengan kepentingan masyarakat NU mengalami kekalahan.

Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis tingkat *'aşabiyah* masyarakat NU Ciamis terhadap pelaksanaan pemilihan kepala daerah tahun 2018. Dimana konsep *'aşabiyah* Ibnu Khaldun adalah konsep untuk memperkuat dan menyatukan suatu kelompok untuk tujuan bersama.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian skripsi dengan judul **“PARTISIPASI MASYARAKAT NAHDLATUL ULAMA CIAMIS DALAM PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH DI KABUPATEN CIAMIS PERSPEKTIF TEORI ‘AŞABIYAH IBNU KHALDUN (Studi Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2018)”**.

B. Definisi Operasional

1. Pemilihan Kepala Daerah

pemilihan kepala daerah atau Pilkada adalah pemilihan untuk menentukan kepala daerah. Kemudian, Pilkada yang akan diteliti oleh penulis adalah Pilkada tahun 2018 yang diselenggarakan di Kabupaten Ciamis yang diikuti oleh seluruh masyarakat NU Ciamis yang sudah memiliki hak pilih.

2. *‘Aṣabiyah*

Menurut Muhammad Mahmud Rabie, *‘aṣabiyah* adalah suatu hubungan sosial yang mampu membentuk kesatuan dalam suatu kelompok, tanpa memandang apakah itu dipengaruhi oleh ikatan keluarga atau persekutuan.¹¹ Dalam penelitian ini penulis akan membahas tentang *‘aṣabiyah* masyarakat Nahdlatul Ulama Kabupaten Ciamis terhadap partisipasi politik pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2018.

3. Partisipasi Politik

Herbert McClosky mengemukakan pandangannya mengenai partisipasi politik, mengungkapkan bahwa dalam politik terlibat kegiatan sukarela dari masyarakat masyarakat yang berpartisipasi dalam pemilihan pemimpin, baik secara langsung maupun tidak langsung, serta terlibat

¹¹ Nurul Huda, "Pemikiran Ibnu Khaldun Tentang Ashabiyah", *Publikasi Ilmiah*, vol. 20 no. 01, 2008, hlm. 44. Diakses dari <https://publikasiilmiah.ums.ac.id/xmlui/handle/11617/916>., pada 2 Oktober 2023.

dalam proses pembentukan kebijakan umum.¹² Selanjutnya partisipasi politik yang akan diteliti oleh penulis adalah partisipasi politik dari masyarakat Nahdlatul Ulama Ciamis yang dimana pada tahun 2018 mengalami penurunan dukungan terhadap calon Bupati dan Wakil Bupati yang diusung oleh Partai yang berbasis NU yaitu PKB.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, dapat kita gambarkan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana partisipasi politik masyarakat NU Kabupaten Ciamis pada pemilihan kepala daerah tahun 2018?
2. Bagaimana tinjauan teori *'aşabiyah* Ibnu Khaldun terhadap partisipasi politik masyarakat NU Kabupaten Ciamis pada pemilihan kepala daerah tahun 2018?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui partisipasi politik masyarakat NU Kabupaten Ciamis.
2. Untuk menganalisis tinjauan teori *'aşabiyah* Ibnu Khaldun terhadap partisipasi politik masyarakat NU Kabupaten Ciamis.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Melalui hasil penelitian ini, diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi kemajuan ilmu pengetahuan yang terkait dengan partisipasi politik dan konsep *'aşabiyah* Ibnu Khaldun. Untuk

¹² Azirah, "Partisipasi Politik Pemilih Pemula Dalam Pesata Demokrasi", *Politica*, vol. 6 no. 2, 2019, hlm 89. Diakses dari <https://journal.iainlangsa.ac.id/index.php/politica/article/view/2735>., pada 2 Oktober 2023.

mengetahui pengaruh dari teori *'aşabiyah* Ibnu Khaldun terhadap partisipasi masyarakat Nahdlatul Ulama Kabupaten Ciamis.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan tentang pentingnya konsep *'aşabiyah* Ibnu Khaldun terhadap perkembangan dan keberlangsungan suatu golongan atau kelompok.

F. Kajian Pustaka

Penulis melakukan tinjauan literatur dengan tujuan untuk menemukan perbedaan dan kesamaan antara objek penelitian penulis dengan penelitian-penelitian sebelumnya, sehingga dapat menghindari duplikasi. Berdasarkan telaah literatur yang dilakukan penulis, sudah ada beberapa karya ilmiah berupa skripsi dan penelitian lain yang membahas konsep *'aşabiyah* Ibnu Khaldun. Namun, hingga saat ini, belum ada penelitian yang secara khusus membahas Konsep *'aşabiyah* Ibnu Khaldun dalam konteks partisipasi politik masyarakat NU di Kabupaten Ciamis. Berdasarkan pencarian literatur, penulis menemukan beberapa penelitian sebelumnya yang memiliki hubungan dengan penelitian yang sedang dilakukan, termasuk:

Skripsi yang ditulis oleh Nurhayati Fakultas Ilmu Ushuluddin dan Studi agama Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, dengan judul Konsep *'aşabiyah* Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Di Kota Bandar Lampung (Analisa Pemikiran Ibnu Khaldun).¹³ Permasalahan yang dibahas dalam Skripsi ini berfokus pada konsep *'aşabiyah* untuk menggambarkan dinamika

¹³ Nurhayati, "Konsep Ashabiyah Partai Kebangkitan Bangsa (Pkb) Di Kota Bandar Lampung (Analisa Pemikiran Ibnu Khaldun)", *Skripsi* (Lampung: UIN Raden Intan, 2020).

hubungan antara NU dan PKB di Kota Bandar Lampung. Kesamaan utama dengan penelitian penulis terletak pada penekanan pada konsep pemikiran Ibnu Khaldun mengenai *'aşabiyah* sebagai fokus utama penelitian. Namun, perbedaannya terletak pada lokasi dan subjek penelitian, di mana penelitian penulis difokuskan pada masyarakat NU di Kabupaten Ciamis.

Skripsi yang ditulis Sarmaniah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, dengan judul Relevansi Teori *'aşabiyah* Ibnu Khaldun Dalam Kekuasaan Politik Lokal Banten.¹⁴ Penelitian ini merinci kondisi politik lokal di Banten, menganalisis faktor-faktor yang mendorong dinasti politik, dan mengevaluasi relevansi teori *'aşabiyah* Ibnu Khaldun dalam struktur kekuasaan politik di Banten. Tujuannya adalah untuk memahami situasi politik di Banten, mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dinasti politik, dan menilai relevansi konsep *'aşabiyah* Ibnu Khaldun dalam kekuasaan politik Banten. Penelitian ini menunjukkan bahwa teori *'aşabiyah* Ibnu Khaldun digunakan sebagai sarana untuk mencapai kekuasaan, terutama dalam konteks kekuasaan politik yang dikuasai oleh keluarga Ratu Atut Chosiyah di Banten. Meskipun penelitian ini memiliki fokus yang serupa pada politik lokal dan menggunakan teori yang sama, perbedaannya terletak pada rumusan masalah, di mana penelitian penulis akan mengeksplorasi partisipasi politik masyarakat NU di Kabupaten Ciamis.

Skripsi yang ditulis oleh Syafrizal Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, dengan judul Konsep

¹⁴ Siti Sarmaniah, "Relevansi Teori Ashabiyah Ibn Khaldun Dalam Kekuasaan Politik Lokal Banten", *Skripsi* (Banten: UIN Sultan Maulana Hasanuddin, 2018).

'aşabiyah Ibnu Khaldun Dalam Penguatan Nilai Nasionalisme Di Indonesia'.¹⁵ Fokus dan tujuan penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi sejauh mana ide dan nilai-nilai nasionalisme yang terkandung dalam konsep *'aşabiyah* Ibnu Khaldun, serta relevansi konsep *'aşabiyah* terhadap negara Indonesia. Konsep *'aşabiyah* dianggap sebagai solusi untuk mengatasi tantangan melemahnya nilai nasionalisme di Indonesia. Persamaan penelitian ini terletak pada penggunaan teori *'aşabiyah* Ibnu Khaldun. Namun, perbedaannya terletak pada objek penelitian, di mana penulis meneliti partisipasi politik masyarakat NU di Kabupaten Ciamis.

Skripsi yang ditulis oleh Aufa 'Abdillah Ashofa yang berjudul Akar Konsep Nasionalisme: Teori *'aşabiyah* Ibnu Khaldun Dalam Kitab Muqaddimah.¹⁶ Penelitian yang disusun oleh Aufa 'Abdillah Ashofa membahas *'aşabiyah* dan hubungannya yang erat dengan nasionalisme, karena keduanya berfungsi sebagai pengikat untuk mempertahankan negara. Persamaan antara penelitian Aufa 'Abdillah Ashofa dengan penulis terletak pada penggunaan teori dari pemikiran Ibnu Khaldun, yaitu *'aşabiyah*. Namun, perbedaannya terletak pada objek dan cakupan penelitian, di mana penulis lebih fokus mengeksplorasi *'aşabiyah* di kalangan masyarakat NU di Kabupaten Ciamis.

Skripsi yang ditulis oleh Tri Wahyuni Handayati yang berjudul Pemikiran Ibnu Khaldun Tantang *'aşabiyah* Terhadap masyarakat Modern

¹⁵ Syafrizal, "Konsep *'aşabiyah* ibn khaldun dalam penguatan nilai nasionalisme di Indonesia", *Skripsi* (Medan: UIN Sumatera Utara, 2017).

¹⁶ Aufa 'Abdillah Ashofa, "Akar Konsep Nasionalisme: Teori *'Ashabiyah* Ibn Khaldun Dalam Kitab Muqaddimah", *Skripsi* (Cirebon: IAIN Syekh Nurjati, 2022).

dalam konteks Indonesia.¹⁷ Skripsi yang ditulis oleh Tri Wahyuni Handayati meneliti tentang permasalahan yang terjadi di Indonesia pada zaman modern sekarang karena menurut Tri Wahyuni Handayati *'aşabiyah* masyarakat sekarang tidak sekuat dahulu saat masa-masa memperjuangkan kemerdekaan bagi Indonesia. Persamaan penelitian Tri Wahyuni Handayati dengan penulis adalah pada teori *'aşabiyah* yang digunakan untuk meneliti solidaritas masyarakat yang dirasa semakin menurun. Sedangkan perbedaannya yaitu Tri Wahyuni Handayati lebih meneliti terhadap permasalahan masyarakat modern Indonesia sedangkan penulis meneliti terhadap kurangnya partisipasi masyarakat NU Kabupaten Ciamis terhadap dukungan kepada partai yang berbasis NU.

| No | Judul Referensi | Persamaan dengan skripsi ini | Perbedaan dengan skripsi ini |
|----|--|--|--|
| 1 | Konsep <i>'Aşabiyah</i> Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Di Kota Bandar Lampung | Titik kesamaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis adalah dalam konsep pemikiran Ibnu Khaldun tentang <i>'aşabiyah</i> yang jadi fokus utama dalam | Sedangkan dalam perbedaannya terhadap penelitian penulis adalah lokasi penelitian dan subjek penelitian penulis adalah masyarakat NU Ciamis. |

¹⁷ Tri Wahyuni Handayani, "Pemikiran Ibnu Khaldun Tentang 'ashabiyah Terhadap Masyarakat Modern (Dalam Konteks Indonesia)", *Skripsi* (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2011).

| | | | |
|---|--|---|---|
| | (Analisa Pemikiran Ibnu Khaldun). | penelitian. | |
| 2 | Relevansi Teori 'Aṣabiyah Ibnu Khaldun Dalam Kekuasaan Politik Lokal Banten. | Persamaan dari penelitian ini adalah pada bidang politik lokal dan teori yang digunakan. | Perbedaan penelitian terdapat pada rumusan masalah yang dimana penulis akan meneliti tentang partisipasi politik masyarakat NU Kabupaten Ciamis. |
| 3 | Konsep 'aṣabiyah Ibnu Khaldun Dalam Penguatan Nilai Nasionalis di Indonesia. | persamaan penelitian ini yaitu terdapat pada teori yang digunakan yaitu 'aṣabiyah Ibnu Khaldun. | Perbedaan dari penelitian ini adalah tentang objek penelitian yang dimana penulis meneliti tentang masyarakat NU Kabupaten Ciamis dan partisipasi politiknya. |
| 4 | Akar Konsep Nasionalisme: Teori 'aṣabiyah Ibnu Khaldun Dalam Kitab Muqaddimah. | Persamaannya adalah teori yang digunakan dalam penelitian Menggunakan konsep pemikiran Ibnu Khaldun yaitu | Perbedaannya adalah pada objek penelitian dan ruang lingkup penelitian, yang dimana penelitian penulis lebih mendalami tentang 'aṣabiyah masyarakat NU |

| | | | |
|---|--|--|--|
| | | <i>'aşabiyah.</i> | Kabupaten Ciamis. |
| 5 | Pemikiran Ibnu Khaldun Tentang <i>'Aşabiyah</i> Terhadap masyarakat Modern dalam konteks Indonesia | Persamaannya adalah pada teori <i>'aşabiyah</i> yang digunakan untuk meneliti solidaritas masyarakat yang dirasa semakin menurun | Sedangkan perbedaannya yaitu Tri Wahyuni Handayati lebih meneliti terhadap permasalahan masyarakat modern Indonesia sedangkan penulis meneliti terhadap kurangnya partisipasi masyarakat NU Ciamis terhadap dukungan kepada partai yang berbasis NU. |

G. Kerangka Teori

'Aşabiyah dalam literatur arab memiliki arti yang berbeda-beda. Islam pada umumnya mengutuk *'aşabiyah* sebagai sifat dan keadaan berfikir. Secara tradisional ia dianggap sebagai sikap dukungan buta pada suatu kelompok tanpa melihat keadilan. Kata *'aşabiyah* oleh bangsa arab dikerdilkan karena menunjukkan sikap jahiliah sebelum islam. Ibnu Khaldun tentu saja sepenuhnya menyadari akan arti negatif dari *'aşabiyah*, kemudian Ibnu Khaldun membedakan *'aşabiyah* negatif dan *'aşabiyah* positif yang tidak dapat dipisahkan dari manusia. *'Aşabiyah* dalam arti positif menurut

Ibnu Khaldun adalah kasih sayang yang dirasakan oleh seseorang terhadap saudaranya atau tetangga yang diperlakukan tidak adil.

Khoirudin mengungkapkan bahwa *'aşabiyah* adalah perilaku yang mempengaruhi kekuatan suatu kelompok sosial, menunjukkan adanya ikatan sosial dan budaya, dan dapat memunculkan kesetiaan serta fanatisme terhadap kelompok tersebut.¹⁸ Menurut Ibnu Khaldun, peran agama sangat penting dalam membentuk kesatuan dalam *'aşabiyah*. Semangat persatuan yang muncul melalui peran agama dianggap lebih superior daripada semangat persatuan yang dipicu oleh faktor-faktor lain seperti suku, kebangsaan, keturunan, atau keluarga.

H. Sistematika Pembahasan

Sistematika ini mencakup struktur skripsi yang terdiri dari bab dan sub-bab, disertai dengan uraian materi yang akan dibahas pada setiap bagian berdasarkan penelitian yang telah diformulasikan. Oleh karena itu, dalam penyusunan tulisan ini, disarankan untuk mengikuti struktur penulisan sebagai berikut:

Bab I membahas pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan struktur pembahasan.

Bab II memuat pembahasan tentang teori *'aşabiyah* Ibnu Khaldun dan partisipasi masyarakat Nahdlatul Ulama Ciamis terhadap partisipasi politik pada pilkada 2018.

¹⁸ Khoiruddin, "Analisis Teori Ashabiyah Ibn Khaldun Sebagai Model Pemberdayaan Ekonomi Umat", *Jurnal ASAS*, vol. 8 no. 2, 2016, hlm. 67. Diakses dari <http://www.ejournal.radenintan.ac.id/index.php/asas/article/view/1224>., pada 2 Oktober 2023.

Bab III membahas metode penelitian, mencakup jenis dan pendekatan penelitian, penentuan sumber data, dan teknik pengumpulan data.

Bab IV mengandung analisis penelitian, di mana penulis menjelaskan partisipasi masyarakat NU Kabupaten Ciamis dalam Pelaksanaan Pilkada di Kabupaten Ciamis dengan perspektif Teori *'asabiyah* Ibnu Khaldun.

Bab V berfungsi sebagai penutup, di mana penulis menyimpulkan hasil analisis untuk menjawab inti permasalahan.



BAB II

TINJAUAN UMUM PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT NU CIAMIS DALAM PELAKSANAAN PILKADA

A. Pemilihan Kepala Daerah

Pemilihan umum adalah sarana bagi masyarakat untuk menegakkan hak kedaulatannya. Konsep kedaulatan rakyat menegaskan bahwa masyarakat negara adalah pihak yang memiliki otoritas tertinggi dalam suatu negara, dan merekalah yang menetapkan model serta metode pengelolaan pemerintahan.¹⁹ Hal ini juga berlaku dalam proses pemilihan kepala daerah, yang merupakan realisasi dari prinsip kedaulatan rakyat. Pada dasarnya, tujuan dari pemilihan umum adalah untuk memastikan terjadinya pergantian kekuasaan pemerintah secara teratur dan damai, sesuai dengan mekanisme yang telah diatur dan dijamin oleh konstitusi.

Sebagaimana diungkapkan Samuel Phillips Huntington, bahwa: “Demokrasi merupakan satu-satunya bentuk pemerintahan yang paling baik, walaupun ia sebagai pilihan yang buruk dan sistem pemerintahan yang paling baik, walau ia sebagai pilihan buruk dan sistem pemerintahan yang terburuk yang pernah ada dibelahan dunia”. Dari rakyat, maksudnya bahwa mereka yang duduk sebagai penyelenggara Negara harus terdiri dari seluruh rakyat atau dukungan oleh rakyat. Oleh rakyat, berarti penyelenggaraan Negara atau pemerintah dilakukan sendiri oleh rakyat atau yang mewakili rakyat. Sedangkan untuk rakyat maksudnya pemerintah dijalankan atau berjalan

1. ¹⁹ Fajlurrahman Jurdi, *Pengantar hukum pemilihan umum*, (Jakarta: Kencana, 2018), hlm.

sesuai kehendak rakyat. Artinya memposisikan publik secara aktif publik menjadi kekuatan yang kritis dan responsive.

Publik yang sejati bukanlah kategori pasif melainkan aktif. Publik bukan kerumunan massa yang diam atau sekedar menjadi supporter, akan tetapi publik adalah masyarakat negara yang memiliki kesadaran dirinya, hak-haknya kewajibannya dan tanggung jawabnya serta kepentingannya. Mereka memiliki keberanian menegaskan eksistensi diri, memperjuangkan pemenuhan hak-haknya, dan mendesak agar kepentingan-kepentingannya terakomodasi, melalui prosedur yang demokratis.²⁰ Dalam negara demokrasi dipersyaratkan diselenggarakannya pemilihan umum guna memilih penyelenggara pemerintah. Hal tersebut mengisyaratkan hubungan fundamental bahwa yang dipilih bertanggung jawab penuh kepada pemilih, tidak ada pemerintahan demokratis yang tidak bertanggung jawab kepada rakyat. Ciri demokrasi terdiri atas akuntabilitas, rotasi kekuasaan, dan rekrutmen politik yang terbuka.

Salah satu aspek dan prosedur demokrasi yang terwujud di tingkat daerah adalah pelaksanaan pemilihan kepala daerah. Melalui pemilihan kepala daerah, dilakukan pengakuan atas kedaulatan masyarakat setempat serta penegasan bahwa penentu hasil pemilihan adalah masyarakat daerah tersebut. Pemilihan kepala daerah memiliki tiga fungsi utama dalam menjalankan tata kelola pemerintahan lokal. Pertama, proses tersebut bertujuan untuk memilih kepala daerah yang sesuai dengan aspirasi masyarakat setempat, dengan

²⁰ Muhammad Bahrul Ulum, "Bagaimana demokrasi pemilu?menilai kembali pasal 18 (4) uud 1945konstitusi dan implikasinya terhadappemilu kepala daerah pada ptindonesia", *Jurnal hukum dan peradilan*, vol. 8, no. 2, 2019, hlm. 325.

harapan bahwa mereka dapat memahami dan merealisasikan keinginan masyarakat tersebut. Kedua, melalui pemilihan kepala daerah, diharapkan bahwa penilaian terhadap calon kepala daerah didasarkan pada visi, misi, program, serta karakter dan integritas mereka, yang memiliki dampak penting terhadap kesuksesan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Ketiga, pemilihan kepala daerah merupakan sarana akuntabilitas serta evaluasi dan pengawasan politik secara publik terhadap seorang kepala daerah dan kekuatan politik yang mendukungnya.

Keterkaitan antara pemahaman kedaulatan rakyat dengan pilkada sangat jelas. Pilkada merupakan kegiatan untuk mewujudkan kedaulatan rakyat daerah. Paham kedaulatan rakyat daerah secara asasi mengakui persamaan hak politik, tanpa membedakan agama, suku, ras atau kelas sosial ekonomi. Demikian juga rakyat berdiri sama di depan hukum. Dalam demokrasi tiap individu punya otonomi. Individu merupakan satuan-satuan terkecil dalam masyarakat, yang dalam demokrasi elektoral adalah voter (pemilih). Setiap individu memiliki kebebasan seluas-luasnya menentukan pilihan. Otonomi dan kebebasan individu merupakan modal bagi demokrasi.²¹

Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Gubernur, Bupati, dan Walikota diangkat secara demokratis sebagai pemimpin pemerintahan di tingkat Provinsi, Kabupaten, dan Kota. Hal ini sejalan dengan Amandemen Kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam pembahasan

²¹ Prayudi, Ahmad Budiman, Aryojati Ardipandanto, *Dinamika politik pilkada serentak*, (Jakarta Pusat: Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, 2017), hlm. 2.

mengenai ketentuan pemilihan kepala daerah dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, terdapat minimal dua pandangan yang berbeda. Pendapat pertama menyarankan agar pemilihan kepala daerah dilakukan secara langsung oleh rakyat tanpa melalui sistem perwakilan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Di sisi lain, pendapat kedua menginginkan agar pemilihan kepala daerah tetap dilakukan melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.²²

Makna dari frasa "secara demokratis" ini telah memicu debat yang panjang mengenai pemilihan kepala daerah, termasuk hal apa yang seharusnya termasuk dalam kategori tersebut. Pertanyaan utamanya adalah apakah pemilihan kepala daerah seharusnya dilakukan secara langsung oleh rakyat atau kembali kepada pemilihan melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Debat ini menjadi semakin intens menjelang pengesahan Undang-Undang tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Meskipun Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota telah disahkan, perdebatan tersebut masih berlanjut, dengan usulan untuk mengembalikan pemilihan kepala daerah melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Hal ini berlanjut hingga Presiden mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, di mana pemilihan kepala daerah akhirnya dikembalikan ke pemilihan langsung oleh rakyat.

²² Sofyan Hadi, "Makna Pasal 18 Ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945", *DiH: Jurnal hukum*, vol. 19, no. 1, 2023, hlm. 63.

Mengingat kontroversi tersebut, diperlukan interpretasi dari lembaga yang memiliki kewenangan untuk menafsirkan makna "secara demokratis" tersebut. Dalam konteks ini, lembaga yang memiliki kewenangan tersebut adalah Mahkamah Konstitusi, yang bertugas untuk melakukan pengujian terhadap kesesuaian undang-undang dengan undang-undang dasar.²³

Dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013, latar belakang pemikiran di balik rumusan Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 saat itu adalah untuk menyelaraskan sistem pemilihan kepala daerah dengan perkembangan masyarakat dan kondisi di setiap wilayah terkait. Pembuat undang-undang dapat merumuskan sistem pemilihan yang diinginkan oleh masyarakat dalam proses pemilihan kepala daerah, memberikan pilihan antara sistem perwakilan yang dilakukan oleh DPRD atau pemilihan langsung oleh rakyat. Tujuan utamanya adalah untuk mengikuti dinamika perkembangan bangsa guna menetapkan sistem demokrasi yang diinginkan oleh masyarakat. Ini merupakan suatu kebijakan hukum yang terbuka dari pembuat undang-undang dan juga berkaitan dengan penghormatan dan perlindungan konstitusi terhadap keragaman adat istiadat dan budaya masyarakat di berbagai wilayah yang berbeda. Beberapa wilayah mungkin lebih cenderung untuk menerapkan sistem pemilihan tidak langsung oleh rakyat, sementara yang lain mungkin lebih siap dengan sistem pemilihan langsung oleh rakyat. Kedua sistem, baik

²³ Janedjri M. Gaffar, *Politik Hukum Pemilu*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2012), hlm. 93.

pemilihan langsung maupun pemilihan tidak langsung, dianggap sebagai sistem yang demokratis.²⁴

Menurut keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013, dapat disimpulkan bahwa baik pemilihan langsung oleh rakyat maupun pemilihan tidak langsung dianggap sebagai sistem yang demokratis. Namun, hal ini harus memenuhi syarat bahwa pemilihan tersebut dilaksanakan dengan menerapkan prinsip-prinsip pemilihan umum yang demokratis, yakni: langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

1. Pemilihan Kepala Daerah Tidak Langsung/Perwakilan

Saat pembahasan mengenai rancangan undang-undang tentang pemilihan kepala daerah, yang kemudian dijadikan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, terjadi perubahan signifikan. Perubahan tersebut adalah peralihan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota dari pemilihan langsung oleh rakyat menjadi pemilihan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Konsep perubahan ini muncul setelah dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pemilihan kepala daerah sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Terdapat minimal dua argumen utama yang mendasari ide pemilihan gubernur, bupati, dan walikota oleh DPRD. Pertama, pelaksanaan pemilihan kepala daerah memerlukan anggaran yang besar, baik dari pemerintah melalui penyelenggaraan pemilihan maupun dari

²⁴ Janedjri M. Gaffar, *Politik Hukum Pemilu*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2012), hlm. 94.

pasangan calon.²⁵ Kedua, praktek pemilihan kepala daerah seringkali diwarnai dengan politik uang, mulai dari yang sporadis hingga yang sistematis dan terstruktur, dan upaya untuk menguranginya hanya dapat dilakukan dengan mengubah pemilihan langsung oleh rakyat menjadi pemilihan oleh DPRD.

Sistem perwakilan melalui DPRD memiliki potensi untuk menciptakan mekanisme pemilihan yang teratur, rotasi kekuasaan, transparansi dalam rekrutmen, dan akuntabilitas publik. Ini berarti bahwa secara esensial, demokrasi tidak memiliki masalah yang signifikan. Namun, karena prosedur tidak selalu dilaksanakan secara konsisten dan terbuka, pemilihan kepala daerah melalui DPRD dapat mengalami penyimpangan. Pada saat tersebut, partisipasi masyarakat dalam proses pemilihan kepala daerah hampir diabaikan sepenuhnya.

Pemilihan kepala daerah secara tidak langsung oleh DPRD akan berdampak pada hubungan antara kepala daerah sebagai eksekutif dengan DPRD sebagai legislatif dalam hal *checks and balances*. Dampaknya adalah bagaimana menjaga keseimbangan di antara kedua lembaga tersebut dalam konteks kedudukan legislatif dan kepala daerah yang mendapatkan legitimasi dari pemilih, yang pada dasarnya adalah anggota DPRD.²⁶ Hal ini tentu tidaklah mudah karena menjaga harmoni di antara keduanya dalam mengelola pemerintahan daerah. Salah satu masalah yang

²⁵ Leo Agustino, M Dias Hikmawan, Jonah Silas, "Pilkada, politik biaya tinggi, dan korupsi di Indonesia", *Otoritas: Jurnal ilmu pemerintahan*, vol. 13, no. 1, 2023, hlm. 50

²⁶ Teten Jamaludin, "Pilkada langsung: Kisah sukses dan problematika", *JPW (jurnal politik walisongo)*, vol. 1, no. 1, 2019, hlm. 32.

mempengaruhi hubungan legislatif dengan eksekutif adalah bahwa kepala daerah yang terpilih biasanya berasal dari partai politik yang memiliki mayoritas kursi di DPRD. Karena calon kepala daerah dan anggota DPRD harus berasal dari partai politik, maka mereka membawa tidak hanya kepentingan publik, tetapi juga kepentingan partai politik dan bahkan kepentingan pribadi. DPRD juga tidak selalu mencerminkan kepentingan rakyat secara tepat, melainkan lebih menonjolkan kepentingan partai politik yang mengusungnya. Oleh karena itu, kewenangan kepala daerah seringkali terbatas oleh kepentingan partai politik. Jika kepala daerah terpilih berasal dari partai politik mayoritas, kurangnya kontrol dapat menyebabkan terbentuknya tirani baru dalam pemerintahan daerah dan menyebabkan kelambatan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Pemilihan kepala daerah oleh DPRD akan memperkuat dominasi elit oligarki dan partai atas proses demokrasi. Selain itu, hal ini akan memperburuk praktik politik yang tidak etis di tingkat parlemen lokal. Secara filosofis, pemilihan kepala daerah tidak langsung oleh DPRD menolak arus kemajuan demokratisasi di tingkat lokal. Lebih lanjut, sistem ini tidak mencerminkan kebutuhan dan keinginan masyarakat di daerah yang menjadi tempat kekuasaan kepala daerah. Pemilihan tidak langsung ini juga menimbulkan kesan bahwa kepala daerahnya bukanlah pilihan

dari masyarakat setempat, sehingga legitimasi pemimpin tersebut menjadi lebih lemah daripada jika dipilih langsung oleh rakyat.²⁷

2. Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung

Pemilihan Kepala Daerah secara langsung merupakan sebuah produk kebijakan negara yang menjadi momentum politik besar yang saat ini dinilai dan diharapkan oleh Pemerintah dan seluruh masyarakat bangsa sebagai pilihan dan jalan yang tepat untuk menuju demokrasi lokal. Hal ini seiring dengan salah satu tujuan reformasi, yaitu untuk mewujudkan Indonesia yang lebih demokratis. Hal ini hanya bisa dicapai dengan mengembalikan kedaulatan ke tangan rakyat.

Perkembangan Sistem Pelaksanaan pemilihan kepala daerah merupakan koreksi atas pelaksanaan pemilihan kepala daerah melalui perwakilan rakyat di DPRD berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Koreksi atas sistem pemilihan kepala daerah ini dilakukan dengan diimplementasikannya payung hukum pelaksanaan pemilihan kepala daerah secara langsung, yakni Undang-Undang nomor 32 Tahun 2004.²⁸ Dalam perkembangan selanjutnya, Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 kemudian diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008, selanjutnya diubah lagi dengan Perpu Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota dan Perpu tersebut ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun

²⁷ Anthon Raharusun, "Pilkada dan Penguatan Demokrasi dalam Sistem Kenegaraan Indonesia", *Papua law jurnal*, vol. 2, no. 1, 2017, hlm. 16.

²⁸ Sodikin, *Hukum Pemilu: pemilu sebagai praktek ketatanegaraan*, (Bekasi: Gramata Publishing, 2014), hlm. 185.

2015 Tentang Penetapan Atas Perpu Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang.²⁹

Pemilihan langsung kepala daerah oleh rakyat, yang pertama kali diadakan setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, merupakan langkah yang baik dalam mengatasi stagnasi demokrasi. Sistem pemilihan langsung kepala daerah merupakan solusi yang efektif untuk mengatasi ketidakseimbangan dalam demokrasi. Penetapan pemilihan langsung kepala daerah memberikan landasan dan dampak yang jelas terhadap legitimasi. Kepala daerah membutuhkan legitimasi yang terpisah dari DPRD, oleh karena itu mereka harus dipilih langsung oleh rakyat. Dengan pemilihan ini, kepala daerah memiliki kekuatan yang seimbang dengan DPRD, sehingga mekanisme *checks and balances* akan berjalan dengan baik.

Sejumlah argumen dan asumsi yang mendukung pentingnya pemilihan kepala daerah langsung adalah Pertama, pentingnya pemilihan kepala daerah dalam meningkatkan akuntabilitas elit politik lokal, termasuk kepala daerah. Kedua, pentingnya pemilihan kepala daerah dalam menciptakan stabilitas politik dan efektivitas pemerintahan di tingkat lokal. Ketiga, pemilihan kepala daerah dapat memperkuat dan meningkatkan kualitas seleksi kepemimpinan nasional karena memberikan

²⁹ Aprianus Wilsontrianto, Randy Vallentino Neonbeni, "Sistem pemilihan kepala daerah dan implementasinya dalam undang-undang no 1 tahun 2015 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota", *Jurnal ilmu sosial, politik, dan hukum*, vol. 2, no. 2, 2023, hlm. 159.

peluang yang lebih terbuka bagi munculnya pemimpin-pemimpin nasional yang berasal dari tingkat daerah.³⁰

B. Partisipasi Politik

1. Pengertian Partisipasi Politik

Partisipasi politik merupakan ciri khas modernisasi politik yang dilaksanakan oleh negara berkembang. Di dalam masyarakat yang masih terbelakang, urusan pemerintahan dan politik dianggap sebagai hanya urusan satu golongan elit tertentu. Umumnya para petani, buruh, dan pedagang kecil merupakan golongan penduduk yang kurang menyadari bahwa kebijakan pemerintah bisa mempengaruhi kehidupan mereka. Sebaliknya mereka juga dapat mempengaruhi tindakan-tindakan pemerintah yang berpihak kepadanya dengan kekuatan politik.³¹

Partisipasi politik secara umum adalah kegiatan seseorang atau sekumpulan orang untuk turut terlibat secara aktif di dalam politik yaitu untuk memilih pemimpin bersama-sama secara langsung atau tidak langsung. Kegiatan-kegiatan ini mencakup menentukan pilihan saat pemilu, menghadiri kampanye partai politik, dan menjadi anggota politik atau ormas.

Ada sejumlah definisi yang dikemukakan oleh ilmuwan politik tentang apa yang dimaksud dengan partisipasi politik. Yaitu, Herbert McClosky mengemukakan pandangannya mengenai partisipasi politik,

³⁰ Winengan, "Kebijakan demokratisasi politik lokal: partisipasi pemilih dalam pemilihan kepala daerah langsung", *Jurnal ilmiah sosial dan politik*, vol. 22, no. 1, 2018, hlm. 65.

³¹ Yalvema Miaz, *Partisipasi politik pola perilaku pemilih pemilu masa orde baru dan reformasi*, (Padang: UNP Press, 2012), hlm. 20.

mengungkapkan bahwa dalam politik terlibat kegiatan sukarela dari masyarakat masyarakat yang berpartisipasi dalam pemilihan pemimpin, baik secara langsung maupun tidak langsung, serta terlibat dalam proses pembentukan kebijakan umum.³²

Selanjutnya menurut Samuel P. Huntington dan Joan M. Nelson dalam buku mereka *No Easy Choice*, menyatakan bahwa partisipasi politik adalah Kegiatan masyarakat negara yang bertindak sebagai pribadi-pribadi, yang dimaksud untuk mempengaruhi pembuatan keputusan oleh pemerintah. Partisipasi bisa bersifat individual atau kolektif, terorganisasi atau spontan, mantap atau sporadis, secara damai atau dengan kekerasan, legal atau ilegal, efektif atau tidak efektif.³³

Dari kedua pengertian mengenai partisipasi politik tampak ada beberapa kesamaan dan perbedaan tentang kegiatan yang termasuk di dalamnya. Partisipasi politik merupakan kegiatan masyarakat negara yang berkaitan dengan upaya untuk memilih penguasa dan untuk mempengaruhi proses pembuatan kebijakan. Definisi yang dikemukakan McClosky kegiatan yang termasuk dalam partisipasi politik masih terbatas, hanya terdiri dari kegiatan memilih penguasa, tindakan yang mereka ambil dan kegiatan mempengaruhi kebijakan umum. Definisi Huntington dan Nelson lebih luas lagi. Kedua penjelasan diatas juga menjelaskan mengenai sifat kegiatan atau cara-cara bagaimana kegiatan-kegiatan tersebut dilaksanakan

³² Azirah, "Partisipasi Politik Pemilih Pemula Dalam Pesata Demokrasi", *Politica*, vol. 6 no. 2, 2019, hlm 89.

³³ Yalvema Miaz, *Partisipasi politik pola perilaku pemilih pemilu masa orde baru dan reformasi*, hlm. 22.

dan siapa saja yang dapat melakukan tindakan tersebut; yaitu dapat dilakukan oleh individu atau kelompok dan dilakukan secara spontan atau terorganisasi, damai atau dengan kekerasan, mantap atau sporadis, legal atau ilegal, efektif ataupun tidak efektif.

Partisipasi politik pada penjelesan di atas merupakan perwujudan dari kerangka demokrasi. Kegiatan tersebut dilakukan untuk menunjukkan keabsahan akan kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat. Rakyat sebagai masyarakat negara memilih pemimpin dan pejabat-pejabat yang akan membuat peraturan atau kebijakan yang akan dilaksanakan, mengikat dan harus dipatuhi oleh semua masyarakat negara. Partisipasi dilakukan oleh masyarakat negara yang percaya bahwa kegiatan mereka mempunyai efek atau akan memberikan dampak. Oleh karena itu dalam demokrasi ada anggapan semakin tinggi partisipasi rakyat maka semakin baik. Karena keputusan politik yang dibuat dan dilaksanakan oleh pemerintah mempengaruhi kehidupan masyarakat masyarakat maka masyarakat masyarakat berhak ikut serta menentukan isi keputusan politik.³⁴

Partisipasi politik dapat memainkan peran-peran yang penting di negara demokrasi. Sebagaimana negara demokrasi masyarakat memiliki peranan tertinggi atas kedaulatan negara berada sepenuhnya di tangan rakyat.³⁵ Dalam proses tersebut masyarakat bisa berpartisipasi secara langsung dengan menyalurkan hak pilihnya untuk menentukan pemimpin

³⁴ Ingolfur Blühdorn, Felix Butzlaff, *Democratization beyond the post-democratic turn: towards a research agenda on new conceptions of citizen participation*, DEMOCRATIZATION, vol. 27, no. 3, 2020, hlm. 370.

³⁵ Moh. Mahfud MD, *Demokrasi dan konstitusi di Indonesia*, (Jakarta: rineka cipta, 2000), hlm. 10.

bagi mereka, dengan tata cara pemilihan yang jujur dan adil. Partisipasi politik pada hakikatnya merupakan tindakan yang sukarela, penuh kesadaran tanpa paksaan atau tekanan dari siapapun. Karena itu, pendidikan politik sangat penting untuk masyarakat. Partisipasi politik merupakan prasyarat yang mutlak dalam sebuah sistem politik yang demokratis. Sebuah sistem politik yang baik seharusnya memiliki komunikasi politik sebagai bentuk partisipasi masyarakat.

Pada dasarnya pemerintah dan masyarakat merupakan sekumpulan manusia, yang mana manusia dalam kehidupan bernegara dibagi dua, yakni masyarakat yang memiliki fungsi pemerintahan, dan masyarakat negara biasa yang tidak memiliki fungsi pemerintahan. Akan tetapi masyarakat biasa memiliki hak untuk mempengaruhi orang yang memiliki fungsi pemerintahan. Karena yang menentukan kebijakan untuk masyarakat biasa adalah masyarakat yang menduduki jabatan pada pemerintahan yang sebelumnya telah dipilih untuk menduduki jabatan tersebut. Sesuai dengan arti dari partisipasi politik yang telah dijelaskan diatas mengenai keikutsertaan masyarakat biasa dalam mempengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik.

2. Bentuk-Bentuk Partisipasi Politik

Hal ini menyangkut konseptualisasi tentang partisipasi politik. Konseptualisasi merupakan upaya pembentukan untuk menentukan kriteria suatu fakta masuk pada kriterianya tersebut. Bentuk dari

partisipasi politik pada umumnya dikelompokkan menjadi dua jenis yaitu bentuk konvensional (*convensional*) dan bukan konvensional (*non convensional*).³⁶ Bentuk konvensional partisipasi politik adalah bentuk paling dominan dalam kultur politik sebagai bentuk yang sudah disepakati dan berkaitan erat dengan dengan aktivitas partisipasi politik masyarakat namun bentuk yang bukan konvensional adalah partisipasi politik yang hanya ditentukan oleh rezim yang berkuasa dalam menentukan partai atau pemimpin yang dipilih. Kegiatan partisipasi politik konvensional biasanya dilakukan dengan cara ikut serta dalam pemilihan umum, mengajukan petisi, melakukan kontak tatap muka, menulis surat, dan ikut dalam kegiatan kampanye. Sedangkan kegiatan partisipasi politik bukan konvensional biasanya dilakukan dengan cara memilih kotak kosong, demonstrasi dan mogok kerja.

Bentuk partisipasi politik konvensional merupakan salah satu bentuk partisipasi politik yang sangat menentukan sebuah sistem demokrasi yang stabil. Meskipun partisipasi politik yang dilakukan hanya ikut serta dalam pemilihan umum, itu merupakan bentuk perilaku individu atau kelompok masyarakat untuk berpartisipasi menyampaikan aspirasi politik atau hak politik mereka. Akan tetapi partisipasi politik dalam pemilihan umum bukan hanya sebatan menyalurkan suara saja, lebih jauhnya masyarakat harus ikut andil untuk memberikan saran atau masukan kepada pemerintah

³⁶ Ramlan Subakti, *Memahami Ilmu Politik*, (Jakarta: PT Grasindo, 1999), hlm 132.

atau partai politik agar mereka bisa aktif dalam partisipasi politik bukan hanya aktif sebagai pengawas pemilu.³⁷

Bentuk kedua bukan konvensional sangat bertentangan dengan makna partisipasi itu sendiri karena pada dasarnya partisipasi politik merupakan peran sosial masyarakat yang sangat tahu tentang politik. Dalam bentuk bukan konvensional partisipasi politik masyarakat di kategorisasi tidak jelas. Hal ini tentu dipengaruhi oleh faktor lembaga dan mekanisme penyaluran aspirasi berfungsi atau tidak. Partisipasi dalam bentuk bukan konvensional juga bisa dikatakan partisipasi politik apabila sudah terlembaga bukan individu, seperti aksi demonstrasi yang dilakukan oleh masyarakat dan mogok kerja yang dilakukan oleh kelompok buruh.³⁸

3. Faktor Yang Mempengaruhi Partisipasi Politik

Beberapa faktor yang mempengaruhi partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan umum, faktor-faktor inilah yang nantinya bisa menentukan pemimpin pemerintahan di suatu daerah atau negara. Karena partisipasi pemilih sangat menentukan pemerintahan selanjutnya. Legitimasi yang kuat dari masyarakat dapat membuat kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah menjadi kuat. Masyarakat sebagai pemilih nantinya harus bisa menentukan pemimpin yang tepat untuk menjalankan roda pemerintahan. Maka faktor-faktor inilah yang dinilai dapat mempengaruhi masyarakat dalam memilih. Setidaknya ada 3 faktor yang

³⁷ Rahmawati Halim. Muhlin Lalongan, *Partisipasi politik masyarakat teori dan praktek*, (Makasar: CV sah media, 2016), hlm 72.

³⁸ Rahmawati Halim. Muhlin Lalongan, *Partisipasi politik masyarakat teori dan praktek*, hlm 73.

mempengaruhi masyarakat dalam menentukan pilihan, yaitu; faktor sosiologi, faktor pendekatan partai, dan faktor rasional.

Faktor sosiologi merupakan perilaku mayoritas pemilih dipengaruhi oleh ikatan dan pengaruh sosial seperti status sosio ekonomi, agama, dan tempat di mana mereka tinggal. Partisipasi politik merupakan keterlibatan individu dalam proses pengambilan keputusan politik. Faktor sosial ekonomi memainkan peran penting dalam mempengaruhi tingkat partisipasi politik masyarakat. Individu dengan pendidikan yang lebih tinggi cenderung lebih aktif secara politik. Pendidikan memberikan pengetahuan tentang isu-isu politik, memperkuat keterampilan berbicara, dan meningkatkan kesadaran akan hak-hak dan tanggung jawab masyarakat negara. Oleh karena itu, individu dengan pendidikan yang lebih rendah mungkin kurang aktif dalam proses politik. Kemudian Ketidaksetaraan ekonomi dapat mempengaruhi partisipasi politik. Orang yang merasa terpinggirkan atau tidak memiliki akses ke sumber daya ekonomi mungkin merasa kurang termotivasi untuk berpartisipasi dalam proses politik. Dalam rangka meningkatkan partisipasi politik, penting untuk memahami bagaimana faktor sosial ekonomi mempengaruhi perilaku politik individu. Pemerintah dan lembaga masyarakat harus bekerja sama untuk mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi serta memastikan akses yang lebih merata terhadap pendidikan, informasi, dan layanan publik.

Kemudian yang mempengaruhi pemilih dalam faktor sosiologi adalah agama dan tempat tinggal. Agama mempengaruhi pandangan dan nilai-nilai individu terhadap politik. Beberapa agama mendorong partisipasi aktif dalam proses politik sebagai bagian dari tanggung jawab moral. Sebaliknya, agama lain mungkin menekankan ketidak campuran antara urusan politik dan agama. Pemimpin agama memiliki pengaruh besar dalam membentuk pandangan politik masyarakat. Ketika pemimpin agama aktif dalam mengajak partisipasi politik, masyarakat cenderung mengikutinya. Selain keterlibatan dari pimpinan agama ada juga pengaruh dari keberadaan organisasi keagamaan dapat memotivasi partisipasi politik. Gereja, masjid, atau kuil sering menjadi tempat di mana individu terlibat dalam diskusi politik, kampanye, dan pemilihan. Selanjutnya lingkungan tempat tinggal mempengaruhi partisipasi politik. Di daerah perkotaan, akses ke informasi dan kesempatan untuk berpartisipasi lebih luas. Di pedesaan, faktor seperti jarak, aksesibilitas, dan tradisi lokal memainkan peran.³⁹

Selanjutnya faktor yang mempengaruhi pemilih adalah kedekatan partai. Gagasan utama dari faktor ini adalah keberpihakan, keberpihakan disini merujuk kepada komitmen tinggi atas partainya yang ditunjukkan dengan kesetiaan dan dukungan penuh. Ini berarti pemilih menandakan diri mereka dengan partai politik tertentu dan hal ini mempengaruhi sikap

³⁹ Nurhikmah Hayati, Abdul Rasyid, Zuhriah, Partisipasi Masyarakat pada Pilkada Mandailing Natal Kabupaten di Kecamatan Panyabungan Tahun 2020 (Studi Ilmu Politik Komunikasi), *Konfrontasi Journal: Culture, Economy and Social Changes*, vol. 0, no. 1, 2022, hlm. 103.

dan perilaku mereka. Perubahan dalam sebuah partai dari segi kampanye, manifesto, atau calon yang bertanding, tidak memberi kesan apapun kepada pemilih yang memiliki keberpihakan kuat.

Pendekatan partai ini tidak menolak pengaruh kelompok sosial yang bisa mempengaruhi perilaku pemilih. Malah, mereka melihat kelompok sosial sebagai roda penggerak keberpihakan untuk lebih komitmen terhadap partai demi kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, identifikasi partai muncul sebagai sebuah barometer atau penentu terbaik untuk melihat pilihan pemilih. Meskipun pendekatan partai membantu kesetiaan yang langgeng, tetapi bukan berarti seseorang tidak bisa beralih ke partai lain. Perubahan dalam identifikasi partai terjadi disebabkan oleh faktor-faktor pribadi dan faktor sosial seperti perkawinan, pekerjaan, dan perpindahan tempat tinggal.

Kemudian faktor rasional yang dapat mempengaruhi masyarakat dalam menentukan pilihan. Faktor rasional dapat menjelaskan pertukaran suara dengan politik. Dalam faktor rasional politik dapat dianalogikan wirausaha yang mencari keuntungan.⁴⁰ Sehingga, untuk mencapai tujuan pribadinya, mereka merumuskan apa saja kebijakan yang mereka yakini akan memperoleh suara terbanyak, sama seperti wirausaha yang menghasilkan apapun produk yang mereka yakini akan memperoleh keuntungan terbesar karena alasan yang sama. Dalam faktor rasional proses pemilihan dianggap sebagai sebuah kesepakatan antara pemilih dan

⁴⁰ Haryati Agustina, Ayih Sutarih, "Partisipasi masyarakat dalam pembangunan politik: kajian keterlibatan politik dalam pemilu Indonesia", *Atlantis Press*, vol. 429, hlm. 128.

yang dipilih (calon bupati) untuk saling mendapatkan keuntungan. Pemilih menggunakan suaranya untuk mendapatkan manfaat yang diinginkan, sementara partai politik merancang kebijakan dan program agar dapat memenangkan suara dalam pemilihan umum.⁴¹

C. Nahdlatul Ulama

1. Realitas masyarakat Nahdlatul Ulama Ciamis

a. Letak Geografis Kabupaten Ciamis

Kabupaten Ciamis terletak pada koordinat geografis antara 108°19' hingga 108°43' Bujur Timur dan 7°40'30" hingga 7°41'30" Lintang Selatan. Kecamatan Sukamantri berada di titik paling utara dengan koordinat 7,083 Lintang Selatan, sementara Kecamatan Cihaurbeuti berada di titik paling barat dengan koordinat 108,303 Bujur Timur. Di sisi selatan, Kecamatan Pamarican terletak pada koordinat 7,461 Lintang Selatan, dan Kecamatan Lakkok di timur pada koordinat 108,683 Bujur Timur. Kabupaten Ciamis berbatasan dengan Kabupaten Majalengka dan Kabupaten Kuningan di sebelah utara, Kabupaten Tasikmalaya dan Kota Tasikmalaya di sebelah barat, Kota Banjar dan Provinsi Jawa Tengah di sebelah timur, serta Kabupaten Pangandaran di sebelah selatan. Total luas wilayah Kabupaten Ciamis adalah 1.433 km².

⁴¹ Mahrita Apriyani, Dkk, "Pengaruh Money Politics Culture Terhadap Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Umum", *MUTAKALLIMIN; Jurnal Ilmu Komunikasi*, vol. 5, no. 2, 2022, hlm 137.

b. Kependudukan Masyarakat Nahdlatul Ulama Ciamis

Berdasarkan hasil pengolahan data kependudukan yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis serta Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Ciamis, diperoleh keterangan tentang jumlah penduduk Kabupaten Ciamis pada pertengahan bulan Agustus 2020 tercatat sebanyak 1.257.583 orang. Dari segi komposisi jumlah penduduk, laki-laki sebanyak 613.632 orang dan perempuan sebanyak 597.921 orang, dengan demikian maka jumlah penduduk laki-laki relatif lebih besar dibandingkan dengan jumlah penduduk perempuan.⁴²

Diperkirakan bahwa sekitar 80% dari populasi Muslim di Ciamis adalah anggota atau simpatisan Nahdlatul Ulama. Jumlah masyarakat muslim di Kabupaten Ciamis adalah 1.190.9997 orang. Kemudian untuk jumlah masyarakat NU yang ada di Kabupaten Ciamis sendiri digolongkan menjadi dua kategori. Kategori pertama yaitu jamiyah, yang berkaitan dengan urusan ketaatan dan kepatuhan secara struktural yang terdata di KARTANU itu jumlahnya 450.000 orang. Selanjutnya untuk kategori kedua yaitu kategori amaliyah, yang dimana jumlahnya masyarakat yang menjalankan amaliyah NU itu sebanyak 960.000 orang mengaku masyarakat NU karena mengamalkan amaliyah NU.⁴³

⁴² BPS Kabupaten Ciamis, "jumlah penduduk". Diakses dari <https://ciamiskab.bps.go.id/subject/12/kependudukan.html>, Pada 26 Juni 2024.

⁴³ Hasil wawancara bersama Bapak Arief Ismail Chowas selaku Ketua PCNU Kab. Ciamis, pada 8 juni 2024.

c. Pekerjaan Masyarakat Kabupaten Ciamis

Distribusi pekerjaan di kalangan masyarakat Nahdlatul Ulama di Ciamis mencerminkan karakteristik ekonomi daerah yang agraris dengan dominasi sektor pertanian, diikuti oleh perdagangan dan jasa. Sementara sektor industri dan informal juga memberikan kontribusi meskipun dalam proporsi yang lebih kecil.

Sebagian besar masyarakat NU di Ciamis bekerja di sektor pertanian dan perkebunan. Kabupaten Ciamis dikenal sebagai daerah agraris dengan lahan yang subur dan iklim yang mendukung berbagai jenis tanaman. Komoditas utama yang dihasilkan meliputi padi, jagung, kacang-kacangan, serta tanaman perkebunan seperti kopi, teh, dan karet. Menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Ciamis, sekitar 60% masyarakat di daerah ini bergantung pada sektor pertanian sebagai mata pencaharian utama. Masyarakat NU yang berprofesi sebagai petani umumnya juga terlibat dalam kegiatan-kegiatan keagamaan dan sosial di desanya.⁴⁴

Selain pertanian, perdagangan dan usaha kecil juga menjadi sektor penting bagi masyarakat NU di Ciamis. Banyak masyarakat NU yang terlibat dalam kegiatan perdagangan, mulai dari pedagang pasar tradisional hingga pemilik toko kecil dan usaha rumahan. Produk-produk yang diperdagangkan bervariasi, mulai dari hasil pertanian hingga barang-barang kebutuhan sehari-hari. Keterlibatan dalam sektor

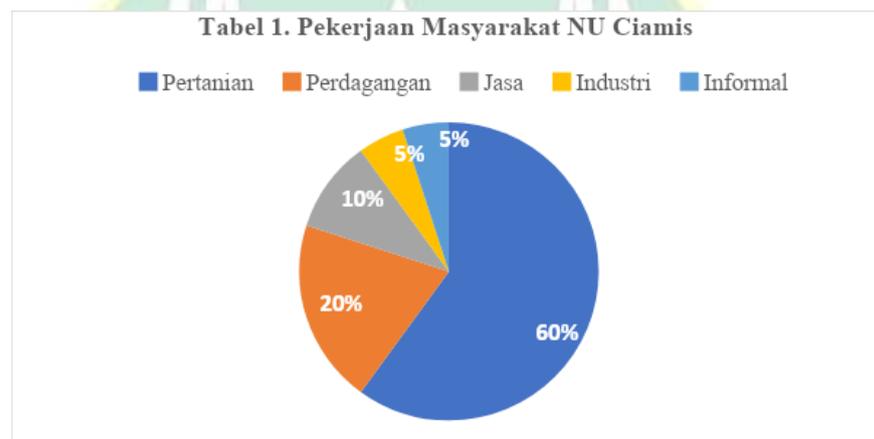
⁴⁴ Hasil wawancara bersama Bapak Arief Ismail Chowas selaku Ketua PCNU Kab. Ciamis, pada 8 juni 2024.

perdagangan ini sering kali dikombinasikan dengan semangat kewirausahaan yang ditanamkan oleh para ulama dan pemimpin NU, yang mendorong anggotanya untuk mandiri secara ekonomi. Diperkirakan sekitar 20% masyarakat NU di Ciamis bekerja di sektor ini.

Sektor jasa juga merupakan sektor yang cukup signifikan di Ciamis, meskipun tidak sebesar sektor pertanian dan perdagangan. Masyarakat NU di Ciamis yang bekerja di sektor jasa mencakup berbagai profesi seperti guru, tenaga kesehatan, pegawai pemerintahan, serta pekerja di bidang transportasi dan pariwisata. Dalam hal pendidikan, banyak anggota NU yang berperan sebagai guru atau tenaga pendidik di madrasah dan sekolah-sekolah yang dikelola oleh NU. Profesi ini sangat dihormati karena pendidikan dianggap sebagai aspek penting dalam pengembangan. Sekitar 10% masyarakat NU di Ciamis bekerja di sektor jasa.

Kabupaten Ciamis juga memiliki sejumlah industri kecil dan pabrik yang memberikan lapangan pekerjaan bagi masyarakat setempat. Industri-industri ini mencakup pengolahan makanan, tekstil, dan kerajinan tangan. Masyarakat NU yang bekerja di sektor industri ini biasanya terlibat dalam produksi barang-barang yang memiliki nilai tambah ekonomi, meskipun skala industrinya relatif kecil dibandingkan dengan kota-kota besar di Indonesia. Sekitar 5% masyarakat NU di Ciamis bekerja di sektor ini.

Selain pekerjaan formal, banyak masyarakat NU di Ciamis yang bekerja di sektor informal. Pekerjaan ini mencakup buruh harian, tukang ojek, pembantu rumah tangga, dan pekerjaan lain yang tidak memiliki pengaturan ketenagakerjaan yang formal. Sektor informal sering menjadi pilihan bagi mereka yang tidak memiliki keterampilan khusus atau akses ke pekerjaan formal. Meski seringkali tidak stabil, pekerjaan di sektor informal memberikan fleksibilitas dan kesempatan untuk mendapatkan penghasilan tambahan. Sekitar 5% masyarakat NU di Ciamis bekerja di sektor informal.



d. Pendidikan Masyarakat Nahdlatul Ulama Ciamis

Pendidikan adalah salah satu aspek penting yang mempengaruhi perkembangan sosial dan ekonomi masyarakat NU di Ciamis. Pendidikan dasar merupakan tingkat pendidikan yang paling umum di kalangan masyarakat NU di Ciamis. Banyak anak-anak NU yang menempuh pendidikan di Sekolah Dasar (SD) atau Madrasah Ibtidaiyah (MI) yang dikelola oleh NU. Diperkirakan sekitar 40% anggota NU memiliki pendidikan terakhir pada tingkat SD/MI.

Pendidikan dasar menjadi pondasi penting bagi masyarakat NU, mengingat banyaknya sekolah-sekolah dasar yang berafiliasi dengan NU.⁴⁵

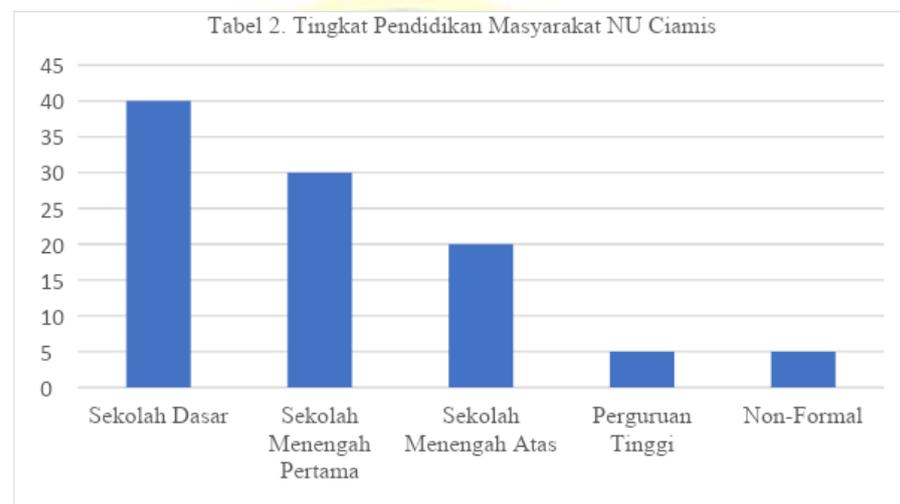
Pendidikan menengah pertama atau Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs) juga banyak diikuti oleh anak-anak anggota NU. Pada tingkat ini, sekitar 30% anggota NU di Ciamis menyelesaikan pendidikan mereka. Banyak madrasah yang menawarkan kurikulum berbasis agama yang kuat, sehingga menarik minat masyarakat NU.

Sekitar 20% anggota NU di Ciamis menyelesaikan pendidikan mereka pada tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) atau Madrasah Aliyah (MA). Sekolah-sekolah ini, baik negeri maupun swasta yang dikelola oleh NU, menawarkan pendidikan yang lebih komprehensif, mempersiapkan siswa untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi atau memasuki dunia kerja.

Tingkat pendidikan tinggi, seperti perguruan tinggi dan universitas, meskipun masih relatif rendah dibandingkan dengan tingkat pendidikan dasar dan menengah, tetap penting bagi perkembangan masyarakat NU. Diperkirakan sekitar 5% masyarakat NU di Ciamis memiliki pendidikan pada jenjang perguruan tinggi. Beberapa lulusan melanjutkan pendidikan di institut atau universitas yang dikelola oleh NU, seperti Universitas Nahdlatul Ulama (UNU).

⁴⁵ Hasil wawancara bersama Bapak Arief Ismail Chowas selaku Ketua PCNU Kab. Ciamis, pada 8 juni 2024.

Pendidikan non-formal juga memainkan peran penting dalam NU di Ciamis. Banyak masyarakat NU yang mengikuti pendidikan di pondok pesantren, yang menawarkan kurikulum berbasis agama dan keterampilan praktis. Pesantren menjadi pusat pendidikan yang penting, terutama bagi mereka yang ingin mendalami ilmu agama. Sekitar 5% masyarakat NU di Ciamis lebih memilih jalur pendidikan non-formal ini.



e. Afiliasi Politik Masyarakat Nahdlatul Ulama Ciamis

Masyarakat Nahdlatul Ulama di Ciamis memiliki afiliasi politik yang beragam. Partai-partai seperti PKB, PPP, PDIP, Gerindra, Golkar, PAN dan PKS mendapatkan dukungan dari masyarakat NU Ciamis. Faktor-faktor seperti sejarah, ideologi, kepemimpinan lokal, dan isu-isu sosial ekonomi memainkan peran penting dalam membentuk afiliasi politik masyarakat NU di Ciamis. Keberagaman ini

mencerminkan dinamika politik yang kompleks dan beragam di kalangan masyarakat NU Ciamis.⁴⁶

PKB adalah partai politik yang secara langsung didirikan oleh tokoh-tokoh NU dan dianggap sebagai representasi politik NU di Indonesia. Di Ciamis, PKB memiliki dukungan yang bisa dikatakan kurang dari masyarakat NU Ciamis. Diperkirakan sekitar 11% masyarakat NU di Ciamis memiliki afiliasi politik dengan PKB. Partai yang sering kali dianggap paling mewakili aspirasi dan nilai-nilai keagamaan serta sosial yang dianut oleh NU malah tidak menjadi dukungan utama oleh masyarakat NU Ciamis.

PPP juga memiliki sejarah panjang dengan organisasi muslim di Indonesia, termasuk NU. Meskipun pengaruhnya tidak sebesar PKB, PPP masih mendapatkan dukungan yang cukup kuat dari masyarakat NU di Ciamis. Diperkirakan sekitar 9% masyarakat NU di Ciamis memiliki afiliasi politik dengan PPP. Partai ini sering kali dipilih karena platform politiknya yang berfokus pada pembangunan berbasis Islam.

PDIP, meskipun bukan partai berbasis agama, telah berhasil menarik dukungan dari berbagai kelompok masyarakat, termasuk NU. Di Ciamis, PDIP mendapatkan dukungan dari sekitar 19% masyarakat NU. Hal ini disebabkan oleh pendekatan inklusif dan program-

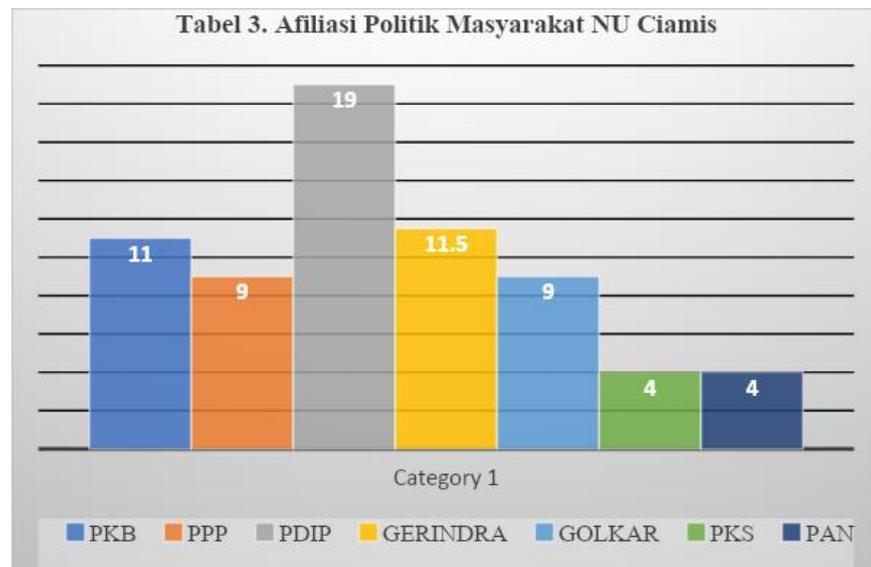
⁴⁶ Hasil wawancara bersama Bapak Arief Ismail Chowas selaku Ketua PCNU Kab. Ciamis, pada 8 juni 2024.

program pro-rakyat yang diusung oleh partai ini, yang sering kali sejalan dengan aspirasi ekonomi dan sosial masyarakat NU.

Diperkirakan sekitar 11,5% anggota NU di Ciamis memiliki afiliasi politik dengan Partai Gerindra. Angka ini mencerminkan dukungan yang relatif signifikan, mengingat NU biasanya lebih dekat dengan partai-partai berbasis agama seperti Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) atau Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Partai Golkar, dengan jaringan dan pengaruhnya yang luas, juga mendapatkan dukungan dari anggota NU di Ciamis. Sekitar 9% masyarakat NU di Ciamis memiliki afiliasi dengan Partai Golkar. Dukungan ini seringkali didasarkan pada hubungan personal dan jaringan politik lokal yang kuat.

PAN dan PKS, meskipun lebih kecil dalam konteks dukungan dari masyarakat NU di Ciamis, tetap memiliki pengikut setia. Diperkirakan sekitar 4% masyarakat NU di Ciamis memiliki afiliasi dengan salah satu dari kedua partai ini. Kedua partai ini sering kali dipilih karena platform mereka yang berfokus pada nilai-nilai Islam dan reformasi.



2. Partisipasi Politik Nahdlatul Ulama

NU sebenarnya pernah secara resmi menjauh dari aktivitas politik praktis melalui kesepakatan dalam muktamar ke-27 di Situbondo tahun 1984. Pada dasarnya, konsepnya adalah untuk kembali kepada prinsip-prinsip awal saat pendiriannya, yaitu Khittah 1926.⁴⁷ Hal ini berarti menjaga jarak dari keterlibatan langsung dalam politik sambil tetap mempertahankan peran sebagai gerakan sosial untuk perubahan. Baik di internal NU maupun di tingkat nasional, NU selalu mengambil sikap kritis terhadap kekuasaan yang otoriter. Pada masa itu, NU sangat dihormati dan memiliki pengaruh yang besar. Para elit NU aktif dalam memberdayakan umat, termasuk dalam upaya memperkuat persatuan lintas komunitas dalam semangat nasionalisme.

Seiring dengan perkembangan politik yang semakin kompleks di Indonesia, peran politik NU juga mengalami peningkatan yang signifikan.

⁴⁷ Soeleiman Fadeli, Mohammad Subhan, *Antologi NU Buku II sejarah- istilah- amaliah-uswah*, (Surabaya: Khalista, 2014), hlm 34.

NU mulai terlibat dalam politik negara, terutama setelah masa kemerdekaan. Keterlibatan ini dipengaruhi oleh gerakan nasionalisme di beberapa negara yang sedang berjuang untuk meraih kemerdekaan. Salah satu kontribusi politik negara yang paling terlihat dari NU adalah dukungan dari Wahid Hasyim, seorang perwakilan NU dalam PPKI, untuk tidak menyertakan beberapa bagian Piagam Jakarta dalam Dasar Negara kita.⁴⁸

Tujuan utama pendirian NU bukanlah untuk mencari kekuasaan politik, melainkan untuk mengembangkan politik keagamaan yang berakar pada prinsip-prinsip demokrasi. Oleh karena itu, bagi umat Islam Indonesia yang menginginkan praktik keagamaan yang sesuai dengan tradisi lokal mereka, kehadiran NU dianggap sebagai bentuk perlindungan. Jika kita mengartikan tindakan ini sebagai politik yang berbasis pada partisipasi rakyat secara luas, maka jenis politik seperti ini dapat dianggap sebagai puncak dari praktek politik NU. Dalam konteks politik kekuasaan, keterlibatan awal NU ditandai oleh dukungannya terhadap pendirian Masyumi. Saat menjadi bagian dari Masyumi, tokoh-tokoh NU terlibat dalam persaingan untuk memperoleh kekuasaan, baik di dalam partai maupun di luar partai (dalam pemerintahan). Periode politik kekuasaan ini berakhir dengan perpecahan dan konflik politik yang tidak menguntungkan. Keterlibatan yang paling signifikan dalam politik

⁴⁸ Asep Saeful, *komunikasi politik Nahdlatul Ulama*, (Jakarta: LP3ES, 2004), hlm. 110.

kekuasaan adalah ketika NU menjadi partai politik pada tahun 1952 setelah berpisah dari Masyumi.⁴⁹

Dalam upaya mewujudkan hal-hal tersebut, kekuasaan bukanlah solusi instan yang harus dikejar. Kekuasaan hanyalah salah satu sarana. Namun, pendekatan kultural dan pendekatan yang mengutamakan hubungan dengan masyarakat dari organisasi NU bisa menjadi alternatif yang efektif dan pada saat yang sama memperkuat kredibilitas NU, meskipun belakangan ini NU terjebak dalam situasi yang sangat sulit dan penting. Di satu sisi, NU berusaha untuk tidak terlibat secara praktis dalam politik, tetapi disisi lain, kecenderungan politik dari para tokoh NU sulit untuk ditekan.⁵⁰ Terlihat bahwa jiwa politik telah menjadi bagian dari budaya NU, sehingga NU tidak bisa sepenuhnya menghindari keterlibatan dalam politik yang menawarkan godaan walaupun hanya untuk sementara. Hal ini sesuai dengan pandangan Asep Saeful Muhtadi yang menyatakan bahwa NU, seperti yang terpaksa, harus terlibat dalam politik untuk menyalurkan semangat politik sebagian umat, elit, dan lembaganya.

3. Hubungan NU Dan Politik

Sebagai organisasi yang telah lama aktif dalam politik Indonesia, NU mempertimbangkan kebutuhan untuk memiliki saluran aspirasi politik bagi anggotanya. Tujuannya adalah untuk mencegah kemungkinan perpecahan internal dalam NU, meskipun sejauh ini, NU telah berhasil

⁴⁹ Masrur Nawawi, *Islam Hujau refleksi keagamaan dan kebangsaan Nahdlatul Ulama*, (Yogyakarta: alQodir press, 2014), hlm. 20.

⁵⁰ Faisal Ismail, *dilema NU di tengah badai pragmatisme politik*, (Jakarta: proyek peningkatan pengkajian kerukunan hidup umat beradama dan diklat keagamaan departemen agama RI, 2004), hlm. 34.

memberikan ruang yang cukup terbuka bagi masyarakatnya untuk menyalurkan aspirasi politik mereka. Politik NU mengutamakan kepentingan nasional daripada kepentingan jangka pendek. Ini bukanlah politik yang sempit, tetapi politik yang memiliki cakupan universal yang sesuai dengan paradigma yang dipegang. Dengan demikian, pendekatan ini tidak melanggar prinsip-prinsip yang dipegang oleh para pendiri NU, dan dapat membantu membangun masyarakat yang berakar pada nilai-nilai Islam serta memiliki semangat nasionalisme dan kepedulian sosial yang tinggi

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) didirikan pada tanggal 23 Juli 1998 di Jakarta. Sudah menjadi pengetahuan umum bahwa PKB lahir dari lingkungan NU dengan peran utama Abdurrahman Wahid (Gus Dur). Pembentukan PKB oleh NU adalah upaya untuk mengatasi dua arus besar yang muncul di NU setelah era Orde Baru. Sebagian anggota ingin NU tetap sebagai organisasi keagamaan, dan sebagian lain ingin terlibat dalam politik Indonesia, sehingga NU memfasilitasi pendirian partai politik seperti PKB untuk mewakili dan mewadahi kepentingan masyarakat NU tanpa mengubah NU menjadi partai politik. Oleh karena itu, hubungan antara NU dan PKB bersifat historis, kultural, dan aspiratif.⁵¹ Hubungan historis menunjukkan bahwa pembentukan PKB terkait erat dengan NU. Hubungan kultural menekankan bahwa PKB harus memperhatikan nilai-nilai budaya yang dianut oleh NU, yaitu budaya yang dipengaruhi oleh

⁵¹ Muh. Hanif Dhakiri, *Pedoman Berpolitik Masyarakat NU*, (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2013), hlm. 48

ajaran keagamaan Islam *Ahlussunnah wal Jama'ah*. Sementara itu, hubungan aspiratif menunjukkan bahwa PKB memiliki kewajiban untuk memperjuangkan cita-cita politik yang dimiliki oleh masyarakat NU.

Kehadiran Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) telah menimbulkan semangat baru di kalangan masyarakat NU untuk melihat masa depan yang lebih optimis setelah mengalami 32 tahun sebagai kelompok yang terpinggirkan.⁵² PKB, yang berasal dari lingkungan NU dan ditujukan untuk kepentingan bangsa Indonesia, diharapkan dapat mengambil contoh dari ajaran Wali Songo dalam upaya membangun tatanan masyarakat yang didasarkan pada nilai-nilai moral dan spiritual yang tinggi.

Tekanan dari para anggota Nahdhiyin untuk membuat Nahdhatul Ulama (NU) mendirikan partai politik sangatlah besar. Banyak di antara mereka yang tidak sabar menunggu pendirian partai yang akan diinisiasi oleh kalangan NU. Namun, merespons tuntutan semacam itu tidaklah mudah bagi NU. Sebagai konsekuensi dari komitmen untuk kembali pada prinsip-prinsip awal yang terwujud dalam khittah 1926, NU adalah sebuah organisasi yang mengutamakan aspek keagamaan dan menghindari keterlibatan langsung dalam politik. Dengan membentuk partai politik, NU seakan melanggar prinsip-prinsip yang dipegang teguh sejak pergerakan kembali ke khittah pada tahun 1984. Namun, menolak tuntutan dari anggota juga berarti menolak realitas yang ada, yang pada akhirnya bisa dianggap sebagai penolakan terhadap kebutuhan dan aspirasi mereka.

⁵² A. Jauhar Fuad, "akar sejarah moderasi islam pada nahdlatul ulama", *tribakti: jurnal pemikiran keislaman*, vol. 31, no. 1, 2020, hlm. 158.

D. Teori *'Aṣabiyah* Ibnu Khaldun

1. Biografi Ibnu Khaldun

Nama asli Ibn Khaldun adalah Abdurrahman bin Muhammad, dengan nama ayahnya adalah Muhammad bin Muhammad, dan kakeknya adalah Khalid bin Usman. Dengan demikian, nama lengkapnya adalah Waliyuddin Abdurrahman ibn Muhammad ibn Muhammad ibn al-Hasan ibn Jabir ibn Muhammad ibn Ibrahim ibn Abdurrahman bin Khalid ibn Usman ibn Hani al-Khattab ibn Kuraib ibn Ma'dikarib ibn Haris ibn al-Wail ibn Hajar.⁵³ Abdurrahman adalah nama kecilnya, sedangkan Zaid adalah panggilan yang diberikan oleh keluarganya, terkait dengan statusnya sebagai anak sulung. Waliyuddin adalah gelar kehormatan yang diberikan oleh raja Mesir saat ia dipilih sebagai ketua pengadilan di Kairo, Mesir. Sebutan "Ibn Khaldun" berasal dari garis keturunan kakeknya, Khalid bin Usman. Khalid bin Usman merupakan orang pertama dari garis keturunannya yang memasuki negara Andalusia bersama pasukan Yaman, dikenal sebagai orang yang berpengaruh terhadap penaklukan Andalusia (yang sekarang dikenal dengan Spanyol), sekaligus orang yang pertama kali menetap di kota Caramona untuk membentuk dan membina keluarganya

Beliau dilahirkan di Tunisia pada tanggal 27 Mei 1332 M dan meninggal pada tanggal 19 Maret 1406 M (25 Ramadhan 808 H), yang

⁵³ Fuad Baali, Ali Wardi, *Ibn Khaldun dan Pola Pikir Islam*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1989), hlm. 76.

berarti ia lahir pada abad ke-14.⁵⁴ Ini merupakan masa ketika Barat sedang mengalami kemajuan dan Islam menghadapi tantangan. Pada saat itu, Islam memasuki periode kegelapan dan Barat mencapai puncak kejayaannya. Ibnu Khaldun menjadi saksi dari pecahnya kekuatan Islam dan munculnya pandangan bahwa pintu ijtihad telah tertutup, menandakan keyakinan pada masa itu bahwa pengetahuan telah mencapai puncaknya dan orang-orang hanya perlu memilih mazhab yang mereka ikuti.

Pendidikan yang diberikan oleh kakeknya kepada Ibnu Khaldun saat kecil sangat dipengaruhi oleh lingkungan yang kental dengan budaya tradisional. Kakeknya adalah salah satu menteri di istana Hafshiyah di Tunisia, dan meskipun ayahnya bukan seorang sarjana, ia memiliki pemahaman yang baik tentang kondisi kehidupan pada masa itu. Ibnu Khaldun telah terlibat dalam pendidikan intelektual sejak kecil, walaupun hanya belajar dari orang tuanya. Namun, pendidikan sesungguhnya Ibnu Khaldun dimulai ketika banyak sarjana yang datang ke tempat kelahirannya yaitu Tunisia.⁵⁵

Pendidikan Ibn Khaldun dimulai dengan ayahnya yang berperan sebagai guru pertamanya. Selanjutnya, ia belajar bahasa dari Abu Abdillah Muhammad Ibnu al-Arabi al-Husairi, Abu al-Abbas Ahmad Ibnu al-Qushar, dan Abu Abdillah al-Wadiyashi. Materi fiqh dipelajarinya dari Abi Abdillah Muhammad al-Jiyani dan Abu al-Qassim Muhammad al-

⁵⁴ Ibnu Khaldun, *Mukaddimah*, terj. Ahmadie Thaha (Jakarta: Wali Pustaka, 2021), hlm. 1214.

⁵⁵ Hafidz Hasyim, *Watak Peradaban Dalam Epistimologi Ibnu Khaldun*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), hlm. 43.

Qashir. Selain itu, Ibn Khaldun juga mengasah pengetahuannya dalam logika, teologi, matematika, dan astronomi dari Abu Abdillah Muhammad Ibnu Ibrahim al-Arabi.

Ibnu Khaldun berasal dari garis keturunan yang berilmu. Dia dibesarkan dalam lingkungan yang kaya akan warisan dari keluarganya, dengan nasib baik, dan tradisi yang menguatkan kecintaannya pada ilmu pengetahuan. Ayahnya juga menjadi guru pertamanya, sementara Ibnu Khaldun diajarkan membaca dan menghafal Alquran, belajar berbagai jenis qira'at, menafsirkan Alquran, serta mempelajari hadits dan fiqh. Ia juga mendapatkan pelajaran tentang tata bahasa dan retorika dari ulama terkemuka di Tunisia. Pada masa itu, pusat pendidikan Islam berada di Afrika Utara, tempat berkumpulnya cendekiawan Andalusia yang terusir karena berbagai peristiwa dan ketidakramahan pemerintah mereka terhadap rakyat.

Ibn Khaldun dikenal sebagai seorang ahli dalam bidang sosiologi, ekonomi, dan politik, serta telah aktif terlibat dalam dunia politik secara langsung. Latar belakang keluarganya yang mencakup politisi, intelektual, dan keturunan aristokrat telah memberikan kontribusi besar terhadap minat dan keterlibatannya dalam bidang-bidang tersebut. Sebelumnya, keluarganya telah menjadi pemimpin politik di Moor Spanyol sebelum akhirnya bermigrasi ke Afrika

Pada usia dua puluh tahun, minat Ibnu Khaldun terhadap politik mulai tumbuh. Pada tahun 755 H/1354 M, karena keahliannya, ia diangkat

menjadi sekretaris Sultan di Maroko oleh Abu Inan. Namun, jabatannya tidak berlangsung lama karena pada tahun 1357 M, Ibnu Khaldun terlibat dalam konspirasi untuk menggulingkan Sultan bersama Amir Abu Abdullah Muhammad. Akibatnya, ia ditangkap dan dipenjarakan, tetapi kemudian dibebaskan. Setelah kematian Sultan dan pengambilalihan kekuasaan oleh al-Mansur bin Sulaiman dan menternya al-Hasan, Ibnu Khaldun bergabung dengan mereka dan diangkat sebagai sekretaris.⁵⁶

Prestasi luar biasa Ibnu Khaldun terjadi ketika ia menjadi sekretaris Abu Salim, yang menggantikan Sultan Abu Inan. Namun, prestasinya tidak berlangsung lama karena pada tahun 762 H/1361 M, terjadi pemberontakan istana. Ibnu Khaldun meninggalkan jabatannya dan pergi ke Andalusia bersama keluarganya. Meskipun pusat politik dan ilmu pengetahuan Islam terletak di Selatan Andalusia, pengaruh politik dan budaya Islam di sana juga memengaruhi orang-orang di Utara Andalusia.

Di Granada, Sultan Mahmud ibn Yusuf dari Bani Ahmar menghormati Ibn Khaldun. Pada tahun 1364, Sultan memberinya tanggung jawab sebagai utusan ke istana Pedro el Cruel, seorang raja Kristen Castilla di Seville, untuk melakukan diplomasi guna mencapai perjanjian damai antara kedua kerajaan.⁵⁷ Kesuksesan misi tersebut tidak hanya menciptakan kesan yang mendalam, tetapi juga menimbulkan rasa cemburu dari Perdana Menteri Ibnu al-Khattib yang merasa popularitasnya

⁵⁶ Ibnu Khaldun, *Mukaddimah*, terj. Ahmadi Thaha (Jakarta: Wali Pustaka, 2021), hlm 1223.

⁵⁷ Ibnu Khaldun, *Mukaddimah*, terj. Ahmadi Thaha (Jakarta: Wali Pustaka, 2021), hlm 1224.

terancam. Walaupun Ibnu Khaldun memiliki tanggung jawab sebagai pejabat negara, ia tetap menjaga komitmennya terhadap ilmu pengetahuan. Di antara kesibukannya, Ibnu Khaldun menyempatkan waktu untuk mengajar di masjid-masjid pemerintahan, sehingga ilmu pengetahuan yang dimilikinya dapat terus berkembang dan dilestarikan.

Dikarenakan kondisi yang tidak mendukung dan karena mendapat undangan dari Abu Abdullah (Penguasa Bouqie) untuk menjadi Perdana Menteri, pada tahun 1365 Ibn Khaldun menerima undangan tersebut. Namun, pada tahun berikutnya, ia pindah ke Konstantin untuk menjadi pembantu Raja Abdul Abbas. Setelah merasa tidak lagi dipercaya untuk jabatan penting, Ibn Khaldun memilih untuk menetap di Biskra. Akhirnya, di sana, ia memutuskan untuk mundur dari panggung politik praktis yang sebelumnya telah meningkatkan reputasinya, dan lebih memilih untuk fokus pada bidang akademiknya.

Ketenangan Ibnu Khaldun dalam bidang ilmu pengetahuan membawa dia untuk meninggalkan dunia politik yang penuh dengan kepalsuan dan persaingan, dan kembali ke landasan akarnya dalam studi ilmiah. Dalam perjalanannya, Ibnu Khaldun memutuskan untuk berpindah ke daerah Banu Ari bersama keluarganya, di mana mereka menemukan kedamaian yang jauh dari intrik politik. Di sana, Ibnu Khaldun merasa ingin menuangkan segala pengalaman hidupnya selama menjabat.⁵⁸ Dari sini, Ibnu Khaldun mengubah arah hidupnya dari aktivitas politik kembali

⁵⁸ Ibnu Khaldun, *Mukaddimah*, terj. Ahmadi Thaha (Jakarta: Wali Pustaka, 2021), hlm 1231.

ke dunia ilmu pengetahuan, dan mulai menyusun karya-karyanya yang terkenal seperti *Muqaddimah*. Selama empat tahun di Banu Ari, Ibnu Khaldun juga menulis karyanya yang monumental, *al-Ibar*. Namun, karena dia merasa perlu referensi tambahan untuk menyelesaikan karyanya, Ibnu Khaldun kemudian pergi ke Tunisia.

Setelah sekian lama Ibnu Khaldun hidup di Tunisia menyelesaikan karyanya dan mengajar ilmu pengetahuan kepada penduduk setempat, Ibnu Khaldun pergi ke Mesir. Ini adalah fase terakhir dalam hidup Ibnu Khaldun, yang dihabiskannya di Mesir selama 24 tahun, dari 1382 hingga 1406 M. Periode ini merupakan masa pengabdian Ibnu Khaldun dalam bidang ilmu pengetahuan dan pengadilan. Ibnu Khaldun tiba di Kairo pada tanggal 6 Januari 1383 M. Pada masa itu, Kairo diperintah oleh dinasti Mamluk. Secara umum, dalam sejarah Islam, dinasti Mamluk dianggap sebagai periode kemakmuran dan kegemilangan dalam ilmu pengetahuan. Mereka berhasil mengembangkan hubungan perdagangan dengan raja-raja Kristen di Eropa. Karena itu, tidak mengherankan jika Ibnu Khaldun terkesan dengan kemajuan peradaban yang telah dicapai oleh dinasti Mamluk.

Sebelum Ibnu Khaldun tiba di Kairo, karyanya yang monumental, *Muqaddimah*, sudah lebih dulu mencapai kota tersebut. Kedatangan Ibnu Khaldun disambut dengan sukacita oleh kalangan akademisi, dan ini menandai awal dari perannya sebagai seorang pendidik di Kairo. Ibnu Khaldun memberikan banyak kuliah di berbagai lembaga pendidikan

Mesir, termasuk Universitas Al-Azhar, Sekolah Tinggi Hukum Qamhiyyah, Sekolah Tinggi Zhahiriyyah, dan Sekolah Tinggi Sharghat Musyiyyah. Selain aktif dalam dunia akademis, Ibnu Khaldun juga terlibat dalam kegiatan reformasi hukum. Pada tanggal 8 Agustus 1384 M, Ibnu Khaldun diangkat sebagai hakim agung Madzhab Maliki di Mahkamah Mesir oleh Sultan Mesir, al-Zhahir Barquq.⁵⁹ Dia menjalankan jabatannya dengan penuh semangat dan memanfaatkannya untuk melakukan reformasi dalam sistem hukum. Ibnu Khaldun berusaha untuk memberantas korupsi dan ketidaksesuaian dalam mahkamah tersebut. Namun, upayanya ini menimbulkan kebencian dan fitnah dari pihak-pihak yang merasa dirugikan. Meskipun fitnah terhadap Ibnu Khaldun tidak dapat dibuktikan, ia memilih untuk mengundurkan diri dari jabatannya demi menjaga kedamaian dan kebaikan pribadinya serta stabilitas kerajaan. Namun, Ibnu Khaldun tetap melanjutkan kegiatan mengajar di perguruan tinggi. Ibnu Khaldun meninggal dunia di Kairo, Mesir, pada tanggal 26 Ramadhan 808 H/16 Maret 1406 M.

Selama hidupnya, Ibnu Khaldun sibuk dengan urusan diplomatik dan politiknya. Dia mengalokasikan waktu untuk belajar, mengajar, dan menulis. Meskipun hidup pada zaman di mana peradaban Islam mengalami ketidakstabilan dan penurunan, Ibnu Khaldun tetap menjadi pemikir Muslim yang kreatif, menghasilkan banyak gagasan besar melalui karyanya. Adapun karya-karya Ibnu Khaldun sebagai berikut: Kitab

⁵⁹ Ibnu Khaldun, *Mukaddimah*, terj. Ahmadi Thaha (Jakarta: Wali Pustaka, 2021), hlm 1233.

Lubaab al-Muhashshal, Kitab Muqoddimah, Kitab Al-Ibar, wa Diwan al-Mubtada' wa al-Khabar, fi Ayyam al-Arab wa al-Ajam wa al-Barbar, wa Man Asharuhum min dzawi as-Shulthoni al-Akbar, Kitab Al-Ta'rif bi Ibnu Khaldun wa Rihlatuhu Syarqon wa Ghorban, kitab Syifa al-Sail fi Tahdzib al-Masa'il.⁶⁰

2. Pengertian *'Aṣabiyah*

Secara etimologi *'aṣabiyah* berasal dari "*ashaba*" yang artinya mengikat. Dalam konteks fungsional, *ashabiyah* merujuk pada jalinan budaya dan sosial yang menjadi indikator kekuatan suatu kelompok.⁶¹ Di samping itu, *'aṣabiyah* juga dapat dianggap sebagai bentuk solidaritas sosial yang menonjolkan kesadaran, kesatuan, dan persatuan dalam sebuah kelompok. Istilah *'aṣabiyah* berasal dari bahasa Arab, yang secara harfiah berarti semangat kelompok atau golongan. Menurut Charles Issawi dalam buku Wendy Melfa, *'aṣabiyah* didefinisikan sebagai dorongan yang mendorong kelompok dan pendukungnya untuk terus maju.

Menurut Ibnu Khaldun, *'aṣabiyah* adalah kefanatikan seseorang terhadap keturunan, keluarga, dan kelompoknya. Perasaan kasih sayang ini adalah bagian alami dari sifat manusia yang diberikan oleh Allah. Dari sifat tersebut, timbul sikap saling mendukung dan membantu antar sesama. Dalam kata-kata lain, *'aṣabiyah* adalah ekspresi kedukaan seseorang atas penderitaan yang dialami oleh anggota keluarganya, terlepas dari bentuk

⁶⁰ Ibnu Khaldun, *Mukaddimah*, terj. Ahmadie Thaha (Jakarta: Wali Pustaka, 2021), hlm 1213.

⁶¹ Osman Raliby, *Ibnu Khaldun tentang masyarakat dan negara*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1978), hlm. 157.

hubungan keluarga yang ada. Ini disebabkan oleh ikatan emosional yang kuat yang terbentuk melalui hubungan darah, yang secara psikologis mendorong kebanyakan orang untuk merasa terhubung secara emosional dengan orang-orang yang mereka sayangi dan hormati.

Asal usul *'aşabiyah* merupakan kecerdikan dari Ibnu Khaldun Mengidentifikasi perkembangan sosial masyarakat pada zaman itu. Penghargaan terhadap hubungan darah, yang merupakan bagian alami dari sifat manusia, kecuali dalam beberapa kasus tertentu. Ikatan ini menciptakan rasa cinta terhadap keluarga dan kerabat seseorang.⁶² Ibnu Khaldun menjelaskan bahwa asal usul *'aşabiyah* berasal dari penghormatan terhadap ikatan darah, yang merupakan bagian alami dari sifat manusia. Ikatan ini menciptakan rasa cinta terhadap keluarga dan kerabat seseorang, mendorong mereka untuk melindungi mereka dari bahaya atau kehancuran. Orang akan merasa malu jika kerabat mereka diperlakukan tidak adil atau diserang, dan mereka akan berusaha untuk melerai konflik dan menghindari ancaman terhadap kerabat mereka. Ini adalah dorongan alami bagi manusia sejak awal keberadaannya di dunia.⁶³

Setelah mengetahui penyebab terbentuknya *'aşabiyah*, kita bisa memahami bahwa *'aşabiyah* tidak hanya berdasarkan pada hubungan keluarga atau rasialisme saja. Ibnu Khaldun memperluas konsep *'aşabiyah* untuk mencakup solidaritas sosial di antara penduduk desa dan kota.

⁶² Osman Raliby, *Ibnu Khaldun tentang masyarakat dan negara*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1978), hlm. 158.

⁶³ Ibnu Khaldun, *Mukaddimah*, terj. Ahmadi Thaha (Jakarta: Wali Pustaka, 2021), hlm 239.

Dalam konteks ini, *'aşabiyah* dapat merujuk pada partai politik, patriotisme, dan nasionalisme. Seperti yang diungkapkan Ibnu Khaldun dalam karyanya *Muqaddimah*, *'aşabiyah* memiliki peran yang sangat penting dalam meraih kemenangan dan menjaga kelangsungan hidup suatu negara, dinasti, atau kerajaan. Tanpa adanya *'aşabiyah* yang kuat, kelangsungan dan eksistensi negara tersebut akan sulit tercapai, dan sebaliknya, negara tersebut akan berisiko mengalami disintegrasi dan kehancuran.

Dalam proses pembentukan *'aşabiyah*, Ibnu Khaldun mengemukakan bahwa agama memiliki peranan yang sangat penting dalam membentuk kesatuan tersebut. Baginya, semangat persatuan yang terbentuk melalui peran agama tidak dapat disaingi oleh semangat persatuan yang dihasilkan dari faktor lainnya. Ini didasarkan pada peran agama dalam meredakan konflik dan perbedaan pandangan di antara masyarakat, sehingga mereka memiliki tujuan bersama untuk memperjuangkan agama mereka.⁶⁴

Jumlah *'aşabiyah* yang lebih besar akan membuat satu kelompok lebih unggul dari yang lain, ia juga menentukan kepemimpinan dalam suatu kelompok tertentu. Pemimpin tidak akan dapat mempertahankan posisi dominannya dalam kelompok ketika *'aşabiyah* tidak lagi ada di sana untuk mendukung dia, tapi jika pemimpin dapat mengontrol *'aşabiyah*

⁶⁴ Ibnu Khaldun, *Muqaddimah*, terj. Ahmadi Thaha (Jakarta: Wali Pustaka, 2021), hlm 277.

dengan kekuatan dan strategi yang cukup baik maka akan berhasil dalam mendirikan dinasti untuk dirinya sendiri dan keluarganya.

3. Peran *'Aṣabiyah*

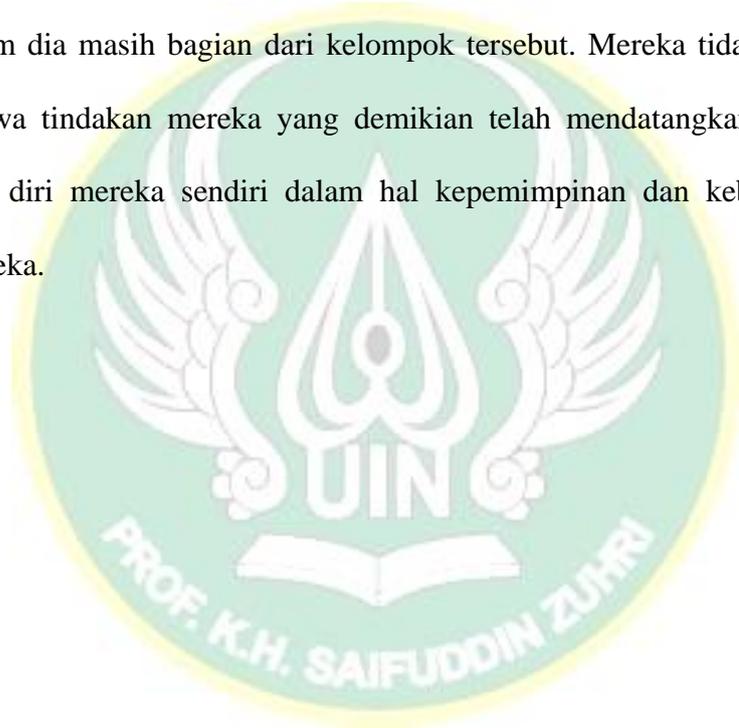
Tujuan akhir *'aṣabiyah* adalah kekuasaan, sebab *'aṣabiyah* memberikan pertahanan diri yang dimungkinkan dalam segala bentuk kegiatan sosial. Sudah seharusnya seseorang yang memiliki *'aṣabiyah* mampu untuk menguasai orang-orang dan kelompoknya.⁶⁵ Ketika seseorang yang memiliki *'aṣabiyah* telah menduduki jabatan sebagai pemimpin maka akan ditaati oleh orang-orang dan ketika dia berkuasa tidak ada orang yang berani membantahnya, tapi jika seorang pemimpin tidak memiliki *'aṣabiyah* maka orang lain tidak akan patuh kepadanya.

Kepemimpinan atas orang yang memiliki *'aṣabiyah* tidak dapat diwariskan kepada mereka yang bukan dari keturunan yang sama. Hal ini dikarenakan kepemimpinan hanya tercapai melalui keunggulan, dan keunggulan hanya terwujud melalui *'aṣabiyah*. Oleh karena itu, kepemimpinan atas masyarakat haruslah menjadi konsekuensi dari *'aṣabiyah* yang lebih superior daripada *'aṣabiyah* yang kurang kuat. Hanya ahli *'aṣabiyah* yang dapat memiliki kemuliaan dan prestise dari buah keturunan. Faedahnya adalah *'aṣabiyah* yang berasal darinya akan menimbulkan rasa kasihan dan saling membantu. Apabila *'aṣabiyah* benar-benar tangguh dan terjaga kemurniannya, maka faedahnya keturunan akan lebih jelas dan lebih efektif. Inilah faedah tambahan memiliki lebih banyak

⁶⁵ Ibnu Khaldun, *Mukaddimah*, terj. Ahmadi Thaha (Jakarta: Wali Pustaka, 2021), hlm 247.

leluhur mulia. Martabat dan kemuliaan kokoh menancap dalam diri orang-orang yang memiliki *'aşabiyah* berkat buah keturunan.

Banyak pemimpin kelompok yang bersemangat sekali ingin mendapatkan garis silsilah keturunan tertentu. Mereka menginginkannya karena orang-orang yang di garis keturunan tersebut memiliki beberapa keunggulan khusus, seperti keberanian, kebangsawanan, dan ketenaran. Mereka pun mendekati kelompok tersebut dan melibatkan diri dengan klaim dia masih bagian dari kelompok tersebut. Mereka tidak menyadari bahwa tindakan mereka yang demikian telah mendatangkan kecurigaan atas diri mereka sendiri dalam hal kepemimpinan dan kebangsawanan mereka.



BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan prosedur untuk melakukan penelitian. Metode penelitian membahas tentang tata cara melakukan penelitian. Tujuan dari metode penelitian adalah untuk menemukan jawaban yang serta dapat dipertanggungjawabkan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

A. Jenis Penelitian

Ditinjau dari judul, penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (field research). Penelitian lapangan merupakan metode untuk menemukan secara khusus dan realitas apa yang tengah terjadi di masyarakat dengan terjun langsung ke lokasi penelitian dengan menjadikan bahan penelitian yang dianalisis untuk menghasilkan suatu kesimpulan.⁶⁶

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang peneliti gunakan pada penelitian ini adalah pendekatan Yuridis Sosiologis. Pendekatan Yuridis Sosiologis adalah penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan secara empiris dengan jalan terjun langsung ke lapangan.⁶⁷ Pendekatan ini dapat memudahkan peneliti untuk mendapatkan informasi yang lengkap mengenai partisipasi masyarakat NU di Kabupaten Ciamis.

⁶⁶ Farida Nugrahani, *Metode penelitian kualitatif* (Solo: Cakra Books, 2014), hlm. 48.

⁶⁷ Bahder Johan Nasution, *Metode penelitian ilmu hukum*, (Bandung: Cv. Mandar Maju, 2008), hlm. 130.

C. Sumber Data Penelitian

1. Sumber Data Primer

Data primer adalah sumber utama yang dapat memberikan informasi langsung kepada peneliti tentang data-data pokok yang dibutuhkan dalam penelitian.⁶⁸ Dalam penelitian ini peneliti mengambil sumber data utama pustaka ialah terjemah buku Mukaddimah Ibnu Khaldun dan melalui wawancara untuk memperoleh data lapangan. Peneliti nanti akan melakukan wawancara kepada masyarakat NU Kabupaten Ciamis yang telah memiliki hak pilih pada pemilihan kepala daerah tahun 2018.

2. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah data bukan merupakan sumber primer dan sifatnya melengkapi data yang diperoleh dari sumber data primer.⁶⁹ Dalam hal ini yang menjadi data sekunder dalam penelitian berupa literatur terkait dengan partisipasi politik masyarakat seperti rujukan hasil karya tulis, jurnal, dan referensi lainnya.

D. Subjek dan Objek Penelitian

Peneliti menggunakan subjek penelitian dalam memperoleh data yaitu masyarakat NU di Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Sedangkan objek penelitiannya adalah partisipasi politik masyarakat NU Kabupaten Ciamis pada pilkada Bupati Kabupaten Ciamis tahun 2018.

⁶⁸ Agus Sunaryo, dkk, *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah IAIN PURWOKERTO*, Purwokerto, 2019, hlm 10.

⁶⁹ Agus Sunaryo, dkk, *Pedoman Penulisan*, hlm 10.

E. Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan bagi penyusunan skripsi ini, penelitian dilakukan di Kabupaten Ciamis. Peneliti memilih lokasi penelitian dengan pertimbangan bahwa lokasi penelitian tersebut relevan dengan masalah yang akan diteliti.

F. Metode Pengumpulan Data

1. Wawancara

Wawancara, yaitu bentuk pengumpulan data secara tanya jawab antara peneliti dan narasumber.⁷⁰ Teknik wawancara yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah random sampling, yaitu teknik pengambilan sampel secara acak dari objek penelitian secara keseluruhan karena dalam objek penelitian yang cakupannya luas atau jumlahnya banyak maka cukup diambil sampel dengan persentase tertentu. Wawancara dilakukan dengan membuat pokok-pokok masalah yang akan diteliti. Pada random sampling tiap unit atau individu mempunyai kesempatan atau probabilitas yang sama untuk menjadi sampel. Jadi, nilai probabilitas tiap individu untuk terpilih sebagai sampel adalah sama. Pengambilan sampel dapat dilakukan dengan undian atau bilangan random.⁷¹ Peneliti melakukan wawancara kepada masyarakat NU di Kabupaten Ciamis yang memiliki hak suara pada pilkada Bupati Ciamis tahun 2018.

⁷⁰ Mamik, *Metodologi Kualitatif* (Sidoarjo: Zifatama PUBLISHER, 2014), hlm 101.

⁷¹ Bambang Sunggono, *Metodelogi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 1998), hlm. 125-126.

2. Dokumentasi

Dokumentasi, yaitu cara untuk mengumpulkan data dengan melihat gambar, dokumentasi atau catatan yang mendukung penelitian ini.⁷²

3. Literasi

Literasi, yaitu metode pengumpulan data secara literasi atau menggunakan sumber data asli melalui buku, jurnal, skripsi.

G. Metode Analisis Data

Setelah semua data terkumpul, data yang diperoleh dari buku maupun lapangan lalu akan dianalisa melalui menggunakan teknik analisa kualitatif. Teknik analisis kualitatif yaitu digambarkan dengan kata-kata atau kalimat, kemudian dipisah-pisahkan menurut kategori untuk diambil suatu kesimpulan.

⁷² Mamik, *Metodologi Kualitatif*, hlm. 108.

BAB IV

**PARTISIPASI MASYARAKAT NAHDLATUL ULAMA CIAMIS DALAM
PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH DI KABUPATEN
CIAMIS PERSPEKTIF TEORI ‘AS{ABIYAH IBNU KHALDUN**

**A. Analisis Partisipasi Politik Masyarakat Nahdlatul Ulama Ciamis Dalam
Pelaksanaan Pilkada Di Kabupaten Ciamis Tahun 2018**

1. Partisipasi Politik Masyarakat Nahdlatul Ulama

Partisipasi secara harfiah berarti keterlibatan, dan dalam konteks politik, ini merujuk pada keterlibatan masyarakat negara dalam proses politik. Keterlibatan ini tidak hanya terbatas pada mendukung keputusan atau kebijakan yang ditetapkan oleh para pemimpin, tetapi juga mencakup ikut serta dalam pemilihan pemimpin, seperti pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, serta pemilihan umum, dan berbagai bentuk partisipasi lainnya.⁷³

partisipasi berarti keterlibatan masyarakat dalam suatu kegiatan, baik dalam bentuk pernyataan maupun tindakan. Lebih lanjut, partisipasi diartikan sebagai keterlibatan masyarakat dalam program-program pembangunan. Secara umum, partisipasi dibedakan menjadi dua jenis: yaitu partisipasi dimobilisasi yang dimana partisipasi dimobilisasi terjadi karena pengaruh dari pihak lain. Dan partisipasi yang didasarkan pada kesadaran dan kemauan sendiri..

⁷³ Azirah, “Partisipasi Politik Pemilih Pemula Dalam Pesata Demokrasi”, *Politica*, vol. 6 no. 2, 2019, hlm 89.

Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak di Kabupaten Ciamis pada tanggal 27 Juni 2018 merupakan bentuk partisipasi politik, di mana masyarakat memilih dan menyalurkan suara untuk menentukan pemimpin daerah melalui pemilihan yang demokratis. Pilkada ini menjadi tolok ukur dalam membangun sistem politik bangsa dan negara. Pilkada Kabupaten Ciamis tahun 2018 menarik untuk dianalisis guna melihat sejauh mana tingkat partisipasi masyarakat dalam peristiwa politik tersebut. Pilkada ini diikuti oleh dua pasangan calon yang memiliki tingkat popularitas yang seimbang di masyarakat, sehingga hasilnya mencerminkan pertimbangan rasional dan kritis dari masyarakat. Peristiwa ini juga memberikan catatan penting mengenai perkembangan demokrasi di Kabupaten Ciamis, khususnya dalam membangun kehidupan demokrasi di masyarakat.

Salah satu pasangan calon dalam Pilkada 2018 adalah incumbent, yaitu pasangan Bupati dan Wakil Bupati dari periode sebelumnya, sedangkan pasangan lainnya adalah mantan Sekretaris Daerah Kabupaten Ciamis yang berpasangan dengan anggota DPRD Kabupaten Ciamis. Kondisi ini mempengaruhi terbentuknya perilaku pemilih rasional. Pilkada 2018 tidak hanya dilihat sebagai proses mencoblos kertas suara atau menyalurkan aspirasi, tetapi juga mencerminkan kepekaan masyarakat dalam berpartisipasi. Partisipasi dalam Pilkada memiliki berbagai bentuk dan kepentingan, yang berfungsi sebagai sarana untuk mewujudkan harapan dan keinginan masyarakat.

Kedua pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati mendapatkan dukungan dari beberapa partai politik. Pasangan calon pertama memperoleh dukungan dari PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Persatuan Pembangunan, dan Partai Hati Nurani Rakyat. Sementara itu, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati kedua didukung oleh Partai Nasional Demokrasi, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Gerakan Indonesia Raya, Partai Demokrat, Partai Amanat Nasional, dan Partai Bulan Bintang.⁷⁴

Terlihat bahwa kedua calon Bupati dan Wakil Bupati mendapat dukungan dari partai berbasis Islam dalam pencalonan mereka. Pasangan calon pertama diperkuat oleh Partai Kebangkitan Bangsa, yang merupakan partai dari kalangan Nahdhiyin, yang mana sebagian besar penduduk Ciamis mempraktikkan ajaran Nahdlatul Ulama (NU). Pernyataan tersebut ditegaskan oleh Ketua PCNU Ciamis yang mengungkapkan bahwa sekitar 960.000 masyarakat Ciamis merupakan anggota NU dari total 1.229.069 penduduk Kabupaten Ciamis.⁷⁵ Calon kedua didukung oleh Partai Amanat Nasional, yang sering diidentifikasi sebagai perwakilan politik dari Muhammadiyah, sebuah organisasi keagamaan yang memiliki pengaruh besar di Indonesia. Namun, hasil perhitungan suara PILKADA menunjukkan keadaan sebaliknya, dimana pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati kedua, yang mengalahkan calon petahana dari pasangan

⁷⁴ Keputusan KPU Kabupaten Ciamis. Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Ciamis Tahun 2018.

⁷⁵ Hasil wawancara bersama Bapak Arief Ismail Chowas selaku Ketua PCNU Kab. Ciamis, pada 3 juni 2023.

pertama yang didukung oleh Partai PKB, yang merupakan partai dari kalangan Nahdhiyin, mayoritas penduduk Ciamis.⁷⁶

Dilihat dari data diatas menunjukkan bahwa masyarakat NU Ciamis yang merupakan mayoritas masyarakat muslim Ciamis tidak banyak yang mendukung pasangan calon yang diusung oleh PKB. Ini menunjukkan bahwa masyarakat Nahdlatul Ulama di Ciamis memiliki afiliasi politik yang beragam. Tidak hanya berafiliasi dengan PKB, akan tetapi Partai-partai lain seperti PPP, PDIP, Gerindra, Golkar, PAN dan PKS mendapatkan dukungan dari masyarakat NU Ciamis. Faktor-faktor seperti sejarah, ideologi, kepemimpinan lokal, dan isu-isu sosial ekonomi memainkan peran penting dalam membentuk afiliasi politik masyarakat NU di Ciamis. Keberagaman ini mencerminkan dinamika politik yang kompleks dan beragam di kalangan masyarakat NU Ciamis.⁷⁷

2. Bentuk Partisipasi Politik Masyarakat Nahdlatul Ulama Ciamis

Bentuk-bentuk partisipasi politik masyarakat mencerminkan keberagaman cara di mana individu dan kelompok dapat terlibat dalam proses politik. Mulai dari pemilihan umum hingga keterlibatan dalam organisasi masyarakat sipil, partisipasi politik memungkinkan masyarakat untuk mengekspresikan pandangan mereka, mempengaruhi kebijakan, dan berkontribusi pada pembangunan demokrasi yang lebih inklusif dan responsif. Partisipasi aktif dari masyarakat adalah kunci untuk memastikan

⁷⁶ Keputusan KPU Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Ciamis Tahun 2018.

⁷⁷ Hasil wawancara bersama Bapak Arief Ismail Chowas selaku Ketua PCNU Kab. Ciamis, pada 8 juni 2024.

bahwa pemerintahan tetap akuntabel dan responsif terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakatnya.

Bentuk dari partisipasi politik pada umumnya dikelompokkan menjadi dua jenis yaitu bentuk konvensional (*convensional*) dan bukan konvensional (*non convensional*). Bentuk konvensional partisipasi politik adalah bentuk paling dominan dalam kultur politik sebagai bentuk yang sudah disepakati dan berkaitan erat dengan dengan aktivitas partisipasi politik masyarakat, namun bentuk yang bukan konvensional adalah partisipasi politik yang hanya ditentukan oleh rezim yang berkuasa dalam menentukan partai atau pemimpin yang dipilih. Kegiatan partisipasi politik konvensional biasanya dilakukan dengan cara ikut serta dalam pemilihan umum, mengajukan petisi, melakukan kontak tatap muka, menulis surat, dan ikut dalam kegiatan kampanye. Sedangkan kegiatan partisipasi politik bukan konvensional biasanya dilakukan dengan cara memilih kotak kosong, demonstrasi dan mogok kerja.⁷⁸

Partisipasi politik merupakan bagian integral dari proses demokrasi yang memungkinkan masyarakat negara untuk berkontribusi dalam pengambilan keputusan yang memengaruhi kehidupan mereka. Pada Pilkada 2018, masyarakat Nahdlatul Ulama (NU) di Kabupaten Ciamis menunjukkan bentuk partisipasi politik konvensional yang mencerminkan komitmen mereka terhadap demokrasi dan kesejahteraan sosial.

⁷⁸ Ramlan Subakti, *Memahami Ilmu Politik*, (Jakarta: PT Grasindo, 1999), hlm 132.

Bentuk partisipasi paling mendasar dan langsung adalah memberikan suara dalam pemilihan. Pada Pilkada 2018, masyarakat NU di Ciamis aktif berpartisipasi dalam proses pemungutan suara. Partisipasi ini menunjukkan kesadaran politik yang tinggi dan tanggung jawab sebagai masyarakat negara untuk memilih pemimpin yang dianggap mampu mewakili aspirasi mereka. Masyarakat NU, baik yang berada di desa maupun di kota, berbondong-bondong menuju Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk menyalurkan hak pilih mereka. Tingginya tingkat partisipasi ini mencerminkan kepercayaan masyarakat NU terhadap pentingnya peran mereka dalam menentukan arah kepemimpinan daerah. Pernyataan tersebut diperkuat berdasarkan informasi dari hasil wawancara dengan masyarakat NU di beberapa wilayah Kabupaten Ciamis, yang secara umum menyatakan bahwa mereka ikut serta ikut serta dalam pemilihan hanya karena menunaikan kewajiban sebagai masyarakat negara.

Selain memberikan suara, masyarakat NU di Ciamis juga terlibat dalam kegiatan kampanye dan sosialisasi. Kampanye ini tidak hanya dilakukan oleh individu tetapi juga oleh kelompok-kelompok masyarakat di daerah. Mereka terlibat aktif dalam menyebarkan informasi tentang calon yang mereka dukung, baik melalui pertemuan tatap muka, pengajian, maupun distribusi materi kampanye seperti selebaran dan poster. Kampanye ini sering kali dilakukan dengan cara yang khas, seperti melalui pengajian atau acara keagamaan lainnya, di mana pesan-pesan politik disampaikan dalam konteks nilai-nilai keagamaan dan kebajikan.

Sosialisasi yang dilakukan oleh tokoh agama membantu masyarakat memahami program dan visi-misi calon, serta mendorong partisipasi yang lebih luas dalam pemilihan.

Sebagian besar masyarakat Ciamis cenderung lebih nyaman dengan partisipasi politik yang bersifat konvensional. Mereka lebih memilih untuk berpartisipasi dengan memberikan suara pada hari pemilihan tanpa terlibat dalam aktivitas politik lainnya. Bentuk partisipasi ini dianggap sebagai cara yang paling sederhana untuk menjalankan hak dan kewajiban sebagai masyarakat negara. Perilaku politik masyarakat Ciamis yang tidak melakukan partisipasi non-konvensional pada Pilkada 2018 mencerminkan berbagai faktor yang mempengaruhi partisipasi politik di daerah tersebut sehingga ketergantungan pada partisipasi konvensional,

Minimnya kesadaran politik juga menjadi faktor yang menyebabkan masyarakat Ciamis enggan terlibat dalam partisipasi non-konvensional. Banyak dari mereka yang merasa bahwa politik adalah urusan yang jauh dari kehidupan sehari-hari mereka. Keterbatasan informasi dan pendidikan politik juga berkontribusi terhadap sikap apatis ini. Budaya dan tradisi lokal juga memainkan peran penting dalam membentuk perilaku politik masyarakat. Di Ciamis, budaya kolektivisme dan kepatuhan terhadap otoritas sering kali membuat masyarakat cenderung mengikuti arahan tokoh masyarakat atau pemimpin lokal tanpa banyak mempertanyakan.

B. Tinjauan Perspektif Teori ‘*Aṣabiyah* Ibnu Khaldun Terhadap Partisipasi Masyarakat NU Kabupaten Ciamis Dalam Pilkada Kabupaten Ciamis Tahun 2018

Teori ‘*Aṣabiyah* yang dikemukakan oleh Ibnu Khaldun memberikan perspektif yang menarik untuk memahami partisipasi politik masyarakat Nahdlatul Ulama (NU) di Kabupaten Ciamis dalam Pilkada 2018. ‘*Aṣabiyah*, yang sering diterjemahkan sebagai solidaritas sosial atau hubungan antar kelompok, ‘*Aṣabiyah* adalah konsep yang menjelaskan bagaimana ikatan sosial yang kuat dalam suatu kelompok dapat mempengaruhi dinamika politik dan kekuasaan. Dalam konteks Pilkada Ciamis tahun 2018, teori ini dapat digunakan untuk menganalisis bagaimana solidaritas sosial di kalangan masyarakat NU mempengaruhi partisipasi politik mereka.⁷⁹

Di Kabupaten Ciamis, NU merupakan organisasi keagamaan yang memiliki ikatan sosial yang sangat kuat di antara anggotanya. NU tidak hanya berfungsi sebagai wadah keagamaan, tetapi juga sebagai komunitas sosial yang memperkuat ikatan antar anggotanya melalui berbagai kegiatan keagamaan, pendidikan, dan sosial. Solidaritas yang kuat ini mencerminkan konsep ‘*Aṣabiyah* Ibnu Khaldun, di mana anggota NU saling mendukung dan bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama, termasuk dalam konteks politik.

Partisipasi politik masyarakat NU di Ciamis dipengaruhi oleh faktor-faktor yang saling berkaitan. faktor-faktor inilah yang nantinya akan menentukan pemimpin pemerintahan di kabupaten Ciamis. Karena partisipasi

⁷⁹ Ibnu Khaldun, *Mukaddimah*, terj. Ahmadi Thaha (Jakarta: Wali Pustaka, 2021), hlm 1213.

pemilih sangat menentukan pemerintahan selanjutnya dikarenakan Legitimasi yang kuat dari masyarakat dapat membuat kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah menjadi kuat. Masyarakat sebagai pemilih nantinya harus bisa menentukan pemimpin yang tepat untuk menjalankan roda pemerintahan. Maka faktor-faktor inilah yang dinilai dapat mempengaruhi masyarakat NU dalam menentukan pilihan. Setidaknya ada 3 faktor yang mempengaruhi masyarakat dalam menentukan pilihan, yaitu; faktor sosiologi, faktor pendekatan partai, dan faktor rasional.⁸⁰

1. Faktor Sosiologi

Faktor sosiologi merupakan perilaku mayoritas pemilih dipengaruhi oleh ikatan dan pengaruh sosial seperti status sosio ekonomi, agama, dan tempat di mana mereka tinggal. Faktor sosial ekonomi memainkan peran penting dalam mempengaruhi tingkat partisipasi politik masyarakat. Keberagaman kondisi sosial masyarakat NU di Kabupaten Ciamis mencerminkan keberagaman status sosial yang ada. Secara umum, sebagian besar masyarakatnya adalah petani, yang seringkali memiliki keterbatasan akses terhadap informasi yang seimbang. Hal ini menyebabkan mereka cenderung menerima informasi tanpa melakukan verifikasi lebih lanjut

Sebagian besar masyarakat NU tidak mendapatkan informasi yang lengkap mengenai politik dan pemilu yang jujur dan adil, sehingga mereka sering kali dimanfaatkan sebagai kelompok pemilih yang rentan terhadap

⁸⁰ Rahmawati Halim. Muhlin Lalongan, *Partisipasi politik masyarakat teori dan praktek*, (Makasar: CV sah media, 2016), hlm 72

politik uang. Kondisi ekonomi masyarakat yang mayoritas adalah petani membuat mereka cenderung lemah dalam hal politik praktis dan sering kali mengambil tindakan yang berorientasi pada keuntungan ekonomi jangka pendek tanpa mempertimbangkan program-program jangka panjang dari pasangan calon.

Hal ini sebagaimana dari keterangan yang disampaikan oleh masyarakat NU yang berprofesi sebagai petani, menyatakan sebagai berikut :

Ada kecenderungan sosial kalau soal itu mah, dalam menentukan pilihan, kalo yang kalangan atas itu cenderung memilih paslon yang dekat dengan mereka, tapi kalo yang kebawah mah ya tergantung yang ngasih aja, soalnya kalo kalangan bawah gak terlalu memperhatikan juga sih.⁸¹

Bila melihat pada hasil wawancara tersebut, dapat diperoleh suatu gambaran terkait dengan partisipasi masyarakat NU dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2018 yang menunjukkan kecenderungan pemilih menurut tingkat ekonominya.

Selain alasan sosio ekonomi, partisipasi politik masyarakat NU di Ciamis juga dipengaruhi oleh tokoh agama. Kiai dan ustadz di lingkungan masyarakat NU memiliki peran yang sangat penting dalam memberikan arahan dan panduan kepada masyarakat. Pengaruh mereka didasarkan pada kepercayaan dan penghormatan yang tinggi dari para jamaah. Dalam

⁸¹ Hasil wawancara bersama Bapak Didu selaku masyarakat NU Kab. Ciamis, pada 9 juni 2024.

konteks Pilkada, seruan dan dukungan dari para tokoh agama ini dapat menjadi faktor penentu dalam mobilisasi massa untuk mendukung calon tertentu.

Tokoh-tokoh agama dalam NU memiliki pengaruh besar dalam membentuk sikap dan perilaku politik masyarakat NU. Kharisma dan otoritas moral mereka memperkuat ikatan sosial dan mendorong partisipasi aktif. Dukungan dan arahan dari tokoh agama sering kali diikuti oleh masyarakat di lingkungannya, yang mencerminkan kepatuhan terhadap pemimpin yang menjadi ciri khas *'Aṣabiyah*.

Ikatan sosial yang kuat memungkinkan tokoh agama untuk memobilisasi masyarakat secara efektif. Pada Pilkada 2018, bisa dikatakan berhasil mengorganisir dan menggerakkan massa untuk berpartisipasi dalam pemilihan. Mobilisasi ini dilakukan melalui jaringan masjid, pesantren, dan pengajian, di mana pesan-pesan politik disampaikan dan dukungan terhadap calon tertentu dikoordinasikan. Efektivitas mobilisasi ini mencerminkan kekuatan *'Aṣabiyah* dalam menggerakkan anggota kelompok untuk berpartisipasi dalam aktivitas kolektif.

Hal ini sesuai dengan keterangan yang disampaikan oleh masyarakat NU yang sering mengikuti pengajian, yang secara umum memberikan jawaban senada, yaitu :

Aya pengaruh dari tokoh agama, tapi secara tidak langsung tapi sedikit sedikit anu menjerumusna kadinya, kan sok aya kumpulan kaditu kumpulan kadieu otomatis nya ceramah na mah agama tapi

*angger we esinamah ujung ujung na di titah milih kadinya jadi aya.*⁸²

Disamping itu, dilakukan wawancara juga dengan masyarakat NU yang lain, diperoleh penjelasan yang secara garis besarnya menyatakan sebagai berikut :

*Dulu salah satu calon pernah ada yang datang kesini pas acara muludan.*⁸³

Bila melihat pada uraian tersebut, menunjukkan bahwa mobilisasi dari tokoh agama dan pengajian terbukti efektif untuk menarik simpatisan masyarakat untuk berbondong-bondong memilih salah satu calon bupati.

Partisipasi politik masyarakat NU di Kabupaten Ciamis juga sangat dipengaruhi oleh tempat tinggal. Aksesibilitas informasi, tingkat pendidikan, keterhubungan sosial, ketersediaan sarana dan prasarana, semuanya memainkan peran penting dalam menentukan tingkat partisipasi politik. Masyarakat yang tinggal di daerah perkotaan cenderung memiliki partisipasi politik yang lebih tinggi karena akses yang lebih baik terhadap informasi, pendidikan, dan infrastruktur. Sebaliknya, masyarakat pedesaan menghadapi berbagai tantangan yang dapat menghambat partisipasi politik mereka. Namun, solidaritas sosial yang kuat dan pengaruh tokoh agama tetap menjadi faktor penting dalam memobilisasi partisipasi politik di semua wilayah.

⁸² Hasil wawancara bersama Ibu Oom selaku masyarakat NU Kab. Ciamis, pada 13 juni 2024.

⁸³ Hasil wawancara bersama Bapak Hendra selaku masyarakat NU Kab. Ciamis, pada 14 juni 2024.

Solidaritas masyarakat NU Ciamis yang berada di wilayah bagian utara memiliki ikatan solidaritas yang sangat kuat dibandingkan dengan masyarakat NU yang berada di sekitaran pusat kota Ciamis. alasan yang mendasari solidaritas yang kuat dari wilayah Ciamis bagian utara adalah salah satu calon bupati yaitu Bapak Herdiat merupakan orang asli dari daerah Ciamis Utara yang menyebabkan *'Aṣabiyah* yang kuat pada masyarakat Ciamis Utara Untuk memilih beliau.

Selanjutnya atas dasar hal itu, dilakukan studi wawancara dengan beberapa masyarakat NU Ciamis yang bertempat tinggal di daerah Ciamis Utara, yang secara umum memberikan jawaban menyatakan sebagai berikut :

Hampir 90 persen lah milih Pak herdiat jadi nya berpengaruh pisan lah eta mah, nya pedah orang ciamis asli we kitu komo ieu mah deket ti Kawali jadi nya masih keneh, nya da piraku we gening cenah urang urang anu da kecamatan teh kalah milih orang luar.⁸⁴

Dari penjelasan tersebut, menunjukkan bahwa tempat tinggal atau daerah asal dari calon bupati mempunyai kekuatan besar untuk menggerakkan *'Aṣabiyah* di daerah tersebut. Hampir seluruh masyarakat NU yang berada di daerah sekitaran Kawali (daerah asal Bapak Herdiat) memberikan dukungan dan suaranya kepada pak Herdiat.

⁸⁴ Hasil wawancara bersama Bapak Maman selaku masyarakat NU Kab. Ciamis, pada 13 juni 2024.

Tingkat *'Aṣabiyah* masyarakat Ciamis Utara yang lebih terfokus kepada suku atau asal calon pemimpin yang akan memimpin dan mengabaikan faktor-faktor lain dalam menentukan pilihan. Ini menjelaskan dukungan yang membuta dari masyarakat NU Ciamis Utara. Akan tetapi hal serupa juga dirasakan oleh sebagian masyarakat NU di Kabupaten Ciamis yang menginginkan pemimpin yang berasal dari daerah asli Ciamis. Yang dimana pasangan calon Herdiat Sunarya dan Yana D Putra merupakan putra asli Ciamis, berbeda dengan Ing Syam Arifin dan Oih Burhanudin yang merupakan orang luar Ciamis.

2. Faktor Pendekatan Partai Politik

Pendekatan partai politik memainkan peran penting dalam menentukan tingkat partisipasi politik masyarakat NU di Kabupaten Ciamis. Strategi komunikasi yang efektif, keterlibatan dalam kegiatan sosial dan keagamaan, program yang pro-masyarakat, kaderisasi, penggunaan teknologi dan media sosial, serta konsolidasi dan aliansi politik semuanya berkontribusi terhadap partisipasi politik yang tinggi. Partai politik yang mampu memahami dan merespons kebutuhan serta aspirasi masyarakat NU dengan tepat akan lebih berhasil dalam menarik dukungan dan partisipasi aktif dari konstituen mereka.

Seperti yang sudah dijelaskan bahwa banyak partai politik yang berafiliasi dengan masyarakat NU. Partai politik yang sangat dominan adalah PDIP yang memiliki persentase 19% jarak yang cukup jauh dengan PKB yang hanya memiliki persentase 11%. Dominasi dari PDIP

disebabkan oleh pendekatan inklusif dan program-program pro-rakyat yang diusung oleh partai ini, yang sering kali sejalan dengan aspirasi ekonomi dan sosial masyarakat NU Ciamis. Akan tetapi dominasi PDIP hanya untuk pemilihan legislatif, sedangkan untuk pemilihan eksekutif atau pemilihan kepala daerah calon yang diusung PDIP mengalami kekalahan.

Pada pilkada 2018 calon bupati dan wakil bupati Ciamis yang merupakan incumbent Bapak Iing Syam Arifin yang berpasangan dengan bapak Oih Burhanudin diusung oleh PDIP, PKB, Golkar, PPP, dan Hanura mengalami kekalahan telak oleh calon bupati dan wakil bupati bapak Herdiat Sunarya yang berpasangan dengan Yana D Putra diusung oleh partai Nasional Demokrasi, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Gerakan Indonesia Raya, Partai Demokrat, Partai Amanat Nasional, dan Partai Bulan Bintang.⁸⁵ Kemenangan telak diraih oleh pasangan Herdiat Sunarya dan Yana D Putra dengan keunggulan di 24 Kecamatan dari jumlah 27 Kecamatan yang ada di Kabupaten Ciamis.

3. Faktor Rasional

Faktor rasional dapat menjelaskan pertukaran suara dengan politik. Dalam faktor rasional politik dapat dianalogikan wirausaha yang mencari keuntungan. Sehingga, untuk mencapai tujuan pribadinya, mereka merumuskan apa saja kebijakan yang mereka yakini akan memperoleh suara terbanyak, sama seperti wirausaha yang menghasilkan apapun

⁸⁵ Keputusan KPU Kabupaten Ciamis. Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Ciamis Tahun 2018.

produk yang mereka yakini akan memperoleh keuntungan terbesar karena alasan yang sama.⁸⁶

Dalam faktor rasional proses pemilihan dianggap sebagai sebuah kesepakatan antara pemilih dan yang dipilih (calon bupati) untuk saling mendapatkan keuntungan. Pemilih menggunakan suaranya untuk mendapatkan manfaat yang diinginkan, sementara calon bupati merancang kebijakan dan program agar dapat memenangkan suara dalam pemilihan umum.⁸⁷

Salah satu cara calon bupati untuk mendapatkan dukungan yang banyak dari masyarakat NU Ciamis adalah dengan memberikan janji-janji yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Walaupun pada realitanya banyak masyarakat yang tidak merasakan sepenuhnya janji-janji yang disampaikan oleh calon bupati pada saat berkampanye. Akan tetapi janji-janji yang disampaikan oleh calon bupati sangat mendorong masyarakat NU untuk memberikan suaranya pada calon tersebut.

Hal ini sebagaimana menurut hasil wawancara dengan masyarakat NU yang berada di sekitaran Kota Ciamis yang menyatakan sebagai berikut :

Ya, dari janji-janji itu ada yang dilaksanakan, ada yang tidak, tapi sekarang ada sebagian yang sudah direalisasikan. Janji-janji itu juga berpengaruh pada pilihan saya di pemilihan sebelumnya

⁸⁶ Haryati Agustina, Ayih Sutarih, "Partisipasi masyarakat dalam pembangunan politik: kajian keterlibatan politik dalam pemilu Indonesia", *Atlantis Press*, vol. 429, hlm. 128.

⁸⁷ Mahrita Apriyani, Dkk, "Pengaruh Money Politics Culture Terhadap Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Umum", *MUTAKALLIMIN; Jurnal Ilmu Komunikasi*, vol. 5, no. 2, 2022, hlm 137.

*karena calon juga dilihat dari janji-janji mereka, meskipun tidak semuanya terealisasi sekarang. Karena pemilihan sudah hampir selesai, masih ada yang belum direalisasikan.*⁸⁸

Dari uraian tersebut, memberikan suatu gambaran bahwa masyarakat NU yang berada di sekitaran Kota lebih berfikir rasional dengan melihat janji-janji yang disampaikan oleh calon bupati. Janji-janji tersebut adalah sebuah produk yang ditawarkan oleh calon bupati kepada masyarakat agar memberikan dukungan kepadanya.

Selain dari janji-janji yang disampaikan oleh calon bupati ada hal lain yang mendorong masyarakat dalam menentukan pilihan, yaitu, hampir seluruh masyarakat NU Ciamis merasakan ketidakpuasan mereka terhadap pemimpin sebelumnya yaitu bapak Iing Syam Arifin yang merupakan calon bupati pada pilkada 2018. Sebagaimana dari hasil wawancara dengan masyarakat NU Ciamis yang memberikan pernyataan sebagai berikut :

*Saya kira, pertama, ada banyak isu yang mengatakan bahwa Pak Iing terlibat korupsi. Kedua, rekam jejak Herdiat bagus karena ia pernah menjabat sebagai Sekda dan mendapatkan penghargaan. Jadi, selain rekam jejak kerjanya yang baik, masyarakat juga ingin perubahan dengan memilih yang baru karena mereka merasa kinerja sebelumnya kurang memuaskan.*⁸⁹

⁸⁸ Hasil wawancara bersama Bapak Ari selaku masyarakat NU Kab. Ciamis, pada 9 juni 2024.

⁸⁹ Hasil wawancara bersama Bapak Hendra selaku masyarakat NU Kab. Ciamis, pada 8 juni 2024.

Jika melihat pada pernyataan tersebut, terlihat jelas *'Aṣabiyah* yang muncul pada masyarakat NU Ciamis disebabkan oleh rasa yang sama yaitu ketidakpuasan atas pemimpin sebelumnya yang membuat masyarakat NU Ciamis berbondong-bondong tidak memilih petahanan calon bupati pada pilkada 2018.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah meninjau secara yuridis sosiologis keseluruhan dari hasil pembahasan tentang partisipasi politik masyarakat NU Kabupaten Ciamis pada pilkada 2018, maka peneliti pada kesimpulan menjawab pokok penelitian yaitu :

1. Masyarakat NU Kabupaten Ciamis menunjukkan tingkat partisipasi politik yang tinggi dalam Pilkada 2018, dari 721.951 penduduk Ciamis yang turut serta dalam proses Pilkada pada tahun 2018 ada 450.000 masyarakat NU yang ikut berpartisipasi dalam pilkada tahun 2018 tersebut. Partisipasi ini mencerminkan kesadaran politik yang tinggi dan tanggung jawab masyarakat NU sebagai bagian dari tugas masyarakat negara. Partisipasi politik masyarakat NU Ciamis lebih dominan dalam bentuk konvensional, seperti memberikan suara pada hari pemilihan dan terlibat dalam kampanye serta sosialisasi calon. Kegiatan kampanye dilakukan secara aktif baik oleh individu maupun kelompok, seringkali melalui acara keagamaan seperti pengajian. Masyarakat NU Ciamis cenderung lebih nyaman dengan partisipasi politik yang bersifat konvensional dan kurang terlibat dalam partisipasi non-konvensional seperti demonstrasi atau mogok kerja. Faktor-faktor seperti minimnya kesadaran politik, keterbatasan informasi dan pendidikan politik, serta budaya lokal yang

cenderung kolektif dan patuh terhadap otoritas, turut berkontribusi terhadap rendahnya partisipasi non-konvensional.

2. Partisipasi politik masyarakat NU di Kabupaten Ciamis dalam Pilkada 2018 dapat dianalisis menggunakan teori *'aşabiyah* Ibnu Khaldun yang menekankan pada solidaritas sosial atau ikatan antar kelompok dengan beberapa indikator, yaitu ekonomi, sosial, agama, keluarga, kepentingan, rasional, dan kedaerahan. Sebagian besar masyarakat NU di Ciamis adalah petani yang memiliki keterbatasan akses terhadap informasi politik yang lengkap, sehingga rentan terhadap politik uang. Peran tokoh agama seperti memiliki peran penting dalam membimbing dan memobilisasi masyarakat untuk mendukung calon tertentu. Pengaruh mereka didasarkan pada kepercayaan dan penghormatan yang tinggi dari para jamaah. Solidaritas masyarakat NU di Ciamis Utara sangat kuat karena salah satu calon bupati berasal dari daerah tersebut, yang meningkatkan *'aşabiyah* atau ikatan kelompok berdasarkan asal usul daerah calon bupati. Masyarakat NU di Ciamis Kota juga menggunakan pertimbangan rasional dalam memilih calon bupati berdasarkan janji-janji kampanye yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Namun, ketidakpuasan terhadap pemimpin sebelumnya juga mendorong pemilih untuk mencari perubahan dan memilih calon baru yang dianggap lebih kompeten.

B. Saran

1. Kepada calon bupati Ciamis selanjutnya diharapkan melakukan dialog yang intensif dengan masyarakat NU Ciamis, program-program yang

konkret dan realistis, serta komitmen untuk menindaklanjuti janji-janji kampanye. Dengan demikian, kepercayaan masyarakat dapat ditingkatkan.

2. Kepada seluruh masyarakat NU Ciamis agar lebih rasional dalam menentukan pilihan. tidak didasarkan pada asal daerah calon bupati, akan tetapi dilihat juga visi-misi yang disampaikan oleh para calon bupati agar bisa menciptakan pemerintahan yang lebih baik.



DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, Haryati. Ayih Sutarih. "Partisipasi masyarakat dalam pembangunan politik: kajian keterlibatan politik dalam pemilu Indonesia". *Atlantis Press*. vol. 429.
- Agustino, Leo. M Dias Hikmawan, Jonah Silas. "Pilkada, politik biaya tinggi, dan korupsi di Indonesia". *Otoritas: Jurnal ilmu pemerintahan*. vol. 13, no. 1, 2023.
- Apriyani, Mahrita. Dkk, "Pengaruh Money Politics Culture Terhadap Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Umum". *MUTAKALLIMIN; Jurnal Ilmu Komunikasi*. vol. 5, no. 2, 2022.
- Ashofa, Aufa'Abdillah. "Akar Konsep Nasionalisme: Teori 'Ashabiyah Ibn Khaldun Dalam Kitab Muqaddimah". *Skripsi*. Cirebon: IAIN Syekh Nurjati, 2022.
- Azirah. "Partisipasi Politik Pemilih Pemula Dalam Pesata Demokrasi". *Politica*. Vol .6, no. 2, 2019.
- Baali, Fuad. Ali Wardi. *Ibn Khaldun dan Pola Pikir Islam*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 1989.
- Blühdorn, Ingolfur. Felix Butzlaff. Democratization beyond the post-democratic turn:towards a research agenda on new conceptions of citizenparticipation. *DEMOCRATIZATION*. vol. 27, no. 3, 2020.
- Dhakiri, Muh. Hanif. *Pedoman Berpolitik Warga NU*. Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2013.
- Fadli, Andi Muh Dzul, Dkk. "Kemenangan petahana dalam kontestasi Pilkada serentak 2018: Ditinjau dari perspektif powercube". *Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam*. Vol. 14, no. 2, 2018. <https://jurnal.unimed.ac.id/2012/index.php/jupii/article/view/8407>.
- Fuad, A. Jauhar. "akar sejarah moderasi islam pada nahdlatul ulama". *tribakti: jurnal pemikiran keislaman*. vol. 31, no. 1, 2020.
- Gaffar, Janedjri M. *Politik Hukum Pemilu*. Jakarta: Konstitusi Press. 2012.

- Hadi, Sofyan. "Makna Pasal 18 Ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945". *DiH: Jurnal hukum*. vol. 19, no. 1, 2023.
- Halim, Rahmawati. Muhlin Lalongan, *Partisipasi politik masyarakat teori dan praktek*. Makasar: CV sah media, 2016.
- Handayani, Tri Wahyuni. "Pemikiran Ibnu Khaldun Tentang'ashabiyah Terhadap Masyarakat Modern (Dalam Konteks Indonesia)". *Skripsi*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2011.
- Hasyim, Hafidz. *Watak Peradaban Dalam Epistimologi Ibnu Khaldun*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012.
- Hayati, Nurhikmah. Abdul Rasyid, Zuhriah, Partisipasi Masyarakat pada Pilkada Mandailing Natal Kabupaten di Kecamatan Panyabungan Tahun 2020 (Studi Ilmu Politik Komunikasi). *Konfrontasi Journal: Culture Economy and Social Changes*. vol. 6, no. 1, 2022.
- Ilham.Muh. "Konsep Ashabiyah Dalam Pemikiran Politik Ibnu Khaldun". *Jurnal Politik Profetik*. Vol. 04, no. 1, 2016. <https://journal3.uin-alauddin.ac.id/index.php/jpp/article/view/2733>.
- Ismail, Faisal. *dilema NU di tengah badai pragmatisme politik*. Jakarta: proyek peningkatan pengkajian kerukunan hidup umat beradama dan diklat keagamaan departemen agama RI, 2004.
- Jamaludin, Teten. "Pilkada langsung: Kisah sukses dan problematika". *JPW (jurnal politik walisongo)*. vol. 1, no. 1, 2019.
- Jurdi, Fajlurrahman. *Pengantar hukum pemilihan umum*. Jakarta: Kencana. 2018.
- Khaldun Ibnu, *Mukaddimah*, terj. Ahmadi Thaha. Jakarta: Wali Pustaka, 2021.
- Khoiruddin. "Analisis Teori Ashabiyah Ibn Khaldun Sebagai Model Pembetrdayaan Ekonomi Umat". *Jurnal ASAS*. Vol. 8, no. 2, 2016. <http://www.ejournal.radenintan.ac.id/index.php/asas/article/view/1224>.
- Mamik. *Metodologi Kualitatif*. Sidoarjo: Zifatama PUBLISHER, 2014.
- Mayrudin, Yeby Ma'asan dan M. Chairil Akbar. "Pergulatan Politik Identitas Partaipartai Politik Islam: Studi tentang PAN, PKB dan PKS". *Madani Jurnal Politik Dan Sosial Kemasyarakatan*. Vol.11, no. 2, 2019. <http://e-jurnal.unisda.ac.id/index.php/MADANI/article/view/4812>.

- MD, Moh. Mahfud. *Demokrasi dan konstitusi di Indonesia*. Jakarta: rineka cipta, 2000.
- Miaz, Yalvema. *Partisipasi politik pola perilaku pemilih pemilu masa orde baru dan reformasi*. Padang: UNP Press, 2012.
- Nawawi, Masrur. *Islam Hujau refleksi keagamaan dan kebangsaan Nahdlatul Ulama*. Yogyakarta: alQodir press, 2014.
- Nasution, Bahder Johan. *Metode penelitian ilmu hukum*. Bandung: CV. Mandar Maju, 2008.
- Nugrahani, Farida. *Metode penelitian kualitatif*. Solo: Cakra Books, 2014.
- NurulHuda. "Pemikiran Ibnu Khaldun Tentang Ashabiyah". *Publikasi Ilmiah*. Vol. 20, no. 01, 2008. <https://publikasiilmiah.ums.ac.id/xmlui/handle/11617/916>.
- Nurhayati. "Konsep Ashabiyah Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Di Kota Bandar Lampung (Analisa Pemikiran Ibnu Khaldun)". *Skripsi*. Lampung: UIN Raden Intan, 2020.
- Prayudi, Ahmad Budiman, Aryojati Ardipandanto. *Dinamika politik pilkada serentak*. Jakarta Pusat: Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, 2017.
- Raharusun, Anthon. "Pilkada dan Penguatan Demokrasi dalam Sistem Kenegaraan Indonesia". *Papua law jurnal*. vol. 2, no. 1, 2017.
- Raliby, Osman. *Ibnu Khaldun tentang masyarakat dan negara*. Jakarta: Bulan Bintang, 1978.
- Saeful, Asep. *komunikasi politik Nahdlatul Ulama*. Jakarta: LP3ES, 2004.
- Subakti, Ramlan. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: PT Grasindo, 1999.
- Sunaryo, Agus. Dkk. *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah IAIN PURWOKERTO*. Purwokerto. 2019.
- Sunggono, Bambang. *Metodelogi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 1998.

Sarmaniah, Siti. "Relevansi Teori Ashabiyah Ibn Khaldun Dalam Kekuasaan Politik Lokal Banten". *Skripsi*. Banten: UIN Sultan Maulana Hasanuddin, 2018.

Sodikin. *Hukum Pemilu: pemilu sebagai praktek ketatanegaraan*. Bekasi: Gramata Publishing, 2014.

Syafrizal. "Konsep 'ashabiyah ibn khaldun dalam penguatan nilai nasionalisme di Indonesia". *Skripsi*. Medan: UIN Sumatera Utara, 2017.

Ulum, Muhammad Bahrul. "Bagaimana demokrasi pemilu?menilai kembali pasal 18 (4) uud 1945konstitusi dan implikasinya terhadappemilu kepala daerah pada ptindonesia". *Jurnal hukum dan peradilan*. vol. 8, no. 2, 2019.

Wardhani, Primandha Sukma Nur. "Partisipasi politik pemilih pemula dalam pemilihan umum". *Jupiiis: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*. Vol. 10, no. 1, 2018. <https://jurnal.unimed.ac.id/2012/index.php/jupiiis/article/view/8407>.

Wilsontrianto, Aprianus. Randy Vallentino Neonbeni. "Sistem pemilihan kepala daerah dan implementasinya dalam undang-undang no 1 tahun 2015 tentang pemilihan Gubernur,Bupati dan Walikota". *Jurnal ilmu sosial, politik, dan hukum*. vol. 2, no. 2, 2023.

Winengan. "Kebijakan demokratisasi politik lokal: partisipasi pemilih dalam pemilihan kepala daerah langsung". *Jurnal ilmuh sosial dan politik*. vol. 22, no. 1, 2018.

Keputusan KPU

Keputusan kpu kabupaten ciamis tentang penetapan pasangan calon peserta pemilihan bupati dan wakil bupati ciamis tahun 2018.

Keputusan kpu tentang penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara dalam pemilihan bupati dan wakil bupati ciamis tahun 2018.

SK KPU SK KPU Tentang hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2018.

Wawancara

Hasil wawancara bersama Bapak Arief Ismail Chowas selaku Ketua PCNU Kab. Ciamis, pada 3 juni 2023.

Hasil wawancara bersama Bapak Arief Ismail Chowas selaku Ketua PCNU Kab. Ciamis, pada 8 juni 2024.

Hasil wawancara bersama Bapak Didu selaku masyarakat NU Kab. Ciamis, pada 9 juni 2024.

Hasil wawancara bersama Ibu Oom selaku masyarakat NU Kab. Ciamis, pada 13 juni 2024.

Hasil wawancara bersama Bapak Hendra selaku masyarakat NU Kab. Ciamis, pada 14 juni 2024

Hasil wawancara bersama Bapak Maman selaku masyarakat NU Kab. Ciamis, pada 13 juni 2024.

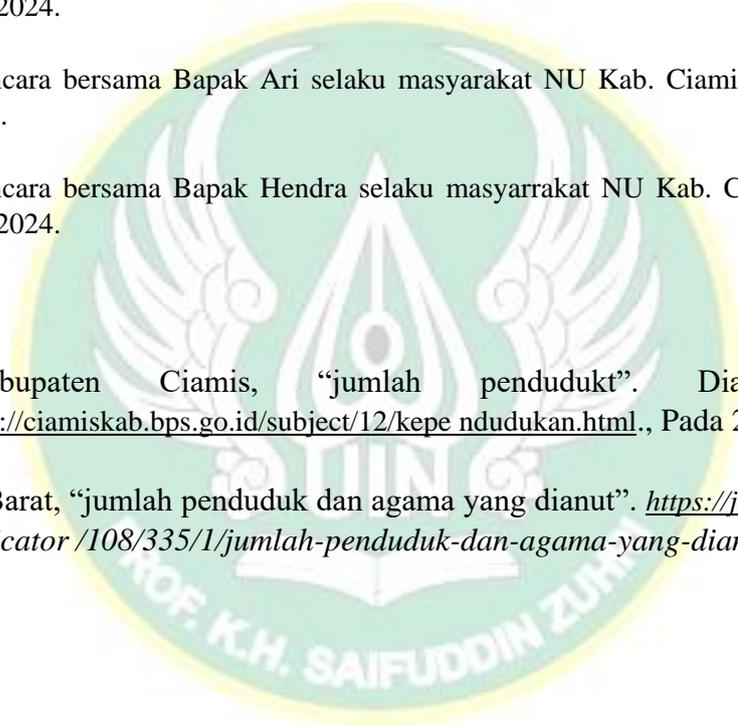
Hasil wawancara bersama Bapak Ari selaku masyarakat NU Kab. Ciamis, pada 9 juni 2024.

Hasil wawancara bersama Bapak Hendra selaku masyarakat NU Kab. Ciamis, pada 8 juni 2024.

Website

BPS Kabupaten Ciamis, “jumlah penduduk”. Diakses dari <https://ciamiskab.bps.go.id/subject/12/kependudukan.html>., Pada 26 Juni 2024.

BPS Jawa Barat, “jumlah penduduk dan agama yang dianut”. <https://jabar.bps.go.id/indicator/108/335/1/jumlah-penduduk-dan-agama-yang-dianut.html>.



LAMPIRAN – LAMPIRAN



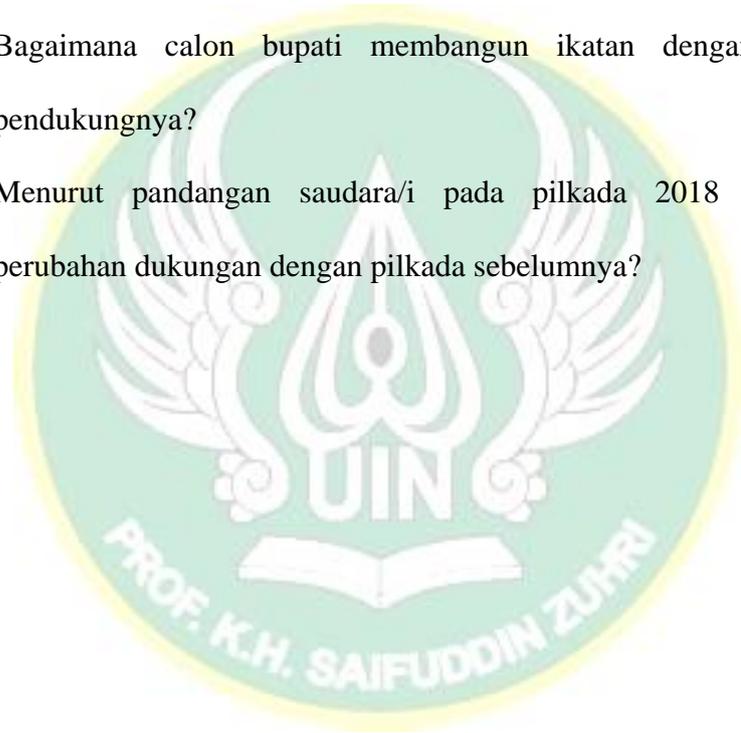
Lampiran 1 Pedoman Wawancara

PEDOMAN WAWANCARA

A. Daftar Pertanyaan Wawancara Partisipasi Politik Masyarakat Nahdlatul Ulama Ciamis Pada Pilkada 2018 :

1. Pada pilkada 2018 apakah saudara/i sudah menjadi pemilih?
2. Darimana saudara/i mengetahui calon bupati pada pilkada 2018?
3. Menurut saudara/i ikatan dalam keluarga saudara/i mempengaruhi dalam menentukan pilihan?
4. Bagaimana saudara/i melihat ada keterikatan dalam bisnis lokal pada pilkada 2018?
5. Bagaimana pandangan saudara/i tentang hubungan kondisi ekonomi masyarakat dalam penentuan pilihan pada pilkada 2018?
6. Sejauh mana peran tokoh agama dalam mengarahkan pilihan saudara/i?
7. Dilihat dari profesi saudara/i seberapa besar pilkada ini berpengaruh pada profesi saudara/i?
8. Bagaimana pandangan saudara/i terhadap janji-janji yang diberikan oleh para calon?
9. Apakah penentuan pilihan saudara/i terhadap salah satu calon dapat berdampak pada kepentingan saudara/i?
10. Apakah saudara/i mengetahui visi misi dari calon yang saudara/i pilih?
11. Menurut saudara/i visi misi yang disampaikan oleh calon yang saudara/i pilih sudah sesuai dengan keinginan saudara/i?

12. Bagaimana visi misi calon bupati bisa memengaruhi saudara/i dalam menentukan pilihan?
13. Apakah saudara/i merasa terintimidasi dalam menentukan pilihan calon bupati pada pilkada 2018?
14. Seberapa besar pengaruh daerah asal calon bupati untuk mempengaruhi masyarakat dalam menentukan pilihan pada pilkada 2018?
15. Bagaimana calon bupati membangun ikatan dengan kelompok pendukungnya?
16. Menurut pandangan saudara/i pada pilkada 2018 apakah ada perubahan dukungan dengan pilkada sebelumnya?



| Nama | Jawaban | Kesimpulan |
|------------|---|---|
| Bapak Abay | 1. Sudah. | Sudah mengikuti Pilkada 2018. |
| | 2. Dari ciamis, dari sodara sekeluarga. | Mengetahui dari keluarga. |
| | 3. Tidak berpengaruh jadi bebas lah bebas memilih. | Tidak ada pengaruhnya. |
| | 4. Bisnis lokal gak tau, gak ada cuma taunya itu pilkada serentak. | Tidak mengetahui. |
| | 5. Itu ya kalo dikampung ya itu lah ya sama aja gitu, kalo buruh kuli gak kerja ya gak makan gitu jadi apa adanya, kalo milih mah masing-masing bebas terserah. | Tidak ada pengaruh terkait kondisi sosial. |
| | 6. Engga engga ada lah. | Tidak ada pengaruh dari tokoh agama. |
| | 7. Biasa lah buruh profesi saya buruh ya paling ada bantuan lah dari pamarentah sembako gitu lah. | Tidak ada pengaruh apa-apa cuman paling mendapat sembako dari pemerintah. |
| | 8. Jadi janji janji itu lah cuma janji doang, bukti ada bukti gak ada gitu lah, ya kadang-kadang janji janji itu jadi alasan saya memilih. | Janji-janji yang disampaikan sebagian menjadi faktor dalam saya menentukan pilihan. |
| | 9. Ya kepentingan masyarakat ya iya ada lah, ya intinya kepentingan masyarakat umum | Dampak dirasakan oleh masyarakat umum. |

| | | |
|--|---|---|
| | berdampak. | |
| | 10. Gak mengetahui | Tidak mengetahui. |
| | 11. - | - |
| | 12. - | - |
| | 13. Gak ada. | Tidak ada intimidasi. |
| | 14. Gak ada lah sama aja gitu lah gak diliat dari asal mana yang penting mah kejujuran gitu. | Daerah asal calon tidak mempengaruhi dalam menentukan pilihan. |
| | 15. Ya kalo mau pilkada ya ada yang ke kampung kampung dulu pernah ada. | Yang menjalin hubungan komunikasi dengan masyarakat adalah tim suksesnya.. |
| | 16. Ya sama aja lah, gak tau kalo faktor alasan pak herdiat bisa menang, kalo saya ya alesannya yang penting bukti dari janji janji nya, soalnya mau yang ini menang yang ini kalah ya saya sama aja jadi buruh kaya gini sama aja gak perubahan. | Karena janji-janji yang disampaikan bapak herdiat lebih mudah diterima oleh masyarakat. |

| Nama | Jawaban | Kesimpulan |
|------------|--|---|
| Bapak Eman | 1. Udah. | Sudah mengikuti Pilkada 2018. |
| | 2. Dari tim sukses, tetangga biasa lah yang rame pendukungnya. | Mengetahui calon bupati dari tim sukses dan tetangga. |
| | 3. Dari keluarga kumaha masing-masing, kalo saya mah itu mah hak masing-masing. | Tidak ada pengaruhnya. |
| | 4. Gak ada ikatan independen, masing-masing punya pilihan calonnya. | Tidak ada ikatan semuanya independent. |
| | 5. Biasa bisa aja itu mah, sama aja yang kecil ada yang milih kesini yang besar ada yang milih kesana lah campur ya masing-masing, tapi kebanyakan yang besar ngajak yang kecil kecil, yang biasa pengusaha besar ngajak yang kecil masyarakat, pengusaha rata rata jadi tim sukses. | Yang terjadi dimasyarakat adalah para pengusaha besar sering kali mengajak pada masyarakat kecil untuk memilih salah satu calon dikarenakan kebanyakan para pengusaha tersebut menjadi tim sukses salah satu calon. |
| | 6. Tokoh agama mah disini mah jarang ikut ikut, tokoh agama mah jarah ngasih tau di pengajian jarang gak ikut jadi tokoh agama mah, tokoh agama mah engga ikut ikut tapi kebanyakan mah pengusaha yang itu mah yang gaduh modal yang sering ngajak mah, kalo tokoh agama mah engga disini mah. | Tokoh agama tidak pernah mengajak atau mengarahkan masyarakat memilih salah satu calon, yang sering mengajak untuk memilih salah satu calon adalah pengusaha. |
| | 7. Saya mah asa biasa | Tidak ada pengaruh apa- |

| | | |
|--|--|--|
| | bisaa aja gak ada efek samping nya. | apa. |
| | 8. Itu mah siapa nyata aja ya janji, jangan ingkar janji kalo janji, kalo guru guru mah cuma bisa nunggu aja gimana benarnya gitu lah, iya itu janji janji jadi pertimbangan buat milih. | Janji-janji yang disampaikan merupakan pertimbangan dalam menentukan pilihan. |
| | 9. Bisa itu juga, tapi gmna calonnya gening a kebanyakan bisa berdampak, aya dampak pembangunan sekolah rab mudah turunnya. | Berdampak, karena sekarang pembangunan sekolah cepat dan RAB lebih cepat turun. |
| | 10. Mengetahui. | Mengetahui. |
| | 11. Visi misinya ada yang sama dengan calonya aya yang dilakuin sama calon teh ada yang engga jadi engga semua dilaksanakan visi misinya. | Sebagian sudah sesuai harapan saya akan tetapi tidak semua janjinya terealisasi. |
| | 12. Visi misinya yang gimana ya yang lupa lagi ngobrol nya, intinamah ngaruh lah a kana menentukan pilihan | Vsis-misi memiliki pengaruh dalam menentukan pilihan. |
| | 13. Gak ada Itu mah keinginan sendiri. | Tidak ada intimidasi. |
| | 14. Pengaruh gitu nya kalo dari daerah asal calon, kalo disini mah gak ada pengaruhnya gitu a, kalo daerah mah, kalo pengaruhnya paling ge | Daerah asal calon menjadi faktor utama dalam menentukan pilihan, akan tetapi faktor utama adalah sikap dan prilaku calon itu sendiri semasa menjabat |

| | | |
|--|--|---|
| | <p>kalo semasa calonnya semasa masih nyalonin bagus pekerjaannya gimana terhadap masyarakat gimana liat ke masyarakat gimana liat sikap calonnya dulu kalo disini mah masyarakat baik gimana, daerah mah gak ngaruh, yang penting orang jujur baik kalo daerah mah gak ngaruh.</p> | <p>dahulu.</p> |
| | <p>15. Saya kurang tau, kalo jalanin itu mah tim sukses, kalo disekolahkan gak boleh kaya gitu mah jadi saya gak tau kalo gitu mah maaf ya a.</p> | <p>Tidak mengetahui akan hubungan yang dibangun oleh calon bupati dengan pendukungnya..</p> |
| | <p>16. Ada keliatannya, keliatannya pak herdiat mah deket sama warga gitu nya a janjinya agak bisa ditepati keliatannya gitu da ai masyarakat ngobrol tah calon anu ieu anu anu anu, saya mah kurang itu gening ka politik teh.</p> | <p>Karena bapak herdiat lebih dekat dengan masyarakat dean janji-janjinya sebgaian sudah terealisasi.</p> |

| Nama | Jawaban | Kesimpulan |
|------------|---|---|
| Bapak Didi | 1. Sudah. | Sudah mengikuti Pilkada 2018. |
| | 2. Ya saya tau dari benner di jalan jalan we. | Mengetahui calon bupati dari banner yang ada di jalan-jalan. |
| | 3. kalo saya mah gak ada pengaruhnya sih ya bebas aja, saya sama istri saya juga beda pilihan tapi ya biasa, ngebebasin lah kalo itu mah. | Tidak berpengaruh, silahkan memilih sesuai keinginan masing-masing. |
| | 4. kurang tau ya, soalnya saya juga dagang disini, gak ada tuh ajakan harus milih yang mana, itu mah terserah hatinya masing-masing. | Tidak ada, pilihan mah bebas sesuai keinginan masing-masing. |
| | 5. gak ada hubungannya si ya, soalnya ya sama sama aja lah ya. | Tidak ada pengaruh dari tingkat ekonomi masyarakat. |
| | 6. gak ada sih kalo itu mah. | Tidak ada pengaruh dari tokoh agama. |
| | 7. Gak ada pengaruhnya lah, mau siapa aja yang jadi ya saya mah tetep we jualan pan kitu. | Tidak berpengaruh. |
| | 8. lah kalo janji janji mah harus sih terealisasi dilaksanakan tapi kenyatannya kan ada yang engga. | Tidak berpengaruh akan menentukan pilihan, karena selama ini janji yang di sampaikan oleh para calon tidak terealisasi semua. |
| | 9. Engga sih. | Tidak berdampak. |
| | 10. Engga. | Tidak mengetahui |

| | | |
|--|---|--|
| | 11. - | - |
| | 12. - | - |
| | 13. Tidak. | Tidak ada intimidasi |
| | 14. ya berpengaruh apalagi ya pak herdiat orang sini kan, jadinya berpengaruh, tapi kalo saya mah kan pindahan ke sini nya tapi tau pak herdiat udah dari pas di penawangan bagus pas mimpinya jadi ya, pas naik ke kabupaten ya saya dukung da udah tau dulu nya di penawangan, nanti juga pilihan yang nanti saya mah dukung pak herdiat lagi pokoknya. | Sangat berpengaruh karena bapak Herdiat adalah asli orang Kawali, jadi mayoritas masyarakat memilih bapak Herdiat, kemudian dahulu saat menjabat di Panawangan bagus itu juga jadi alasan memilih bapak Herdiat. |
| | 15. Ya kalo itu mah paling timses nya aja sih da kalo calonnya mah engga, paling ya ngadain acara kede disini di alun-alun Kawali. | Hubungan yang dibangun kepada masyarakat oleh tim suksesnya saja karena untuk bapak Herdiat lebih terfokus di Kawali mengadakan kegiatan yang mengundang masa banyak. |
| | 16. ya mungkin masyarakat pengen yang beda ya, pengen yang baru gitu nyoba, dan ya mungkin gak puas sama yang sebelumnya. | Dikarenakan rasa ketidakpuasan dari pemimpin sebelumnya. |

| Nama | Jawaban | Kesimpulan |
|------------|---|---|
| Bapak Yana | 1. Sudah. | Sudah mengikuti Pilkada 2018. |
| | 2. Pilkada 2018 calonnya saya tau dari sodara, dari banner ya dari semuanya lah. | Mengetahui calon bupati dari banner dan keluarga. |
| | 3. Berpengaruh lahh, kalo saya pribadi mah paling ngajak keluarga saya aja gitu sama istri sama anak. | Berpengaruh untuk mengajak keluarga seperti anak dan istri. |
| | 4. Kalo saya sehari hari disini kan ya petugas parkir disini ya mengetahui ya besar kecilnya ya tapi kalo masalah condong ke no 1 no 2 gak ada lah netral gitu lah, walaupun satu calon orang Kawali tapi untuk pedagang ya netral lah. | Untuk para pedagang UMKM bersifat netral tidak ada kecondongan kepada salah satu calon. |
| | 5. Kalo masalah itu mah ya, penilaian saya pribadi ya maaf maaf kalo masalah itu mah mungkin kecondongan ada lah buat masyarakat menengah ke atas mah ada lah seperti pejabat gitu, bicara dari hati langsung lah ya ada lah ya. | Kecenderungan masyarakat menengah ke atas lebih memilih calon yang dekat dengannya. |
| | 6. dari tokoh agama yang saya alami, itu kan ya e, yang namanya tokoh agama gak ada unsur menekan ya | Tidak ada pengaruh dari tokoh agama. |

| | | |
|--|--|---|
| | <p>harus pilih no 1 no 2 ya cuma kan dari pihak agama kecamatan Kawali sendiri itu mah kan hak asasi lah ya bebas gak ada keharusan memilih salah satu paslon jadi netral netral aja kalo tokoh keagamaan mah.</p> | |
| | <p>7. Efek dampaknya ya mungkin bisa dibilang positif juga sih alhamdulillah ya dampak efek pada pekerjaan ya alhamdulillah ya ada hikmahnya lah.</p> | <p>Cukup memberikan dampak positif.</p> |
| | <p>8. Kalo masalah janji ya jujur terus terang ya mulai ditepati lah walaupun belum maksimal 100 persen tapi ya udah ada yang di tepati, ya mungkin salah satu memilih calon itu ya janji janjinya itu ke 2 ya mungkin masyarakat mah ya ikut ikut aja gitu gimna baiknya.</p> | <p>Pengaruh janji-janji yang disampaikan oleh para calon memeberikan dampak kepada masyarakat dalam menentukan pilihan.</p> |
| | <p>9. Tidak bisa saja.</p> | <p>Tidak berdampak.</p> |
| | <p>10. Sebagian mengetahui.</p> | <p>Mengetahui sebagian</p> |
| | <p>11. Ya sebagian</p> | <p>Sebagian sudah sesuai keinginan.</p> |
| | <p>12. Kalo untuk pilihan itu keyakinan sendiri sih tidak ada pengaruh</p> | <p>Tidak ada pengaruh dari visi-misi untuk menentukan pilihan.</p> |

| | | |
|--|--|---|
| | dari visi misi. | |
| | 13. Tidak. | Tidak ada intimidasi |
| | 14. Kalo menurut saya pribadi ya sangat besar, pepatah orang Sunda mengatakan pribahasa ya sebelum yang jauh nyolok pasti yang deket dulu gitu kan ya, dari putra daerah setempat lah ya, pasti kecondongan masyarakat ada lah ya ke putra daerah sendiri. | Sangat berpengaruh, asal daerah calon asli Ciamis lebih banyak di pilih oleh masyarakat dikarenakan putra daerah Ciamis. |
| | 15. Kalo saya sendiri ya melihatnya, karena saya kan tidak ikut ke dalam kelompok ya, ya mungkin baik baik aja, ya paling dulu bikin acara khitanan, tapi ya paling sosialisasi yang ke masyarakat ya timses nya aja. | Hubungan yang dibangun kepada masyarakat oleh tim suksesnya saja karena untuk bapak Herdiat lebih terfokus di Kawali mengadakan kegiatan yang mengundang masa banyak. |
| | 16. Kalo saya sendiri masalah kesitu mah kurang tau ya, ya kan namanya orang dibawah ya kurang tau ya masalah penilaian gitu mah, itu mah masalah penilaian orang diatas lah itu mah, ya mungkin karena asli orang sini makanan menang. | Dikarenakan salah satu calon ada yang asli Ciamis menyebabkan masyarakat banyak memilihnya. |

| Nama | Jawaban | Kesimpulan |
|--------------|---|---|
| Bapak Engkos | 1. Sudah. | Sudah mengikuti Pilkada 2018. |
| | 2. Dari ini aja dari baliho yang ada di jalan jalan. | Mengetahui dari baliho yang ada di jalan-jalan. |
| | 3. Tidak mempengaruhi, tidak itu mah bebas aja mau pilih yang mana juga. | Tidak ada pengaruhnya. |
| | 4. Kumaha nya gak ada, enggak ada. | Tidak ada ikatan pengusaha untuk condong kesalah satu paslon. |
| | 5. gak ada, saya mah murni milih yang keluar dari hati sendiri. | Tidak ada karena memilih murni dari hati. |
| | 6. Gak ada, gak ada pengaruhnya yang nyuruh kesini kesini, saya mah liat di gambar aja no satu ini no dua ini jadi gak ada pengaruhnya kalo bagi saya mah, gak ada yang datang suruh milih no ini no ini. | Tidak ada pengaruh dari tokoh agama. |
| | 7. Gak ada pengaruh, biasa biasa aja ya normal normal saja gitu. | Tidak ada pengaruh apa-apa. |
| | 8. ya gak terlalu ini si, gak terlalu fokus ke situ, jadi gak tau masalah politik, jadi ya itu mah milih lah anak anak suruh milih yang mereka mau. | Janji-janji yang disampaikan tidak menjadi faktor dalam menentukan pilihan. |
| | 9. Tidak. | Tidak ada dampak yang dirasakan. |

| | | |
|--|---|--|
| | 10. Tidak tau | Tidak mengetahui. |
| | 11. - | - |
| | 12. - | - |
| | 13. Gak ada sih a. | Tidak ada intimidasi. |
| | 14. gak ada pengaruhnya ya, soalnya saya mah ya orangnya netral aja ya, gak ada pengaruh ini itu ini itu gak ada saya mah hehe. | Daerah asal calon tidak mempengaruhi dalam menentukan pilihan. |
| | 15. gak tau, da kesini mah gak ada tuh calon yang dateng ya, ya disini mah netral aja ya, jadi gak tau ya. | Yang menjalin hubungan komunikasi dengan masyarakat adalah tim suksesnya.. |
| | 16. kurang tau masalah politik politik, da saya mah cuma denger calonnya ini calonnya ini, milih yang mana aja yahh yang kita suka. | Tidak mengetahui.. |

| Nama | Jawaban | Kesimpulan |
|--------------|---|--|
| Bapak Hendra | 1. Sudah. | Sudah mengikuti Pilkada 2018. |
| | 2. Dari baliho terus aya timses sarumping. | Mengetahui calon bupati dari banner dan timsukses yang datang. |
| | 3. Ai abi mah teu langkung, tapi da abi jng pun bojo mah Sami pilihan na. | Tidak berpengaruh, akan tetapi saya dan istri memiliki pilihan yang sama. |
| | 4. Ada seperti cipangalun tah nya milih ka pak herdiat soalna kan tos jadi teman bisnis. | Ada hubungan bisnis yang dibangun oleh bapak Herdiat dengan bos Cipangalun. |
| | 5. Ai eta mah teu aya sih a da rata rata tos terang pak herdiat. | Tidak memiliki dampak dikarenakan mayoritas masyarakat sudah mengetahui bapak Herdiat. |
| | 6. Tokoh agama mah didieu mah teu pados ikut campur teu panatik pisan, da ai didieu mah gening aya HIKMAJA jadi ikatan kiyai muda jalatrang tah jadi nu nyepeng eta teh haji asepi ti cipangalun tah haji asepi nyepeng ka herdiat, nya ai koar koar mah henteu da ai dina pangaosan ge teu nyirukeun teuing. | Tidak ada pengaruh dari tokoh agama, akan tetapi para kyiai muda jalatrang yang tergabung dalam HIKMAJI memiliki kecondongan kepada bapak Herdiat dikarenakan ketua HIKMAJI mendukung Herdiat. |
| | 7. Emm alhamdulillah sih semenjak herdiat kening jadi aya kangge ngaos teh sok aya pangemut sanaja satuan sakali da kapungkur mah | Cukup berpengaruh karena setelah Herdiat menjadi bupati sering diadakan pengajian-pengajian sedangkan dulu mah tidak pernah ada. |

| | | |
|-----|--|---|
| | samemeh herdiat mah teu aya sama sekali. | |
| 8. | Nya ai nu katawis mah aya saalit saalit karaos jiga kapungkur kan janji na herdiat kan guru ngaos guru tpa satuan sakali kenging nya alhamdulillah aya wae kenging ayeuna mah. | Janji-janji yang disampaikan oleh bapak Herdiat sangat berpengaruh pada penentuan pilihan, janji yang disampaikan adalah akan menggaji para guru ngaji. |
| 9. | Asa biasa wae sih eta mah. | Tidak berdampak |
| 10. | Henteu. | Tidak mengetahui. |
| 11. | - | - |
| 12. | - | - |
| 13. | Teu aya. | Tidak ada intimidasi |
| 14. | kuat si eta teh tapi da aya nu nyebat pak herdiat teh ti kuningan, kan kapungkur kantos rame dina branding asli ciamis pisan tapi aya nu koar bahwa herdiat teh lahirna mah kuningan, tapi wallahi jualan, da ai pak iing mah kan asli tasik, tapi nya berpengaruh pisan eta teh ku putra asli daerah. | Sangat berpengaruh, sampai-sampai ada isu yang menyatakan bahwa Herdiat bukan asli Ciamis tapi Kuningan, yang bertujuan untuk menjatuhkan bapak Herdiat |
| 15. | Herdiat mah kantos kadieu pas kapungkur | Hubungan yang dibangun oleh bapak Herdiat adalah |

| | | |
|--|--|---|
| | <p>acara muludan atos sumping langsung, ongkoh sih didieu mah atos kadinya katawis na jadi ai kanu sateuacan mah atos katingali kerja na kumaha ai anu palih dieu mah duka ai nu sanes namah, nya memang ai di jalatrang mah suara herdiat goal kitu.</p> | <p>dengan menghadiri pengajian-pengajian.</p> |
| | <p>16. Nya jigana mah cek abi ieu mah kahiji nya meren seer isu isu anu cenah pak iing teh korupsi, ka dua kan nya meren jejak na sae ai herdiat mah kantos kan jadi sekda, pas jadi sekda anjeuna kantos kening penghargaan jadi iwal tina rekam jejak kerja na sae, terus nya inti namah masyarakat hoyong di gentos lah kunu baru da meren ningal kerja na teu memuaskan.</p> | <p>Dikarenakan ada isu bahwa bapak Iing melakukan korupsi, kemudian rekam jejak kerja dari bapak Herdiat yang bagus sampai pernah mendapatkan penghargaan, dan kemungkinan besar dari masyarakat menginginkan pemimpin yang baru.</p> |

| Nama | Jawaban | Kesimpulan |
|------------|--|---|
| Bapak Didu | 1. Sudah | Mengikuti Pilkada 2018. |
| | 2. Tau dari teman | Mengetahui calon dari teman. |
| | 3. Ada yang mempengaruhi ada yang engga, tapi bagi saya mah engga, pure dari saya sendiri, walaupun banyak yang ngajak tapi saya tidak ikut, ada sodara juga yang ngajak dari sodara sendiri tapi prinsip saya mah kan harus yang pas | Faktor keluarga berpengaruh dalam menentukan pilihan. |
| | 4. Kalo soal itu engga sih, ada pilihannya sendiri sendiri, setiap pedagang atau pengusaha punya pilihannya sendiri tidak ada perkumpulan yang mengarahkan harus milih salah satu calon | Tidak ada keterikatan dari para pengusaha UMKM untun condong ke salah satu paslon. |
| | 5. Ada kecenderungan sosial kalo soal itu dalam menentukan pilihan, kalo yang kalangan atas itu cenderung memilih paslon yang dekat dengan mereka tapi kalo yang kebawah mah ya tergantung yang ngasih aja soalnya kalo kalangan menengah kebawah gak terlalu memperhatikan juga | Untuk tingkatan sosial masyarakat rata-rata golongan ekonomi atas memilih paslon yang dekat dengan mereka, tapi golongan ekonomi bawah lebih cenderung memilih yang memberika bansos atau uang ke mereka, dan untuk golongan ekonomi menengah tidak terlalu memperhatikan paslon. |

| | | |
|--|--|---|
| | sih | |
| | 6. Kalo tokoh agama mah gak ada, masing masing aja | Tidak ada pengaruh dari tokoh agama. |
| | 7. Lumayan, soalnya ke ekonominya gimana ya sekarang mah, kurang aktif sama yang lainnya, ada bantuan sedikit yang saya rasakan pas pilkada, tapi sekarang mah gak ada | Berpengaruh karena mendapatkan bantuan. |
| | 8. Kalo yang itu gak ada pak, soalnya itu biasanya janji janji doang pembuktian kurang, janji kaya mau benerin jalan tapi gak ada, setelah kepilih malah gak ada, kebanyakan gitu, dulu banyak yang ngasih janji janji tapi kebanyakan gak dilaksanakan kalo udah kepilih, | Untuk janji-janji tidak terlalu berpengaruh karena itu hanya sekedar janji yang sering kali diingkari |
| | 9. Iya, kalo ini kan, janjinya ditempati kan enak kesayanya buat masa depannya, bukan janji janji doang tapi buat masa depannya gak ada, kebanyakan janjinya cuma pas kampanye aja, janji itu mempengaruhi menentukan pilihan buat masa depannya, | Tidak berdampak, semua janji yang disampaikan hanya untuk kampanye |

| | |
|--|---|
| <p>10. gak ada, gak baca kalo itu mah, kurang paham kalo itu mah, jadi gak liat visi misinya langsung aja liat janji nya, cuma ucapan sama</p> | <p>Tidak mengetahui visimisinya hanya melihat janji-janji yang disampaikan</p> |
| <p>11. -</p> | <p>-</p> |
| <p>12. -</p> | <p>-</p> |
| <p>13. gak ada kalo itu mah</p> | <p>Tidak ada intimidasi</p> |
| <p>14. kalo itu mah ada yang mempengaruhi ada yang engga, tapi kan pembuktiannya walapun asli orang ciamis tapi nyatanyakan engga semua apaya pembuktian sama janjinya dia engga sampai, tapi nyatanya kalo bukan asli sini bagus, kaya pak iing itu bagus ke UMKM nya, ditempati gak kaya gini kondisinya, sekarang kan semrawut, tempat kerja juga, walapun asli orang ciamis juga, daerah asal engga menentukan lah pak</p> | <p>Untuk daerah asal calon tidak terlalu menjadi faktor utama dalam menentukan pilihan karena orang luar ciamis juga sering kali bagus dalam memimpin.</p> |
| <p>15. Bagus, turun ke lapangan sosialisasi kemasyarakatan, dari herdiat terjun langsung ke masyarakat jadi gak ada omong omongan</p> | <p>Pendekatan yang dilakukan oleh salah satu calon yaitu bapak Herdiat adalah sosialisasi langsung ke masyarakat agar menghindari omongan-omongan dibelakang.</p> |

| | | |
|--|--|--|
| | dibelakang, | |
| | <p>16. Ada perubahan drastis, faktornya herdiat langsung turun terus janji janjinya ke masyarakat biar menang, tapi kan gak ditepati semua, kalo iing kurang terjun langsung kemasyarakatan kaya herdiat yang terjun langsung ke masyarakat, saya milih herdiat karena janji janji yang mau ngembangin UMKM biar meningkatkan, tapi beda kenyataannya, kalo kita kan janji enak buat kita mah, tapi gak ada janji buat UMKM malah renovasi alun-alun, herdiat sekarang gak sesuai dengan janji janjinya.</p> | <p>Perubahan dukungan yang terjadi dikarenakan pendekatan yang dilakukan oleh bapak Herdia dengan cara terjun langsung ke masyarakat dan memberikan janji-janji yang sesuai dengan keinginan masyarakat.</p> |

| Nama | Jawaban | Kesimpulan |
|--------------|---|---|
| Bapak Engkos | 1. Atos. | Sudah mengikuti Pilkada 2018. |
| | 2. Pilkada 2018, ya dari medsos kebanyakan si dari medsos ya soalnya memang ya sudah dari jauh jauh hari sebelum pilkada pun pamflet, terus di medsos udah dikabarkan untuk calon calon nya. | Mengetahui dari pamflet-pamflet yang ada di media sosial. |
| | 3. enggak sih eta mah, soalnya sanajan sama suami istri tapi bebas lah eta mah. | Tidak ada pengaruhnya, untuk memilih bebas sesuai keinginan masing-masing |
| | 4. Emm ada si, ada si keliatan ada, tapi gak bisa disebut kan ya. | Ada ikatan dari para pengusaha lokal dalam menentukan pilihan. |
| | 5. Kalo itu mah masing-masing si gak ada bedanya sama sama aja. | Tidak ada karena memilih sesuai keinginan masing-masing. |
| | 6. tokoh agama mah gak terlalu dominan yang mengharuskan memilih yang mana tapi itu di balikan lagi kepada kita, paling adanya ya membanding kalo yang ini gini kalo yang ini gini untuk dipilih mangga silahkan dikembalikan lagi. | Tidak ada keharusan dari tokoh agama untuk memilih salah satu paslon, akan tetapi tokoh agama ngabranding salah satu calon. |
| | 7. Kalo saya pribadi profesi kuat, kenapa kuat bisa dilihat dari perpecahan para ASN, karena kebetulan saya | Pengaruhnya sangat besar sampai-sampai membuat perpecahan pada ASN. |

| | | |
|----|---|--|
| | <p>dan suami adalah asn jadi berasa sekali gitu haha.</p> | |
| 8. | <p>hahah janjinya ya gimana hilap deui, kalo janjinya mungkin lebih ke apaya kalo untuk dirasakan di daerah kami disini belum terlalu terasa realisasinya tapi kalo untuk didaerah lain mungkin sudah terasa realisasinya, ehh jalan dan pembangunan pos kamling belum terlalu banyak, padahal itu yang di butuhkan, kalo saya janji janji itu gak jadi alesan untuk memilih karena di profesi ya pun di tempat saya kerja pun pada ngomong kalo yang ini begini kalo yang itu begitu jadi ya udah tau lah ya, jadi ya ikutin aja lah ya, tapi saya denger kalo si A janji begini, kalo si B janjinya begini, yang terpilih menjanjikan a b c tapi belum banyak yang terealisasi.</p> | <p>Janji-janji yang disampaikan tidak menjadi pengaruh dalam menentukan pilihan, karena ditempat kerja sudah banyak yang menjelaskan terkait masing-masih calon bagaimana jadi janji-janji yang disampaikan tidak menjadi faktok dalam menentukan pilihan.</p> |
| 9. | <p>kalo untuk di profesi mungkin sangat berdampak untuk yang 2018 ya, karena sudah terdengar kabar, kalo tidak memilih a akan begitu kalo memilih b akan begini sudah</p> | <p>Sangat berdampak jika dilihat dari profesi, karena sudah banyak kabar jika tidak memilih A bakal begini dan jika memilih B akan begitu.</p> |

| | | |
|--|--|---|
| | <p>banyak terdengar kabar, Jadi ya gitu lah ya dunia politik paham kan aa ge.</p> | |
| | <p>10. lupa kalo sekarang mah, tapi waktu itu mah tau.</p> | Mengetahui. |
| | <p>11. Emm bisa dibilang cukup sesuai.</p> | Cukup sesuai |
| | <p>12. Ya karena itu tadi, kalo memilih ini bakal gini kalo memilih itu bakal gitu, ya seperti tadi udah banyak selentingan selentingan, jadi dengan ketakutan kami yang nanti nya dipindahkan, yang nanti nya begini yang nanti nya begini.</p> | Tidak berpengaruh apa-apa karena sudah banyak selentingan jika memilih A bakal begini dan jika memilih B akan begitu. |
| | <p>13. Tidak ada sih ya secara langsung mah, tapi kalo dengar dari orang per orang jadi kaya terintimidasi secara sendiri nya, jadi terintimidasi karena omongan orang jadi ketakutan buat kami.</p> | Terintimidasi secara tidak langsung karena omongan orang lain. |
| | <p>14. saya rasa tidak berpengaruh, karena asal beliau calonnya sudah tau ciamis sudah memahami ciamis dan memahami masyarakat ciamis, walaupun dari luar ciamis karena dulu dulu pun dari luar ciamis, dan ini setau</p> | Daerah asal calon tidak mempengaruhi dalam menentukan pilihan. Asalkan calon yang akan memimpin sudah memahami masyarakat ciamis, mau dari luar Ciamis pun tidak apa-apa. |

| | | |
|--|--|---|
| | <p>saya yang pertama yang dari ciamis, dulu dulu pernah dari ciamis, tapi ya sama aja gak ada pengaruhnya, tapi kalo saya lebih ke yang luar ciamis.</p> | |
| | <p>15. Kalo di pilkada 2018, Banyak paslon paslon yang blusukan bersama tim sukses nya.</p> | <p>Banyak calon dan tim sukses nya yang blusukan ke masyarakat</p> |
| | <p>16. ahah ya mungkin dari, timses mungkin ya bisa jadi ya karena beliau yang sebelumnya dianggap tidak bisa, tapi banyak juga masyarakat yang menganggap yang dulu itu lebih baik daripada yang ini, tapi kalo pribadi ke pak iing karena saya lebih merasakan beliau lebih memahami kepada ASN, tapi kalo yang sekarang pak herdiat kelihatan banget jomplang nya kaya ada sekat gitu, kalo sama berasal beliau pak iing lebih berasa kaya oh ini pemimpin yang mengayomi masyarakat nya gitu, yang saya rasakan begitu, kalo dilingkungan masyarakat mungkin ya itu a, karena tergiur oleh janjinya itu a tapi</p> | <p>Faktor yang menjaji alasan perubahan dukungan masyarakat karena rasa ketidak puasan akan pimpinan sebelumnya dan juga karena janji-janji yang disampaikan oleh bapak Herdiat lebih diterima oleh masyarakat.</p> |

| | | |
|--|--|--|
| | <p>kan kalo saya jujur pas pilkada 2018 itu tidak memilih herdiat karena memang dari pas pendekatan nya lebih berasa beda.</p> | |
|--|--|--|



| Nama | Jawaban | Kesimpulan |
|------------|--|--|
| Bapak Nana | 1. Atos sudah sudah. | Sudah mengikuti Pilkada 2018. |
| | 2. Dari emm dari infomasi temen temen lingkungan sini. | Mengetahui calon bup[at]i dari masyarakat sekitar. |
| | 3. Jelas mempengaruhi karena untuk kemajuan daerah, ya gitu lah bisa. | Sangat berpengaruh karena untuk kemajuan daerah. |
| | 4. Tidak ada. | Tidak ada. |
| | 5. Emm ya biasa biasa aja mungkin. | Biasa-biasa saya tidak ada pengaruh terkait tingkatan ekonomi masyarakat. |
| | 6. Mm untuk tokoh agama tidak ada intervensi untuk masyarakat untuk memilih salah satu calon. | Tidak ada intervensi yang disampaikan oleh tokoh agama kepada masyarakat. |
| | 7. Mungkin tidak ada pengaruh sih. | Tidak ada pengaruhnya. |
| | 8. Emm janji janji ada yang terealisasi ada ya g belum keinginan masyarakat kan berbeda beda. Jadi kemungkinan sedikit ada ngaruhnya juga. | Lumayan berpengaruh untuk menentukan pilihan. |
| | 9. Emm tidak ada. | Tidak berdampak |
| | 10. Sebagian mungkin ada yang saya tau. | Mengetahui sebagian. |
| | 11. Mm sudah sebagian masih belum mencapai keinginan pribadi saya seperti jalan yang menghubungkan di | Sebagian visi-misi yang disampaikan belum sesuai dengan keinginan pribadi. |

| | | |
|--|---|--|
| | daerah saya pribadi sih kalo yang lain belum tau, tapi di daerah lain juga menurut informasi belum juga terealisasi | |
| | 12. Ya lumayan berpengaruh. | Sedikit berpengaruh terhadap menentukan pilihan. |
| | 13. Tidak ada. | Tidak ada intimidasi |
| | 14. Kurang tau kalo soal itu, ya kemungkinan ya salah satu pimpinan yang lebih tau ciamis ya yang berdomisili di ciamis, ya tarolah yang dari dalem ciamis, dan yang satu dari luar ciamis ya ada dampak untuk kemajuan buat masyarakat kabupaten | Cukup berpengaruh, karena pimpinan berasal dari Ciamis akan lebih mengetahui Ciamis daripada yang luar Ciamis. |
| | 15. Kurang tau, saya bukan penduduk atau relawan jadi kurang tau, ya paling dari timses da kalo dari calon mah gak ada. | Yang menjalin hubungan kedekatan dengan masyarakat adalah tim suksesnya. |
| | 16. Diih kalo itu kemungkinan masyarakat menginginkan adanya perubahan yang baru keinginan masyarakat lebih terealisasi atau ya mungkin masyarakat ingin yang baru saja. | Karena keinginan masyarakat akan sosok pemimpin yang baru. |

| Nama | Jawaban | Kesimpulan |
|------------|--|---|
| Bapak Upen | 1. Udah. | Sudah mengikuti Pilkada 2018. |
| | 2. Emm itu kan waktu itu udah pada tau pak herdiat mah sering kesini pernah kesini pas ada acara datang kesini jadi udah gak asing lagi kalo sama pak herdiat mah jadi udah kenal lah. | Mengetahui calon bupati dikarenakan salah satu calon sering berkunjung ke desa ini. |
| | 3. Emm iyah berpengaruh. | Berpengaruh. |
| | 4. Emm enggak sih. | Tidak ada pengaruh kepada penguasa lokal. |
| | 5. Emm menurut saya sih pemilihan pak herdiat mah tidak berpengaruh sih tingkat ekonomi da mayoritas didieu mah milih pak Herdiat. | Tidak memiliki dampak dikarenakan mayoritas masyarakat memilih bapak Herdiat. |
| | 6. Emm tentang tokoh agama ada sih yang ngenalkan pak herdiat gini gini gini. | Ada branding yang disampaikan oleh tokoh agama tentang Bapak Herdiat. |
| | 7. Tidak sih teu aya pengaruh na. | Tidak ada pengaruhnya. |
| | 8. Emm udah terbukti ada bukti nyatanya ada, ya janji itu juga sebagian berpengaruh pas menentukan pilihan, juga janji naekeun gaji rt tuh kan tos kabuktian ayeuna naek. | Cukup berpengaruh karena dahulu pernah janji untuk menaikkan gaji RT. |
| | 9. Tidak. | Tidak berdampak. |

| | | |
|--|--|---|
| | 10. Tau. | Mengetahui. |
| | 11. Sudah sesuai | Sudah sesuai dengan yang diinginkan |
| | 12. emm orang pak herdiat mah bermasyarakat gening nya jadi kitu tah sok ada kitu kadieu mun aya acara acara teh kunjungan kunjungan | Cukup berpengaruh dikarenakan bapak Herdiat sering datang kunjungan ke Desa ini |
| | 13. Tidak tidak tidak. | Tidak ada intimidasi |
| | 14. Pengaruhnya pak herdiat orang sini juga ya bisa disebutkan masih satu kecamatan dekat kitu nya masih bagian dari wilayah sini terus orang nya dikenal juga gitu nya di masyarakat. | Sangat berpengaruh, dikarenakan bapak Herdiat berasal dari daerah sini jadi masyarakat sudah mengenal Bapak Herdiat kemudian banyak masyarakat yang memilih beliau. |
| | 15. Emm dengan membangun hubungan dengan kelompok nya itu seperti membuat pengajian pengajian di daerah, sering lah di sumber jaya mengadakan pengajian pengajian gitu. | Hubungan yang dibangun oleh bapak Herdiat adalah dengan mengadakan pengajian-pengajian. |
| | 16. Emm mungkin ya pak iing kan udah tau kerjanya barang kali kalo pak herdiat pengen tau lah kerjanya gimana bagus apa engga. | Dikarenakan rasa ketidakpuasan atas kepemimpinan sebelumnya. |

| Nama | Jawaban | Kesimpulan |
|-------------|---|--|
| Bapak Maman | 1. Sudah. | Sudah mengikuti Pilkada 2018. |
| | 2. Ya karena pak herdiat orang Kawali jadi tau da deket, soalna masih satu lingkungan. | Mengetahui calon bupati karena salah satu calon merupakan orang sini. |
| | 3. masing-masing sih tapi nya da sami pilihan mah ka pak herdiat da satu wilayah. | Bebas memilih sesuai keinginan tetapi pilihannya pun sama ke bapak Herdiat. |
| | 4. teu lah eta mah eta mah tergantung ti wilayah teu pengaruh kana nu kitu mah. | Tidak ada pengaruh kepada penguasa lokal. |
| | 5. Masalah itu mah gak terlalu berdampak ya da eta mah pilihan masing-masing we bebas. | Tidak memiliki dampak dikarenakan setiap orang punya pilihan masing-masing. |
| | 6. teu ikut serta teu ikut andil netral pokok namah. | Tidak ada pengaruh dari tokoh agama. |
| | 7. teu ah teu aya pengaruh nanaon, da asa biasa biasa we. | Tidak ada pengaruhnya. |
| | 8. Ai janji mah eta mah ditepati, nya basa eta teh janji masih jangan renov masjid tuh meser semen, nya eta mah itungan na sodakoh lah. | Cukup berpengaruh karena dahulu pernah janji untuk memberikan sodakoh untuk renovasi masjid. |
| | 9. nya ai eta mah berdampak da, nya gening ai jalan nu jelek di bereskan pembangunan | Sangat berdampak karena infrastuktur jalan penghubung Kawali Cipatu diperbaiki. |

| | | |
|--|---|--|
| | ditingkatkeun, nya kan sabot herdiat we jalan anu gerba cipaku Kawali di hadean teh. | |
| | 10. Lah ai nu kitu duka teu terang dan teu ikutan kana kelompok kelompok kitu tapi nya sa terang abi mah nya eta masihan sodakoh we kangge masjid umum di kampung ieu. | Tidak mengetahui sebagian yang diketahui hanya sodakoh yang diberikan ke masjid jammi. |
| | 11. - | - |
| | 12. - | - |
| | 13. Tidak sih a. | Tidak ada intimidasi |
| | 14. besar hampir 90 persen lah milih Pak herdiat jadi nya berpengaruh pisan lah eta mah, nya pedah orang ciamis asli we kitu komo ieu mah deket ti Kawali jadi nya masih keneh, nya da piraku we gening cenah urang urang anu da kecamatan teh kalah milih orang luar. | Sangat berpengaruh, sehingga sekitar 90 persen masyarakat Cipaku memilih bapak Herdiat. |
| | 15. Nya paling eta lah masihan sodakoh ka masjid, nya paling da tim sukses na nu dareket eta di Kawali nu sok kadieu mah, nya da sok ngariung di Kawali kaditu, nya da basa eta mah | Hubungan yang dibangun kepada masyarakat oleh tim suksesnya saja dan memberikan bantuan sodakoh ke masjid jammi. |

| | | |
|--|--|---|
| | <p>kaditu hayu kadieu hayu teu ambil pusing gening da dititah milih Pak herdiat pedah masihan ka masjid hayu da didieu mah teu ningali program na lah nya da ai tos jadi mah kamaha we jalan na.</p> | |
| | <p>16. Nya menurut ieu namah pedah asli orang ciamis orang dieu, kan nya cuma ai orang luar mah, jadi nya kitu we ningali na masyarakat mah.</p> | <p>Dikarenakan salah satu calon berasal dari Ciamis menyebabkan masyarakat banyak memilihnya.</p> |



| Nama | Jawaban | Kesimpulan |
|---------|--|--|
| Ibu Eha | 1. Sudah. | Sudah mengikuti Pilkada 2018. |
| | 2. Dari pemerintah, dan dari benner. | Mengetahui dari pemerintah dan banner. |
| | 3. Gak ada itu mah pilihan sendiri. | Tidak ada pengaruhnya, untuk memilih bebas sesuai keinginan masing-masing |
| | 4. Gak ada. | Tidak ada . |
| | 5. Ada, biasanya yang ekonominya kurang itu lebih condong ke salah satu paslon karena dulu kalo dari pak ling mah dulu pernah jenguk ke sini ka yang penyakit kangker langsung kesini. | Ada kecondongan terkait tingkat ekonomi masyarakat, yang dimana masyarakat ekonomi bawah lebih condong ke pak ling |
| | 6. Gak ada paksaan kalo milih mah tapi ada lah yang ngomong kalo calon ieu kieu tapi da ai miwarang mah henteu, da di pangajian ge kitu, nya da soalnya kan istri na pak iing basa eta jadi ketua na ibu ibu pengajian di masjid agung sok ngabagi bagi baju seragam ka ibu ibu pengajian teh, itu abi ge gaduh dua malah kantos poto bareng, pami istrina pak herdian mah janteun bendahara tapi Sami aktif sok pangaosan di masjid | Tidak ada paksaan dari tokoh agama untuk memilih salah satu calon akan tetapi branding salah satu calon oleh tokoh agama yang disampaikan sat pengajian. |

| | | |
|--|--|---|
| | agung unggal dinteun salasa.. | |
| | 7. Kalo sekarang mah jadi sepi benteun jng kapungkur, jadi asa bareunten di warung ge asa sepi. | Pengaruhnya sekarang menjanji sepi pembeli. |
| | 8. Janji mah engga sih. | Janji-janji yang disampaikan calon tidak terlalu diperhatikan. |
| | 9. Pasti itu mah | Sudah pasti berdampak |
| | 10. Tidak. | Tidak mengetahui |
| | 11. - | - |
| | 12. - | - |
| | 13. Gak ada. | Tidak ada intimidasi |
| | 14. Emm ngaruh sih lumayan kalo di masyarakat sini mah | Daerah asal calon mempengaruhi masyarakat dalam menentukan pilihan. |
| | 15. Teu aya si kadieu mah paling ngayakeun acara ageng di alun-alun, sareng nya paling ka masjid agung ka pangaosan sok aya wae. | Untuk menjalin hubungan dengan pendukungnya dari calon bupati mengadakan kegiatan di alun-alun dan juga pengajian di masjid agung |
| | 16. Ya mungkin ya karena hoyong ku urang ciamis asli. | Karena menginginkan di pimpin oleh orang asli ciamis. |

| Nama | Jawaban | Kesimpulan |
|-----------|---|---|
| Ibu Enung | 1. Sudah. | Sudah mengikuti Pilkada 2018. |
| | 2. Dari keluarga terus nya tina banner. | Mengetahui calon bupati dari keluarga dan banner. |
| | 3. Ya lumayan berpengaruh da saya mah ngikutin aja sama suami da nya pilihan na ge Sami | Berpengaruh, karena pilihan saya mengikuti suami. |
| | 4. Kalo itu mah gak tau yah gak ada juga. | Tidak ada pengaruh kepada penguasa lokal. |
| | 5. gak ada sih da disini mah deket na ka pak Herdiat nya jadi suara seer na kadinya ai tina nu kitu mah teu aya hubungan na. | Tidak memiliki dampak dikarenakan mayoritas masyarakat memilih bapak Herdiat. |
| | 6. Tokoh agama teu aya sih da didieu mah tos pada teurang oge ka pak herdiat jadi nya pada kadinya. | Tidak ada pengaruh dari tokoh agama. |
| | 7. tidak ada. | Tidak ada pengaruhnya. |
| | 8. Ya janji janji mah harus ditepati we nu penting mah, lah teu ngaruh oge sih janji janji mah da saya udah tau pak herdiat gimna da orang sini jadi janji janji mah teu berpengaruh sih. | Janji yang disampaikan calon tidak berpengaruh pada menentukan pilihan dikarenakan sudah kenal dan tau bapak Herdiat. |
| | 9. Ya berdampak lumayan kaya ke jalan jalan sini di aspal di perbaiki lah gitu | Berdampak, seperti perbaikan jalan. |
| | 10. Tidak. | Tidak mengetahui. |

| | | |
|--|---|--|
| | 11. - | - |
| | 12. - | - |
| | 13. Tidak. | Tidak ada intimidasi |
| | 14. Sangat berpengaruh sih da kan pak hardiat orang sini jadi nya milih we hela orang dieu atuh samemeh milih orang luar mah. | Sangat berpengaruh, dikarenakan bapak Herdiat berasal dari daerah sini jadi masyarakat banyak yang memilih beliau. |
| | 15. Nya paling ikut kata pengajian pengajian kitu sok aya datang hadir jadi nya masyarakat nu lain ge pada terang ka pak Herdiat. | Hubungan yang dibangun oleh bapak Herdiat adalah dengan menghadiri pengajian-pengajian. |
| | 16. Nya eta pedah asli orang dieu we meren jadi seer nu ngadukung na jadi menang. | Dikarenakan bapak Herdiat berasal dari daerah sini sehingga banyak yang mendukungnya. |



| Nama | Jawaban | Kesimpulan |
|-----------|---|---|
| Ibu Enung | 1. Sudah. | Sudah mengikuti Pilkada 2018. |
| | 2. Dari keluarga terus nya tina banner. | Mengetahui calon bupati dari keluarga dan banner. |
| | 3. Ya lumayan berpengaruh da saya mah ngikutin aja sama suami da nya pilihan na ge Sami | Berpengaruh, karena pilihan saya mengikuti suami. |
| | 4. Kalo itu mah gak tau yah gak ada juga. | Tidak ada pengaruh kepada penguasa lokal. |
| | 5. gak ada sih da disini mah deket na ka pak Herdiat nya jadi suara seer na kadinya ai tina nu kitu mah teu aya hubungan na. | Tidak memiliki dampak dikarenakan mayoritas masyarakat memilih bapak Herdiat. |
| | 6. Tokoh agama teu aya sih da didieu mah tos pada teurang oge ka pak herdiat jadi nya pada kadinya. | Tidak ada pengaruh dari tokoh agama. |
| | 7. tidak ada. | Tidak ada pengaruhnya. |
| | 8. Ya janji janji mah harus ditepati we nu penting mah, lah teu ngaruh oge sih janji janji mah da saya udah tau pak herdiat gimna da orang sini jadi janji janji mah teu berpengaruh sih. | Janji yang disampaikan calon tidak berpengaruh pada menentukan pilihan dikarenakan sudah kenal dan tau bapak Herdiat. |
| | 9. Ya berdampak lumayan kaya ke jalan jalan sini di aspal di perbaiki lah gitu | Berdampak, seperti perbaikan jalan. |
| | 10. Tidak. | Tidak mengetahui. |

| | |
|---|--|
| 11. - | - |
| 12. - | - |
| 13. Tidak. | Tidak ada intimidasi |
| 14. Sangat berpengaruh sih da kan pak hardiat orang sini jadi nya milih we hela orang dieu atuh samemeh milih orang luar mah. | Sangat berpengaruh, dikarenakan bapak Herdiat berasal dari daerah sini jadi masyarakat banyak yang memilih beliau. |
| 15. Nya paling ikut kata pengajian pengajian kitu sok aya datang hadir jadi nya masyarakat nu lain ge pada terang ka pak Herdiat. | Hubungan yang dibangun oleh bapak Herdiat adalah dengan menghadiri pengajian-pengajian. |
| 16. Nya eta pedah asli orang dieu we meren jadi seer nu ngadukung na jadi menang. | Dikarenakan bapak Herdiat berasal dari daerah sini sehingga banyak yang mendukungnya. |



| Nama | Jawaban | Kesimpulan |
|----------|---|--|
| Ibu Dini | 1. sudah. | Sudah mengikuti Pilkada 2018. |
| | 2. Dari informasi lingkungan kerja. | Mengetahui calon bupati dari lingkungan kerja. |
| | 3. Tidak. | Tidak berpengaruh.. |
| | 4. Kalo itu kembali pada dirinya masing-masing kalo saya pribadi ya, jangan di kota di desa desa aja kaya gitu sering terjadi yang condong ke salah satu calon dengan iming-iming uang dan sebagainya tapi ya saya pribadi mah kumaha hati nurani. | Jangankan di kota di desa saja hal seperti itu sering terjadi seperti condong ke salah satu paslon. |
| | 5. Engga juga si kalo itu mah, soalnya tergantung masyarakatnya juga ya, kalo misalkan masyarakat sering mengadakan perkumpulan habit sendiri mungkin mau menengah mau atas juga kalo punya kepentingan sesuatu ya pasti condong ke salah satu, tapi kalo saya yang notabene nya gak tau siapa siapa ya gak ada pengaruh sih. | Tergantung kepada masyarakatnya apakah memiliki kepentingan atau engga jika dilihat dari tingkat ekonomi masyarakat tidak ada hubungannya. |
| | 6. Itu mah tergantung ini nya sih, mereka paling menjelaskan kalo calon ini gini gini kalo memilih mah bebas | Para tokoh agama hanya akan menjelaskan secukupnya apabila ditanyakan, akan tetapi jika tokoh agama tersebut |

| | | |
|--|--|--|
| | <p>tidak memprovokasi atau intervensi harus memilih siapa, soalnya jarang sih kalo kita gak nanya mereka gak bakal ngasih tau, tapi kalo kita tanya ini orang seperti apa ya kalo kita gak berusaha nyari tau ya mereka jelasin secara kasarnya doang, kecuali kalo dia punya kepentingan pasti dijelasin secara gamblang tapi kalo tidak ya paling sekilas.</p> | <p>memiliki kepentingan maka tanpa ditanya pun akan menjelaskan secara rinci calon bupati yang dia dukung.</p> |
| | <p>7. Cukup besar ya karena kami dilembaga ditekankan untuk netral tidak boleh condong ke siapa siapa karena ada slogannya, dalam berpakaian, berfoto, atau berfoto dihibau untuk tidak memihak siapapun.</p> | <p>Cukup besar ya pengaruhnya karena dilembaga kerja kita diharuskan netral tidak berpihak pada siapapun.</p> |
| | <p>8. tu mah tergantung kalo menurut pribadi saya, ya gimana teras manfaatnya aja kalo selama ini ya, tapi bagi saya ya selama ini janji janji mah terasa biasa aja ya bagi pribadi saya mah, janji janji mereka hanya jadi omon</p> | <p>Tidak berpengaruh akan menentukan pilihan, karena selama ini janji yang di sampaikan oleh para calon hanyalah omon-omon saja.</p> |

| | | |
|--|---|---|
| | omon. | |
| | 9. ohh tidak kalo secara pribadi. | Tidak berdampak jika secara pribadi |
| | 10. Enggak juga sih kalo saya mah, karena kemarin memilih ya karena kewajiban aja harus memilih, itu mah berdasarkan hati nurani saja, karena kan biasanya orang calon punya visi misi yang baik tapi pada realitanya berbeda, slogan saya mah sebagai masyarakat wajib berpartisipasi dalam pemilihan udah itu aja | Tidak mengetahui karena pasti visi-misi setiap calon bagus akan tetapi pada realitanya tidak terlaksana semua, bagi saya pemilihan hanya tentang menunaikan kewajiban sebagai warga negara. |
| | 11. - | - |
| | 12. - | - |
| | 13. Tidak | Tidak ada intimidasi |
| | 14. Bisa juga seperti itu, melihat kondisi di masyarakat cukup mempengaruhi karena ya mereka udah tau kan orang, kan ada slogannya kenapa harus memilih orang luar kalo orang Pribumi lebih baik, pasti condong kesana, itu mah persepsi aja. | Cukup berpengaruh, karena jika orang Ciamis maka mereka sudah tahu orangnya, selanjutnya apabila ada yang dari daerah asli Ciamis kenapa harus memilih yang dari luar Ciamis. |
| | 15. Kalo itu saya kurang mengetahui | Tidak mengetahui. |
| | 16. ya kalo itu mungkin menurut saya pribadi | Dikarenakan orang pribumi yang maju maka |

| | | |
|--|---|--|
| | karena ada orang Pribumi yang maju kenapa harus memilih orang luar ya seperti tadi saya sampaikan | mayoritas dukungan akan masuk ke beliau. |
|--|---|--|



| Nama | Jawaban | Kesimpulan |
|----------|--|---|
| Ibu Yani | 1. emm uhun sudah. | Sudah mengikuti Pilkada 2018. |
| | 2. Dari taunya sok ada yang kesini yang ngomong calonya anu anu anu. | Mengetahui dari orang-orang yang datang ke rumah. |
| | 3. Tidak, kumha masing-masing we pilihan mah sakarep sendiri. | Tidak ada pengaruhnya. |
| | 4. gak ada. | Tidak ada |
| | 5. gak ada disini mah masing-masing mau yang yang gimana juga masing-masing. | Tidak ada pengaruh terkait kondisi sosial. |
| | 6. Enggak gak ada kalo yang gitu mah. | Tidak ada pengaruh dari tokoh agama. |
| | 7. Engga berpengaruh mau sebelum apa sesudah pilkada juga ya gini gini aja. | Tidak ada pengaruh apa-apa. |
| | 8. Harapan mah bisa nepatin janji tapi ya gak pada ditepati, itu cuma janji janji doang, gak ngaruh juga janji janji yang omongan kan kepada saya mah. | Janji-janji yang disampaikan tidak menjadi faktor dalam menentukan pilihan. |
| | 9. Tidak,itu mah tidak janji janjinya juga gak ditepati semua. | Tidak berdampak apa-apa. |
| | 10. Gak tau | Tidak mengetahui. |
| | 11. - | - |
| | 12. - | - |

| | | |
|--|--|---|
| | 13. Tidak. | Tidak ada intimidasi. |
| | 14. Tidak berpengaruh sama aja. | Daerah asal calon tidak mempengaruhi dalam menentukan pilihan. |
| | 15. Tidak ada yang kesini gak ada yang datang. | Tidak ada calon bupati yang menjalin hubungan komunikasi dengan masyarakat. |
| | 16. Ahh sama aja enggak ada pengaruh, dari dulu ya kaya gini sama aja gak perubahan. | Tidak ada perubahan dari dulu sampai sekarang. |



| Nama | Jawaban | Kesimpulan |
|-----------|--|---|
| Ibu Enong | 1. Udah | Sudah mengikuti Pilkada 2018. |
| | 2. Emm dari anak saya | Mengetahui calon bupati dari anak. |
| | 3. Engga, punya pilihan masing-masing tapi da sama hahaha | Tidak ada pengaruhnya. |
| | 4. Alhamdulillah sih keliatannya lancar lah, enggak ada ikatan umkm, tidak ada paksaan itu mah pilihan hati mau milih siapa siapa juga | Tidak ada ikatan dari para pengusaha UMKM untuk memilih salah satu paslon. |
| | 5. Ya gmna ya, ya sama aja kaya sekarang gini, perekonomian sama, apalagi sekarang lagi turun sepi, mahal, sembako beli sekarang segini besok mahal, kalo pilihan mah ada juga yang berbeda kalo ditingkatkan ekonomi mah tapi ya itu bebas pilihan, saya juga gak ngajak gak ini Cuma rata lah hampir sama | Tidak ada pengaruh terkait tingkat ekonomi masyarakat semua memilih sesuai keingin masing-masing. |
| | 6. Gak ada, kalo didalam itu, walaupun sering di pengajian tapi enggak sih, engga menjatuhkan tapi ada sih, tapi itu mah terserah masing-masing, eu kalo ikut serta gak ada harus milih ini ini mah, cuma ada aja yang bilang kalo yang ini gini kalo yang ini gini, cuma engga lah gak menjatuhkan satu sama lain | Ada penyampaian dari tokoh agama dalam pengajian yang nga branding salah satu calon tapi tidak ada ajakan untuk memilih salah satu calon. |
| | 7. Alhamdulillah sih eu berkembang ada perkembangan, cuma dulu saya jualan nya bukan | Cukup memberikan pengaruh karena usahanya menjadi berkembang |

| | | |
|--|---|--|
| | <p>disini di singdangrasa di sana , jualan nya bukan yang ini, ganti profesi jualan nya jadi yang ini, eu cuma disana sih sepi tapi ya biasalah kalo jualan mah kalo ada ada kalo gak ada gaka ada gak merata kalo jualan mah semuanya juga sama ya hahha</p> | |
| | <p>8. Alhamdulillah kalo yang kemarin perkembangan nya ada perkembangannya ada progres nya ada keliatan lah ada bukti, ya karena janjinya saya memilih beliu.</p> | <p>Karena janji-janji yang disampaikan oleh calon bupati menjadi faktor untuk menentukan pilihan.</p> |
| | <p>9. Berdampak juga ada perkembangan nya yang saya rasakan</p> | <p>Berdampak karena merasakan perkembangannya.</p> |
| | <p>10. Ada tau</p> | <p>Mengetahui.</p> |
| | <p>11. Nya kitu lah, sebagian mah enya</p> | <p>Sebagian sudah sesuai keinginan.</p> |
| | <p>12. Teu terlalu ngaruh si a da nu ku saya tingali mah tina janji-janji na</p> | <p>Vsis-misi tidak menjadi faktor utama dalam menentukan pilihan.</p> |
| | <p>13. Gak ada</p> | <p>Tidak ada intimidasi.</p> |
| | <p>14. Ya menentukan si ada kan ai asli ciamis mah gening ngerti meren kana masyarakat ciamis</p> | <p>Daerah asal calon menjadi faktor penting dalam pemilihan.</p> |
| | <p>15. Ya sosialisasi ke masyarakat bikin acara di alun alun buat masyarakat banyak</p> | <p>Pendekatan yang dilakukan dengan mengadakan acara besar yang menarik masa dengan jumlah banyak.</p> |
| | <p>16. Eu ga tau sih, cuma ya gak ada yang memperngaruhi ibu mah ya ngikutin we, soalnya mungkin kalo pak iing ya gitu we ibu tidak merasakan dampak na</p> | <p>Karena rasa ketidak puasan akan bupati sebelumnya.</p> |

| | | |
|--|--|--|
| | beda jng anu ayeuna anu lebih karasa dina infrastruktur jeung lain lain | |
|--|--|--|

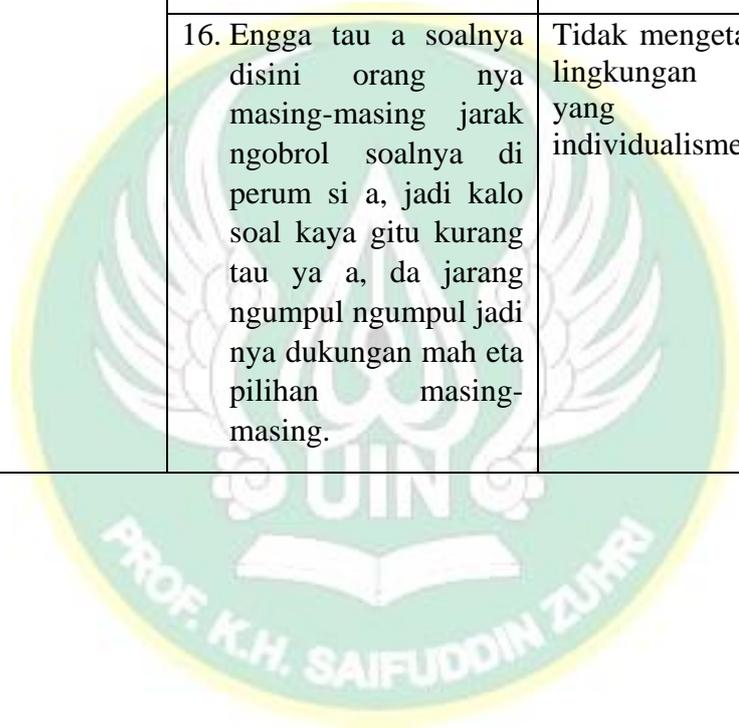


| Nama | Jawaban | Kesimpulan |
|---------|--|---|
| Ibu Ima | 1. 2018 mah sudah. | Sudah mengikuti Pilkada 2018. |
| | 2. Hmm dari naon teh dari sosial media paling. | Mengetahui calon bupati dari media sosial. |
| | 3. bisa saja sih, ada sih ajakan dari suami suruh milih salah satu paslon. | Ada ajakan dari suami untuk memilih salah satu calon bupati. |
| | 4. kayaknya tidak. | Tidak ada. |
| | 5. Ada perbedaan ya, ada peningkatan dari tahun sebelumnya. Sekarang mah lebih dukung orang asli sini. | Tidak ada pengaruh dari tingkat ekonomi masyarakat yang mempengaruhi adalah asal daerah calon bupati. |
| | 6. Tokoh agama kamha nya, tidak ada sih ya. | Tidak ada pengaruh dari tokoh agama. |
| | 7. Berpengaruh sih soalnya kan ada dana bantuan. | Cukup berpengaruh karena mendapat dana bantuan. |
| | 8. Janji janji itu harus terealisasi tapi yang sekarang belum. Jadi janji-janji tidak berpengaruh lah pas nentukeun pilihan. | Tidak berpengaruh akan menentukan pilihan, karena selama ini janji yang di sampaikan oleh para calon tidak terealisasi semua. |
| | 9. kepentingan pribadi tidak sih | Tidak berdampak jika secara pribadi. |
| | 10. tidak tau haha | Tidak mengetahui |
| | 11. - | - |
| | 12. - | - |
| | 13. Tidak | Tidak ada intimidasi |
| | 14. Iya Berpengaruh sih, | Sangat berpengaruh |

| | | |
|--|--|--|
| | <p>kan pak herdiat asli orang sini jadi kebanyakan masyarakat milih pak herdiat.</p> | <p>karena bapak Herdiat adalah asli orang Kawali, jadi mayoritas masyarakat memilih bapak Herdiat.</p> |
| | <p>15. Kalo itu ya paling terjun langsung ke masyarakat sih disini ada timses nya, kalo yang pak herdiat nya mah di Kawali sih terpusat di Kawali,dan kebetulan juga saya masih sodara sama pak herdiat hehe.</p> | <p>Hubungan yang dibangun kepada masyarakat oleh tim suksesnya saja karena untuk bapak Herdiat lebih terfokus di Kawali.</p> |
| | <p>16. hmm mungkin ya pak herdiat asli orang ciamis ya mungkin ya tetangga dengan kecamatan Kawali ya cipaku jadi ya mungkin masyarakat sini lebih condong ke pak herdiat iya, sebelum ke yang jauh kan itu ke yang dekat dulu ke tetangga dulu.</p> | <p>Dikarenakan bapak Herdiat merupakan masyarakat asli sini jadi sebelum memilih yang jauh pasti memilih yang asli orang sini dahulu..</p> |

| Nama | Jawaban | Kesimpulan |
|---------|---|---|
| Ibu Sri | 1. Sudah. | Sudah mengikuti Pilkada 2018. |
| | 2. Dari tetangga sekitar. | Mengetahui dari tetangga. |
| | 3. Tidak, masing-masing kalo soal pilihan mah. | Tidak ada pengaruhnya. |
| | 4. Teu aya, gak ada kecondongan para pengusaha ke salah satu paslon mah. | Tidak ada ikatan pengusaha untuk condong kesalah satu paslon. |
| | 5. Kondisi na ya memburuk, gak kondusif, soalnya tingkat ekonomi terkadang menentukan pilihan. | Terkadang tingkat ekonomi menjadi faktor menentukan pilihan. |
| | 6. Engga sih gak pake peran tokoh agama, kan pilihan sorangan. | Tidak ada pengaruh dari tokoh agama. |
| | 7. Tidak berpengaruh. | Tidak ada pengaruh apa-apa. |
| | 8. Ya janji janji na nya pandangan nya eta calon anu ka pilih, pa herdiat mah da bagus herdiat mah bagus bager, istri na ge da sok berbaur jng masyarakat sanajan urang rakyat biasa tapi ngayap gitu loh ibu namah bager,. | Janji-janji yang disampaikan oleh bapak Herdiat realistis. |
| | 9. Berdampak pasti lah herdiat mah. | Dampak dirasakan oleh masyarakat umum. |
| | 10. Enggak | Tidak mengetahui. |
| | 11. - | - |
| | 12. - | - |

| | | |
|--|--|---|
| | 13. Tidak, tina hate tah eta. | Tidak ada intimidasi. |
| | 14. Lah teu ngaruh asli mana nya mah si calon. | Daerah asal calon tidak mempengaruhi dalam menentukan pilihan. |
| | 15. Disini mah kurang tau si a,soalnya belum pernah kesini jadi gak tau paling yang kesini juga model tim sukses na we paling. | Yang menjalin hubungan komunikasi dengan masyarakat adalah tim suksesnya.. |
| | 16. Engga tau a soalnya disini orang nya masing-masing jarak ngobrol soalnya di perum si a, jadi kalo soal kaya gitu kurang tau ya a, da jarang ngumpul ngumpul jadi nya dukungan mah eta pilihan masing-masing. | Tidak mengetahui, karena lingkungan perumahan yang sifatnya individualisme. |



| Nama | Jawaban | Kesimpulan |
|---------|---|--|
| Ibu Oom | 1. Jadi pemilih. | Sudah mengikuti Pilkada 2018. |
| | 2. Dari kader desa, dari pengurus desa. | Mengetahui dari kader desa dan pengurus desa. |
| | 3. Henteu aya. | Tidak ada pengaruhnya. |
| | 4. Pasti ada lah a kalo gitu mah ngan teu semua tau, da pasti aya nu kieu a jadi abi milih ieu abi jadi nya kieu alhamdulillah karena milih Jalmi eta. | Ada ikatan antar para pengusaha lokal akan tetapi tidak semua orang mengetahuinya. |
| | 5. kadang ada yang naik kadang ada yang turun jadi ya kalo itu ya angger wae kitu a jadi teu aya ngaruh na nya a bagi abi mah. | Tidak ada pengaruh terkait tingkat ekonomi masyarakat. |
| | 6. Aya, tapi secara tidak langsung tapi sedikit sedikit anu menjerumusna kadinya, kan sok aya kumpulan kaditu kumpulan kadieu otomatis nya ceramah na mah agama tapi angger we esinamah ujung ujung na di titah milih kadinya jadi aya. | Ada pengaruh dari tokoh agama yang sering kali menyampaikan salah satu calon dan secara tidak langsung menggiring kita untuk memilih beliau. |
| | 7. Biasa wae ah, teu aya pengaruh na. | Tidak ada pengaruhnya. |
| | 8. Ada yang memenuhi ada yang engga, ada yang memenuhi tapi tidak 100 persen, henteu ahh teu | Tidak mempengaruhi untuk menentukan pilihan ke salah satu calon. |

| | | |
|-----|--|--|
| | mempengaruhi ai masalah janji mah. | |
| 9. | Tidak. | Tidak berdampak |
| 10. | Tidak. | Tidak mengetahui |
| 11. | - | - |
| 12. | - | - |
| 13. | Tidak. | Tidak ada intimidasi |
| 14. | henteu da nu penting mah kan jujur | Tidak penting daerah asal calon yang terpenting jujur. |
| 15. | henteu door to door teu terjun ke masyarakat da ai kadieu nah teu aya, tapi ai dibatur mah duka, aya paling nu sosialisasi na ti kader desa anu timses na. | Yang menjalin hubungan kedekatan dengan masyarakat adalah tim suksesnya. |
| 16. | Lah anu umum namah pemberian nya, yang dulunya janjinya segini segini ada lah sedikit. | Secara umumnya karena yang sekarang lebih banyak pemberiannya dulu pas kampanye. |

Lampiran 2 Dekomuntasi Wawancara

Gambar 1. Wawancara Dengan Narasumber





Lampiran 3 Daftar Riwayat Hidup

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama : Muhamad Pauzan
2. NIM : 2017303091
3. Tempat/Tgl. Lahir : Ciamis, 3 Februari 2002
4. Alamat : Dusun Batununggul, Desa Mekarmukti,
Kec. Cisaga, Kab. Ciamis, Jawa Barat
5. Ayah : Iim Ibrahim
6. Ibu : Enih Yuhaenih

B. Riwayat Pendidikan

1. SD/MI : SDN 3 Mekarmukti
2. SMP/MTs : Mts Harapan Baru
3. SMA/MAN : MAN 3 Ciamis
4. S1 : UIN Prof K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

C. Pengalaman Organisasi

Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia
Anggota Dept. PEMAGA HMJ HTN 2021
Koordinator Dept. PEMAGA HMJ HTN 2022
Bendahara Umum AM-HTN SI Koordinator Wilayah JATENG 2022
Ketua Umum Ikatan Mahasiswa Jawa Barat 2022
Koordinator Komisi C SEMA F Syariah 2023

Purwokerto, 2 Juni 2024

Peneliti



Muhamad Pauzan
NIM. 2017303091